

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banjar										
Tahun Penilaian	: 2025										
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029										
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029										
Visi	: Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis : Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan										
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya. 2 Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan 3 Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan 4 Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani 										
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	<i>Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya.</i>										
Tujuan Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter 2 Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan 3 Menurunnya resiko bencana 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 										
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	<i>Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter</i>										
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatnya kualitas pendidikan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Meningkatnya kualitas pendidikan	3	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	4	Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan		
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat										
2	Meningkatnya kualitas pendidikan										
3	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender										
4	Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan										
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya kualitas pendidikan										
IKU RPJMD	<i>Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah</i>										
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal, Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah ukuran lamanya pendidikan formal (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang.										
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 										

	3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Nama Dinas Terkait	<i>Dinas Pendidikan</i>
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan
	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
	Sasaran
	Meningkatnya kualitas pendidikan
	IKU
	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
	2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar
	3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama
	4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6
	5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15
	6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan
	7 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini
	8 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar
	9 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama
10 Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	
11 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
Program	
1. Program Pengelolaan Pendidikan	
2. Program Pengembangan Kurikulum	
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	<p>Kabupaten Banjar, 27 Oktober 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar</p>  <p>LIANA PENNY, S.T., M.S NIP. 198007122005012013</p>

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Nama OPD	: Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD (Tahun 2025-2029)
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter									
	Sasaran :									
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah	Rendahnya angka partisipasi murni dan kasar di jenjang SD dan SMP	RSP.22.01.01.01	Kepala Daerah	Anak usia sekolah tidak terdaftar di sekolah, lebih memilih jalur pendidikan keagamaan, kurangnya	Eksternal	C	Program penarikan anak tidak sekolah (ATS) ke sekolah formal, kampanye wajib belajar 12 tahun, dan	Masyarakat dan PEMDA
			Masih adanya anak putus sekolah di jenjang SD dan SMP	RSP.22.01.01.02	Kepala Daerah	Faktor ekonomi, lokasi sekolah jauh, atau pernikahan usia dini	Eksternal	C	Intervensi sosial dan beasiswa bagi anak berisiko putus sekolah, serta	Masyarakat dan PEMDA
			Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dasar	RSP.22.01.01.03	Kepala Daerah	Ruang kelas tidak memadai, kondisi bangunan rusak, atau	Internal	C	Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan RKB, dan pengadaan sarana	Masyarakat dan PEMDA
			Kualitas layanan pembelajaran belum merata antar sekolah	RSP.22.01.01.04	Kepala Daerah	Kompetensi guru bervariasi, supervisi kurang optimal	Internal	C	Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, supervisi akademik	Masyarakat dan PEMDA
			Kendala ekonomi keluarga peserta didik	RSP.22.01.01.05	Kepala Daerah	Pendapatan rendah, tidak mampu menanggung biaya tidak langsung sekolah	Eksternal	C	Optimalisasi BOS, KIP, bantuan seragam dan transportasi sekolah, serta	Masyarakat dan PEMDA
			Akses sekolah sulit di daerah terpencil	RSP.22.01.01.06	Kepala Daerah	Lokasi geografis sulit dijangkau, belum tersedia unit sekolah	Eksternal	C	Pembangunan sekolah satelit, transportasi antar jemput, dan kelas jauh di	Masyarakat dan PEMDA
			Rendahnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak	RSP.22.01.01.07	Kepala Daerah	Orang tua kurang memahami pentingnya pendidikan jangka panjang	Eksternal	C	Program parenting dan sosialisasi nilai pendidikan melalui sekolah dan	Masyarakat dan PEMDA
			Pendataan anak usia sekolah tidak bersekolah belum akurat	RSP.22.01.01.08	Kepala Daerah	Sinkronisasi data Dapodik dan data kependudukan belum optimal	Internal	C	Integrasi data lintas instansi (Dapodik, Disdukcapil, Dinsos), serta verifikasi	Masyarakat dan PEMDA
			Rendahnya kesadaran gender dalam pendidikan dasar	RSP.22.01.01.09	Kepala Daerah	Anak perempuan lebih sering membantu pekerjaan rumah dibanding	Eksternal	C	Sosialisasi kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, serta pendampingan	Masyarakat dan PEMDA

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*


Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banjar	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	
OPD yang Dinilai	: Dinas Pendidikan	
Sumber Data	Renstra Dinas Pendidikan TA 2025-2029	
Tujuan Strategis	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	
	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	
IKU Renstra OPD	IKU	
		2025
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	86,67%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	100%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	100%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6	86,50%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	95,45%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	58,74%
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	63,02%
	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	91,91%
	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	74,37%
	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	81.26 Indeks
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Nilai
Program	1. Program Pengelolaan Pendidikan	
	2. Program Pengembangan Kurikulum	
	3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis :	
	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	
	Sasaran Strategis	
	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	
	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	
	IKU Strategis	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	86,67%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	100%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	100%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6	86,50%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	95,45%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	58,74%
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	63,02%
	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	91,91%
	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	74,37%
	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	81.26 Indeks
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 Nilai
Program		
1. Program Pengelolaan Pendidikan		
2. Program Pengembangan Kurikulum		
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	Kabupaten Banjar, 27 Oktober 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar	
	 LINA PENNY, S.T., M.S NIP. 198007122005012013	

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Nama OPD	: Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun 2025-2029)
Tujuan Strategis	: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas
Urusan Pemerintahan	: Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter									
	Sasaran									
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia	Terjadinya pernikahan dini di usia sekolah	RSO.22.01.01.01	Kepala Dinas	Pola Pikir sebagian Masyarakat tentang manfaat pendidikan masih rendah	Eksternal	C	Mutu SDM dalam pembangunan cenderung rendah	Masyarakat dan Pemda
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	Pilihan ke sekolah agama lebih dominan dibanding pada sekolah formal	RSO.22.01.01.02	Kepala Dinas	Karakter Sosial Budaya Masyarakat yang Religius	Eksternal	C	terkendala administrasi dalam melamar pekerjaan atau memasuki dunia kerja (formal)	Masyarakat,
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	Anak usia sekolah putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan	RSO.22.01.01.03	Kepala Dinas	Kurangnya motivasi belajar, tekanan sosial/keluarga, pernikahan dini	Eksternal	C	Angka partisipasi sekolah menurun dan ketimpangan akses pendidikan meningkat	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Keterbatasan akses sekolah di daerah terpencil	RSO.22.01.01.04	Kepala Dinas	Jarak sekolah jauh, tidak tersedia transportasi umum, kondisi geografis sulit	Eksternal	C	Anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar	RSO.22.01.01.05	Kepala Dinas	Rendahnya literasi masyarakat, pengaruh budaya lokal yang kurang mendukung sekolah formal	Eksternal	C	Orang tua tidak mendorong anak bersekolah, angka partisipasi stagnan	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Data partisipasi sekolah tidak akurat atau tidak mutakhir	RSO.22.01.01.06	Kepala Dinas	Keterlambatan penginputan Dapodik, kesalahan pelaporan sekolah	Eksternal	C	Kebijakan intervensi tidak tepat sasaran, capaian SPM tidak terukur dengan benar	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia	Kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan angka partisipasi	RSO.22.01.01.07	Kepala Dinas	Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pemerintah desa belum optimal	Eksternal	C	Program dukungan sosial pendidikan tidak tepat sasaran	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	Keterbatasan program pendidikan alternatif (Paket A, B, C)	RSO.22.01.01.08	Kepala Dinas	Dukungan anggaran dan fasilitas pendidikan nonformal terbatas	Eksternal	C	Anak usia sekolah yang tidak masuk sekolah formal tidak terlayani	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	Gangguan eksternal (bencana, pandemi, atau cuaca ekstrem)	RSO.22.01.01.09	Kepala Dinas	Penutupan sekolah, keterbatasan akses teknologi untuk belajar jarak jauh	Eksternal	UC	Penurunan angka partisipasi dan keterlambatan belajar siswa	
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Ketidaktercapaian target indikator SPM pendidikan dasar	RSO.22.01.01.10	Kepala Dinas	Keterbatasan sarana prasarana, guru, dan dana pendidikan	Eksternal	C	Kinerja layanan pendidikan dasar menurun, SPM tidak tercapai	
			Rendahnya angka partisipasi sekolah usia wajib belajar (7-15 tahun)	RSO.22.01.01.11	Kepala Dinas	Faktor ekonomi, sosial, jarak sekolah jauh, dan rendahnya kesadaran masyarakat	Eksternal	C	Anak putus sekolah meningkat dan capaian indikator SPM menurun	
			Ketimpangan distribusi dan kualitas guru antar sekolah	RSO.22.01.01.12	Kepala Dinas	Guru menumpuk di wilayah perkotaan, minimnya guru di daerah terpencil	Eksternal	C	Kualitas pembelajaran tidak merata, capaian SPM tidak seimbang	
			Keterlambatan dan ketidakakuratan data pendidikan (Dapodik/SPM)	RSO.22.01.01.13	Kepala Dinas	Keterbatasan kompetensi operator sekolah dan lemahnya pembinaan	Eksternal	C	Data tidak valid, menghambat perencanaan dan pelaporan SPM	
			Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	RSO.22.01.01.14	Kepala Dinas	Dana pembangunan terbatas, kondisi geografis sulit dijangkau	Eksternal	C	Layanan pendidikan tidak memenuhi standar minimal	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
			Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	RSO.22.01.01.15	Kepala Dinas	Komunikasi lintas sektor belum efektif	Eksternal	C	Program SPM tidak sinergis antar unit dan kegiatan tumpang tindih		
			Ketidakpatuhan sekolah terhadap standar pelayanan minimal	RSO.22.01.01.16	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman sekolah terhadap regulasi SPM	Eksternal	C	Layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan nasional		
			Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung penerapan SPM	RSO.22.01.01.17	Kepala Dinas	Porsi APBD pendidikan belum mencukupi kebutuhan dasar	Eksternal	C	Program prioritas SPM tertunda atau tidak berjalan optimal		
			Rendahnya kapasitas dan komitmen SDM pelaksana SPM	RSO.22.01.01.18	Kepala Dinas	Kurangnya pelatihan dan pembinaan ASN pelaksana	Eksternal	C	Pelaksanaan program tidak efektif, akuntabilitas menurun		
			Keterlambatan pelaporan capaian SPM ke pemerintah pusat	RSO.22.01.01.19	Kepala Dinas	SDM terbatas, sistem pelaporan masih manual	Eksternal	C	Penilaian kinerja daerah menurun, hambatan dalam evaluasi nasional		
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM belum optimal	RSO.22.01.01.20	Kepala Dinas	Belum ada instrumen dan pedoman Money yang baku	Eksternal	C	Hambatan tidak terdeteksi dini, perbaikan lambat		
			Risiko penyimpangan dan inefisiensi pelaksanaan program SPM	RSO.22.01.01.21	Kepala Dinas	Lemahnya pengawasan internal dan budaya integritas ASN	Eksternal	C	Potensi penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, penurunan kepercayaan		
			Gangguan eksternal (bencana alam, pandemi, cuaca ekstrem)	RSO.22.01.01.22	Kepala Dinas	Kondisi geografis dan alam yang sulit diprediksi	Eksternal	UC	Gangguan kegiatan belajar mengajar dan capaian layanan dasar		
			Kurangnya sosialisasi SPM kepada masyarakat	RSO.22.01.01.23	Kepala Dinas	Informasi hak dan kewajiban pendidikan belum tersampaikan	Eksternal	C	Masyarakat tidak menuntut hak atas layanan minimal		
			Tidak tersedianya pembelajaran alternatif di daerah khusus	RSO.22.01.01.24	Kepala Dinas	Minim guru dan sarana, akses sulit	Eksternal	C	Anak usia sekolah tidak terlayani		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kualitas perencanaan kinerja tidak selaras dengan tujuan strategis	RSO.22.01.01.25	Kepala Dinas	• Renstra/Renja belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome) • Indikator tidak SMART	Eksternal	C	• Tujuan strategis tidak tercapai • Program tidak berdampak		
			Pengukuran dan pelaporan kinerja tidak akurat	RSO.22.01.01.26	Kepala Dinas	• Data capaian indikator tidak valid • Pelaporan manual • SDM pengelola data belum kompeten	Eksternal	C	• LKJIP tidak mencerminkan kondisi sebenarnya • Potensi temuan audit • Akuntabilitas menurun		
			Evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkelanjutan	RSO.22.01.01.27	Kepala Dinas	• Tidak ada jadwal evaluasi rutin • Hasil monitoring tidak ditindaklanjuti • Keterlibatan pejabat rendah	Eksternal	C	• Perbaikan kinerja stagnan • Risiko kesalahan berulang • Program tidak efektif		
			Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja rendah	RSO.22.01.01.28	Kepala Dinas	• Hasil evaluasi tidak dijadikan dasar perencanaan • Keputusan tidak berbasis kinerja • Kurangnya pemahaman pimpinan	Eksternal	C	• Program tidak efisien • Arah kebijakan tidak berbasis hasil • Penurunan efektivitas SAKIP		
			Komitmen pimpinan dan pegawai	RSO.22.01.01.29	Kepala	• SAKIP dianggap administratif	Eksternal	C	• Implementasi tidak		
			Sistem informasi akuntabilitas belum	RSO.22.01.01.30	Kepala	• Tidak ada integrasi antar bidang	Eksternal	C	• Pelaporan lambat		
			Ketidaksinambungan antar dokumen	RSO.22.01.01.31	Kepala	• Dokumen Renstra, Renja, PK,	Eksternal	C	• Integrasi dokumen rendah		

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banjar		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pendidikan		
Sumber Data	Renja Dinas Pendidikan TA 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter		
Program Pengelolaan Pendidikan (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. Program Pengelolaan Pendidikan		
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
Indikator Program	1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	78,31%
	2	Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	57,82%
	3	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) - Sekolah Dasar	7,11%
	4	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) - Sekolah Menengah Pertama	5,27%
	5	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) - Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1,65%
	6	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi Minimal B	73,11%
	7	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang terakreditasi Minimal B	78,28%
	8	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Minimal B	88,16%
	9	Persentase Satuan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan yang terakreditasi Minimal B	78,57%
	10	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	64,18%
	11	Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	56,93%
	12	Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	59,96%
	13	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	74,32%
	14	Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	66,28%
	15	Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	58,07%
Program Pengembangan Kurikulum (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	2. Program Pengembangan Kurikulum		
	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
Indikator Program	1	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	100%
	2	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	100%
	3	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	100%

	4	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	100%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
Indikator Program	1	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	0,53 indeks
	2	Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	0,64 indeks
	3	Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	0,83 indeks
	4	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikasi Pendidik	39,09%
	5	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang Bersertifikasi Pendidik	62,15%
	6	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang Bersertifikasi Pendidik	62,08%
	1. Program Pengelolaan Pendidikan		
	1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Keluaran/Hasil Kegiatan:		
	-	Persentase satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	41,16%
	-	Persentase satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	60,37%
	-	Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang	59,92%
	-	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan	100%
	-	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	77,79 Nilai
	-	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	72,40 Nilai
	-	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	61,98 Nilai
	-	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter	79,62%
	-	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi	68,18%
	-	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai	56,93%
	-	Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang Berprestasi Akademik	27,27%
	2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Keluaran/Hasil Kegiatan:		
	-	Persentase satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	51,39%
	-	Persentase satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	75,94%
	-	Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang	38,9%
	-	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan	100%
	-	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	74,98 Nilai
	-	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	72,20 Nilai
	-	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	63,41 Nilai
	-	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan	69,51%
	-	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan	74,32%
	-	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan	66,28%
	-	Persentase Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang	14,14%
	3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	Keluaran/Hasil Kegiatan:		
	-	Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang memiliki	80,59%
	-	Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana	76,99%
-	Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang	11,78%	
-	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan	100%	
-	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	72,43 Nilai	
-	Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	69,20 Nilai	
4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Keluaran/Hasil Kegiatan:			

Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

-	Persentase satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang memiliki	96,05%
-	Persentase satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang memiliki	100%
-	Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang	-
-	Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan	Satuan Pendidikar
-	Persentase Masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan	58,74%
-	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan	100%
-	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	73,42 Nilai
-	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	60,50 Nilai
-	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	57,42 Nilai
-	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	68,28 Nilai
-	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	65,27 Nilai
-	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	57,53 Nilai
-	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	68,57 Nilai
-	Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	67,17 Nilai
-	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	58,03 Nilai
2. Program Pengembangan Kurikulum		
-	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar yang	2 Kurikulum
-	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah	1 Kurikulum
-	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang	1 Kurikulum
-	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	-
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
-	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak	1:1,12 Rasio
-	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1:1,05 Rasio
-	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah	1:1,03 Rasio
-	Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan	1:16,04 Rasio
-	Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah	1:11,30 Rasio
-	Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah	1:7,6 Rasio
-	Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	0,69 Indeks
-	Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	0,86 Indeks
-	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang	66,04%
-	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang	95,02%
-	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang	95,43%
-	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak	40,22%
-	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang	21,10%
-	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah	51,53%
-	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	98,45%
Kabupaten Banjar, 27 Oktober 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar  HANNA PENNY, S.T., M.S NIP. 198007122005012013		

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	2025
Periode yang dinilai	2025
Tujuan Strategis	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
Sasaran strategis	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
Urusan Pemerintah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
A.											
1	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya capaian satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai SNP	ROO.22.01.01.01	Kabid Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pengadaan sarana pembelajaran • Ketergantungan tinggi terhadap bantuan pusat (DAK, BOS, dan hibah) • Ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan kebutuhan sarana 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tercapainya target SNP bidang sarana prasarana • Kualitas proses pembelajaran menurun • Penurunan indeks mutu pendidikan daerah 	Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
							Ketidaksesuaian antara sarana pembelajaran yang dimiliki sekolah dengan standar SNP	ROO.22.01.01.02	Kabid Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan operator terhadap kriteria sarana sesuai SNP • Tidak adanya pedoman teknis yang terperinci dalam penilaian kesesuaian sarana • Lemahnya pengawasan terhadap 	Internal
2		Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya capaian satuan pendidikan yang memiliki Prasarana pembelajaran sesuai SNP	ROO.22.01.01.03	Kabid Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pengadaan Prasarana pembelajaran • Ketergantungan tinggi terhadap bantuan pusat (DAK, BOS, dan hibah) • Ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan kebutuhan Prasarana 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tercapainya target SNP bidang Prasarana prasarana • Kualitas proses pembelajaran menurun • Penurunan indeks mutu pendidikan daerah 	Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Ketidaksesuaian antara Prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah dengan standar SNP	ROO.22.01.01.04	Kabid Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan operator terhadap kriteria Prasarana sesuai SNP Tidak adanya pedoman teknis yang terperinci dalam penilaian kesesuaian Prasarana Lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan dan perawatan Prasarana 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> Data capaian SNP tidak akurat Sekolah tidak memenuhi standar mutu nasional Kinerja pendidikan daerah sulit meningkat 	Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
3	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) -> Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.05	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemutakhiran data Dapodik dan pendataan lapangan Lemahnya koordinasi antarinstansi (Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinsos, Bappeda) Tidak ada sistem integrasi data pendidikan berbasis wilayah 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan program menjadi tidak tepat sasaran Kebijakan tidak berbasis data faktual Sulit memantau efektivitas penurunan ATS 	Peserta Didik Usia Sekolah Dasar Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan	
Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS			ROO.22.01.01.06	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Program antar-OPD belum sinergis (Dinas Pendidikan, Sosial, PPPA, Tenaga Kerja, dan Desa) Tidak ada forum koordinasi rutin Belum ada regulasi daerah khusus percepatan penurunan ATS 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> Upaya penanganan ATS berjalan parsial dan tumpang tindih Rendahnya efektivitas program lintas sektor 	Peserta Didik Usia Sekolah Dasar Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS			ROO.22.01.01.07	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pendampingan berkelanjutan bagi anak yang telah kembali ke sekolah Kurangnya koordinasi antara sekolah, pemerintah desa, dan orang tua 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> ATS kembali putus sekolah Menurunnya efektivitas program penarikan ATS Tidak tercapainya target indikator RPJMD 	Peserta Didik Usia Sekolah Dasar Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
4	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) -> Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.08	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemutakhiran data Dapodik dan pendataan lapangan Lemahnya koordinasi antarinstansi (Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinsos, Bappeda) Tidak ada sistem integrasi data pendidikan berbasis wilayah 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan program menjadi tidak tepat sasaran Kebijakan tidak berbasis data faktual Sulit memantau efektivitas penurunan ATS 	Peserta didik potensial jenjang SMP Satuan pendidikan Dinas Pendidikan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.09	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Program antar-OPD belum sinergis (Dinas Pendidikan, Sosial, PPPA, Tenaga Kerja, dan Desa) Tidak ada forum koordinasi rutin Belum ada regulasi daerah khusus percepatan penurunan ATS 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> Upaya penanganan ATS berjalan parsial dan tumpang tindih Rendahnya efektivitas program lintas sektor 	Peserta didik potensial jenjang SMP Satuan pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.10	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pendampingan berkelanjutan bagi anak yang telah kembali ke sekolah Kurangnya koordinasi antara sekolah, pemerintah desa, dan orang tua 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> ATS kembali putus sekolah Menurunnya efektivitas program penarikan ATS Tidak tercapainya target indikator RPJMD 	Peserta didik potensial jenjang SMP Satuan pendidikan Dinas Pendidikan
5		Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) -> Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.11	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemutakhiran data Dapodik dan pendataan lapangan Lemahnya koordinasi antarinstansi (Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinsos, Bappeda) Tidak ada sistem integrasi data pendidikan berbasis wilayah 	Ekstern	C	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan program menjadi tidak tepat sasaran Kebijakan tidak berbasis data faktual Sulit memantau efektivitas penurunan ATS 	Peserta didik sasaran program kesetaraanL embaga pendidikan non formal Dinas Pendidikan
				Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.12	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Program antar-OPD belum sinergis (Dinas Pendidikan, Sosial, PPPA, Tenaga Kerja, dan Desa) Tidak ada forum koordinasi rutin Belum ada regulasi daerah khusus percepatan penurunan ATS 			<ul style="list-style-type: none"> Upaya penanganan ATS berjalan parsial dan tumpang tindih Rendahnya efektivitas program lintas sektor 	Peserta didik sasaran program kesetaraanL embaga pendidikan non formal Dinas Pendidikan
				Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.13	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pendampingan berkelanjutan bagi anak yang telah kembali ke sekolah Kurangnya koordinasi antara sekolah, pemerintah desa, dan orang tua 			<ul style="list-style-type: none"> ATS kembali putus sekolah Menurunnya efektivitas program penarikan ATS Tidak tercapainya target indikator RPJMD 	Peserta didik sasaran program kesetaraanL embaga pendidikan non formal Dinas Pendidikan
6		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi Minimal B	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.14	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah Kurangnya supervisi dari pengawas Keterbatasan kemampuan kepala sekolah dalam manajemen berbasis 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> Nilai akreditasi sekolah rendah-Sekolah tidak mencapai minimal peringkat B Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah 	Satuan PAUD Peserta didik usia dini Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.15	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana sesuai SNP - Ketimpangan antara sekolah di wilayah kota dan terpencil - Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana yang ada	Internal	C	- Nilai akreditasi menurun - Sekolah sulit mencapai standar akreditasi B - Kualitas pembelajaran terganggu	Satuan PAUD Peserta didik usia dini Dinas Pendidikan
				Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.16	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rasio guru tidak seimbang- Kurangnya guru bersertifikat pendidik- Minimnya pelatihan peningkatan kompetensi guru	Internal	C	- Penilaian akreditasi menurun pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan - Kualitas pembelajaran tidak meningkat - Sekolah sulit mencapai nilai B	Satuan PAUD Peserta didik usia dini Dinas Pendidikan
				Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.17	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Sekolah tidak rutin memperbarui dokumen administrasi - Lemahnya sistem dokumentasi dan pengarsipan - Kurangnya bimbingan teknis tentang penyusunan eviden akreditasi	Internal	C	- Penilaian akreditasi menjadi rendah - Sekolah gagal naik peringkat akreditasi - Data capaian mutu tidak valid	Satuan PAUD Peserta didik usia dini Dinas Pendidikan
7		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang terakreditasi Minimal B	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.18	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah - Kurangnya supervisi dari pengawas Keterbatasan kemampuan kepala sekolah dalam manajemen berbasis mutu	Internal	C	- Nilai akreditasi sekolah rendah- Sekolah tidak mencapai minimal peringkat B - Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah	Satuan Sekolah dasar Peserta didik Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.19	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana sesuai SNP - Ketimpangan antara sekolah di wilayah kota dan terpencil - Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana yang ada	Internal	C	- Nilai akreditasi menurun - Sekolah sulit mencapai standar akreditasi B - Kualitas pembelajaran terganggu	Satuan Sekolah dasar Peserta didik Dinas Pendidikan
				Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.20	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	Rasio guru tidak seimbang- Kurangnya guru bersertifikat pendidik- Minimnya pelatihan peningkatan kompetensi guru	Internal	C	- Penilaian akreditasi menurun pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan - Kualitas pembelajaran tidak meningkat - Sekolah sulit mencapai nilai B	Satuan Sekolah dasar Peserta didik Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.21	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Sekolah tidak rutin memperbarui dokumen administrasi - Lemahnya sistem dokumentasi dan pengarsipan - Kurangnya bimbingan teknis tentang penyusunan eviden akreditasi	Internal	C	- Penilaian akreditasi menjadi rendah - Sekolah gagal naik peringkat akreditasi - Data capaian mutu tidak valid	Satuan Sekolah dasar Peserta didik Dinas Pendidikan
8		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Minimal B	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.22	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah - Kurangnya supervisi dari pengawas Keterbatasan kemampuan kepala sekolah dalam manajemen berbasis mutu	Internal	C	- Nilai akreditasi sekolah rendah- Sekolah tidak mencapai minimal peringkat B - Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah	Satuan Sekolah Menengah Pertama Peserta didik Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.23	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana sesuai SNP - Ketimpangan antara sekolah di wilayah kota dan terpencil - Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana yang ada	Internal	C	- Nilai akreditasi menurun - Sekolah sulit mencapai standar akreditasi B - Kualitas pembelajaran terganggu	Satuan Sekolah Menengah Pertama Peserta didik Dinas Pendidikan
				Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.24	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Rasio guru tidak seimbang- Kurangnya guru bersertifikat pendidik- Minimnya pelatihan peningkatan kompetensi guru	Internal	C	- Penilaian akreditasi menurun pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan - Kualitas pembelajaran tidak meningkat - Sekolah sulit mencapai nilai B	Satuan Sekolah Menengah Pertama Peserta didik Dinas Pendidikan
				Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.25	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Sekolah tidak rutin memperbarui dokumen administrasi - Lemahnya sistem dokumentasi dan pengarsipan - Kurangnya bimbingan teknis tentang penyusunan eviden akreditasi	Internal	C	- Penilaian akreditasi menjadi rendah - Sekolah gagal naik peringkat akreditasi - Data capaian mutu tidak valid	Satuan Sekolah Menengah Pertama Peserta didik Dinas Pendidikan
9		Persentase Satuan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan yang terakreditasi Minimal B	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.26	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah - Kurangnya supervisi dari pengawas Keterbatasan kemampuan kepala sekolah dalam manajemen berbasis mutu	Internal	C	- Nilai akreditasi sekolah rendah- Sekolah tidak mencapai minimal peringkat B - Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah	Lembaga pendidikan kesetaraan Peserta didik program nonformal Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.27	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana sesuai SNP - Ketimpangan antara sekolah di wilayah kota dan terpencil - Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana yang ada	Internal	C	- Nilai akreditasi menurun - Sekolah sulit mencapai standar akreditasi B - Kualitas pembelajaran terganggu	Lembaga pendidikan kesetaraan Peserta didik program nonformal Dinas Pendidikan
				Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.28	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rasio guru tidak seimbang- Kurangnya guru bersertifikat pendidik- Minimnya pelatihan peningkatan kompetensi guru	Internal	C	- Penilaian akreditasi menurun pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan - Kualitas pembelajaran tidak meningkat - Sekolah sulit mencapai nilai B	Lembaga pendidikan kesetaraan Peserta didik program nonformal Dinas Pendidikan
				Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.29	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Sekolah tidak rutin memperbarui dokumen administrasi - Lemahnya sistem dokumentasi dan pengarsipan - Kurangnya bimbingan teknis tentang penyusunan eviden akreditasi	Internal	C	- Penilaian akreditasi menjadi rendah - Sekolah gagal naik peringkat akreditasi - Data capaian mutu tidak valid	Lembaga pendidikan kesetaraan Peserta didik program nonformal Dinas Pendidikan
10		Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kualitas pembelajaran literasi belum optimal	ROO.22.01.01.30	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Guru belum menguasai metode pembelajaran literasi berbasis teks dan konteks- Pembelajaran masih bersifat hafalan dan monoton- Minimnya pelatihan guru literasi	Internal	C	- Pembelajaran tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis- Hasil asesmen literasi rendah	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana dan sumber belajar literasi	ROO.22.01.01.31	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Koleksi buku perpustakaan tidak memadai- Tidak tersedia bahan bacaan digital- Minimnya fasilitas ruang baca	Internal	C	- Siswa kurang terpapar bahan bacaan- Motivasi membaca menurun- Hasil literasi tidak optimal	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya dukungan keluarga terhadap pengembangan literasi	ROO.22.01.01.32	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya literasi- Tidak ada kebiasaan membaca bersama di rumah- Keterbatasan akses buku di lingkungan keluarga	Internal	C	- Literasi anak tidak berkembang di luar sekolah- Timpang hasil belajar antar peserta didik	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya integrasi kebijakan literasi antar jenjang dan antar instansi	ROO.22.01.01.33	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Program literasi berjalan sektoral dan tidak sinkron- Tidak ada indikator literasi dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS)- Lemahnya koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan	Internal	C	- Program literasi tidak berkelanjutan- Hasil peningkatan literasi sulit diukur	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Faktor sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik	ROO.22.01.01.34	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Siswa dari keluarga kurang mampu memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan dan internet- Tingkat kehadiran siswa rendah akibat kondisi ekonomi- Dukungan belajar di rumah terbatas	Internal	C	- Ketimpangan capaian literasi antarwilayah dan kelompok sosial- Nilai rata-rata literasi daerah menurun	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
11		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kualitas pembelajaran numerasi belum optimal	ROO.22.01.01.35	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Guru belum menguasai pendekatan pembelajaran numerasi berbasis pemecahan masalah- Kurangnya inovasi pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning)- Minimnya media pembelajaran numerasi	Internal	C	- Siswa pasif dan tidak memahami penerapan konsep- Rendahnya kemampuan berpikir logis dan analitis siswa	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana dan sumber belajar numerasi	ROO.22.01.01.36	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Fasilitas laboratorium matematika tidak tersedia- Ketersediaan alat peraga dan media numerasi terbatas- Tidak ada bahan ajar numerasi digital	Internal	C	- Siswa sulit memahami konsep abstrak matematika- Pembelajaran kurang menarik- Capaian numerasi tidak optimal	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap numerasi	ROO.22.01.01.37	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Anggapan bahwa matematika adalah pelajaran sulit- Metode pembelajaran kurang menarik- Kurangnya apresiasi terhadap prestasi numerasi	Internal	C	- Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan numerasi rendah- Capaian hasil belajar menurun	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Dukungan keluarga dan lingkungan terhadap numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.38	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Orang tua kurang memahami pentingnya numerasi- Kurangnya aktivitas berhitung di rumah- Minimnya komunikasi guru-orang tua tentang capaian numerasi	Internal	C	- Perkembangan kemampuan numerasi tidak berkelanjutan di luar sekolah- Perbedaan capaian antar siswa meningkat	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kebijakan sekolah dan daerah belum fokus pada peningkatan numerasi	ROO.22.01.01.39	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Tidak ada target capaian numerasi dalam RKS/RKPD- Lemahnya koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan- Kurangnya data pemantauan hasil numerasi	Internal	C	- Program peningkatan numerasi tidak berkelanjutan- Rendahnya efektivitas intervensi kebijakan	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Faktor sosial ekonomi dan ketimpangan wilayah mempengaruhi kemampuan numerasi	ROO.22.01.01.40	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Akses sumber belajar rendah di daerah terpencil- Latar belakang ekonomi keluarga rendah- Dukungan belajar di rumah terbatas	Internal	C	- Ketimpangan capaian numerasi antar wilayah dan sekolah- Penurunan rata-rata numerasi daerah	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
12		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Perilaku peserta didik dipengaruhi lingkungan sosial negatif	ROO.22.01.01.41	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Lingkungan keluarga dan pergaulan tidak kondusif- Paparan media sosial yang tidak terkontrol- Kurangnya keteladanan di lingkungan sekitar	Internal	C	- Perilaku menyimpang meningkat- Rendahnya disiplin, tanggung jawab, dan empati peserta didik	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter	ROO.22.01.01.42	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Guru belum mengikuti pelatihan penguatan karakter- Pemahaman terhadap asesmen karakter masih rendah- Pembelajaran lebih fokus pada kognitif daripada afektif	Internal	C	- Penilaian karakter tidak optimal- Nilai rerata karakter tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif	ROO.22.01.01.43	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan rutin- Minimnya pembimbing atau sarana kegiatan- Tidak ada integrasi kegiatan karakter dengan kurikulum	Internal	C	- Kesempatan pengembangan karakter siswa terbatas- Siswa kurang disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter	ROO.22.01.01.44	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Komunikasi sekolah-orang tua belum intensif- Orang tua kurang memahami pentingnya pendidikan karakter- Aktivitas pembinaan di rumah tidak konsisten	Internal	C	- Pembentukan karakter anak tidak berkesinambungan- Penurunan hasil penilaian karakter di sekolah	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Sistem penilaian karakter belum terimplementasi secara baik	ROO.22.01.01.45	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Guru kesulitan menilai aspek sikap dan perilaku secara objektif- Tidak ada panduan penilaian karakter yang jelas- Data asesmen karakter tidak terdokumentasi	Internal	C	- Nilai karakter tidak valid dan tidak mencerminkan perilaku nyata- Kesulitan dalam pemantauan perkembangan karakter siswa	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya dukungan kebijakan dan monitoring dari Dinas Pendidikan	ROO.22.01.01.46	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Belum ada indikator karakter dalam evaluasi kinerja sekolah- Pembinaan sekolah lebih fokus pada aspek akademik- Tidak ada insentif bagi sekolah berprestasi di bidang karakter	Internal	C	- Program penguatan karakter tidak menjadi prioritas- Nilai rerata karakter tidak meningkat secara signifikan	Peserta didik sekolah dasar Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
13		Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kualitas pembelajaran literasi belum optimal	ROO.22.01.01.47	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Guru belum menguasai metode pembelajaran literasi berbasis teks dan konteks- Pembelajaran masih bersifat hafalan dan monoton- Minimnya pelatihan guru literasi	Internal	C	- Pembelajaran tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis- Hasil asesmen literasi rendah	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Keterbatasan sarana dan sumber belajar literasi	ROO.22.01.01.48	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Koleksi buku perpustakaan tidak memadai- Tidak tersedia bahan bacaan digital- Minimnya fasilitas ruang baca	Internal	C	- Siswa kurang terpapar bahan bacaan- Motivasi membaca menurun- Hasil literasi tidak optimal	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya dukungan keluarga terhadap pengembangan literasi	ROO.22.01.01.49	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya literasi- Tidak ada kebiasaan membaca bersama di rumah- Keterbatasan akses buku di lingkungan keluarga	Internal	C	- Literasi anak tidak berkembang di luar sekolah- Timpang hasil belajar antar peserta didik	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya integrasi kebijakan literasi antar jenjang dan antar instansi	ROO.22.01.01.50	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Program literasi berjalan sektoral dan tidak sinkron- Tidak ada indikator literasi dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS)- Lemahnya koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan	Internal	C	- Program literasi tidak berkelanjutan- Hasil peningkatan literasi sulit diukur	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Faktor sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik	ROO.22.01.01.51	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Siswa dari keluarga kurang mampu memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan dan internet- Tingkat kehadiran siswa rendah akibat kondisi ekonomi- Dukungan belajar di rumah terbatas	Internal	C	- Ketimpangan capaian literasi antarwilayah dan kelompok sosial- Nilai rata-rata literasi daerah menurun	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
14		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kualitas pembelajaran numerasi belum optimal	ROO.22.01.01.52	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Guru belum menguasai pendekatan pembelajaran numerasi berbasis pemecahan masalah- Kurangnya inovasi pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning)- Minimnya media pembelajaran numerasi	Internal	C	- Siswa pasif dan tidak memahami penerapan konsep- Rendahnya kemampuan berpikir logis dan analitis siswa	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana dan sumber belajar numerasi	ROO.22.01.01.53	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Fasilitas laboratorium matematika tidak tersedia- Ketersediaan alat peraga dan media numerasi terbatas- Tidak ada bahan ajar numerasi digital	Internal	C	- Siswa sulit memahami konsep abstrak matematika- Pembelajaran kurang menarik- Capaian numerasi tidak optimal	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap numerasi	ROO.22.0 1.01.54	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Anggapan bahwa matematika adalah pelajaran sulit- Metode pembelajaran kurang menarik- Kurangnya apresiasi terhadap prestasi numerasi	Internal	C	- Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan numerasi rendah- Capaian hasil belajar menurun	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Dukungan keluarga dan lingkungan terhadap numerasi masih rendah	ROO.22.0 1.01.55	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Orang tua kurang memahami pentingnya numerasi- Kurangnya aktivitas berhitung di rumah- Minimnya komunikasi guru-orang tua tentang capaian numerasi	Internal	C	- Perkembangan kemampuan numerasi tidak berkelanjutan di luar sekolah- Perbedaan capaian antar siswa meningkat	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kebijakan sekolah dan daerah belum fokus pada peningkatan numerasi	ROO.22.0 1.01.56	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Tidak ada target capaian numerasi dalam RKS/RKPD- Lemahnya koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan- Kurangnya data pemantauan hasil numerasi	Internal	C	- Program peningkatan numerasi tidak berkelanjutan- Rendahnya efektivitas intervensi kebijakan	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Faktor sosial ekonomi dan ketimpangan wilayah mempengaruhi kemampuan numerasi	ROO.22.0 1.01.57	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Akses sumber belajar rendah di daerah terpencil- Latar belakang ekonomi keluarga rendah- Dukungan belajar di rumah terbatas	Internal	C	- Ketimpangan capaian numerasi antar wilayah dan sekolah- Penurunan rata-rata numerasi daerah	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
15		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Perilaku peserta didik dipengaruhi lingkungan sosial negatif	ROO.22.0 1.01.58	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Lingkungan keluarga dan pergaulan tidak kondusif- Paparan media sosial yang tidak terkontrol- Kurangnya keteladanan di lingkungan sekitar	Internal	C	- Perilaku menyimpang meningkat- Rendahnya disiplin, tanggung jawab, dan empati peserta didik	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter	ROO.22.0 1.01.59	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Guru belum mengikuti pelatihan penguatan karakter- Pemahaman terhadap asesmen karakter masih rendah- Pembelajaran lebih fokus pada kognitif daripada afektif	Internal	C	- Penilaian karakter tidak optimal- Nilai rerata karakter tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif	ROO.22.0 1.01.60	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan rutin- Minimnya pembimbing atau sarana kegiatan- Tidak ada integrasi kegiatan karakter dengan kurikulum	Internal	C	- Kesempatan pengembangan karakter siswa terbatas- Siswa kurang disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Lemahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter	ROO.22.01.01.61	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Komunikasi sekolah-orang tua belum intensif-Orang tua kurang memahami pentingnya pendidikan karakter-Aktivitas pembinaan di rumah tidak konsisten	Internal	C	- Pembentukan karakter anak tidak berkesinambungan- Penurunan hasil penilaian karakter di sekolah	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Sistem penilaian karakter belum terimplementasi secara baik	ROO.22.01.01.62	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Guru kesulitan menilai aspek sikap dan perilaku secara objektif- Tidak ada panduan penilaian karakter yang jelas-Data asesmen karakter tidak terdokumentasi	Internal	C	- Nilai karakter tidak valid dan tidak mencerminkan perilaku nyata-Kesulitan dalam pemantauan perkembangan karakter siswa	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya dukungan kebijakan dan monitoring dari Dinas Pendidikan	ROO.22.01.01.63	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada indikator karakter dalam evaluasi kinerja sekolah-Pembinaan sekolah lebih fokus pada aspek akademik-Tidak ada insentif bagi sekolah berprestasi di bidang karakter	Internal	C	- Program penguatan karakter tidak menjadi prioritas- Nilai rerata karakter tidak meningkat secara signifikan	Peserta didik sekolah menengah pertama Guru Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
16	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki Sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.64	Kepala Seksi Sarpras SD	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	Internal	C	- Sarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidaknyamanan bagi peserta didik dan guru	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.65	Kepala Seksi Sarpras SD	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	Internal	C	- Kesalahan perencanaan kebutuhan sarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.66	Kepala Seksi Sarpras SD	- Tidak ada SOP pemeliharaan sarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	Internal	C	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.67	Kepala Seksi Sarpras SD	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata - Infrastruktur dasar (listrik, internet, air) belum memadai	Internal	C	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit mencapai SNP - Ketidakadilan akses pendidikan	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.68	Kepala Seksi Sarpras SD	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasi - Pengawasan internal lemah	Internal	C	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran - Hambatan dalam realisasi target indikator	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
17		Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.69	Kepala Seksi Sarpras SD	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	Internal	C	- Prasarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidaknyamanan bagi peserta didik dan guru	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.70	Kepala Seksi Sarpras SD	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	Internal	C	- Kesalahan perencanaan kebutuhan prasarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.71	Kepala Seksi Sarpras SD	- Tidak ada SOP pemeliharaan prasarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	Internal	C	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.72	Kepala Seksi Sarpras SD	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata - Infrastruktur dasar (listrik, internet, air) belum memadai	Internal	C	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit mencapai SNP - Ketidakadilan akses pendidikan	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.73	Kepala Seksi Sarpras SD	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasi - Pengawasan internal lemah	Internal	C	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran - Hambatan dalam realisasi target indikator	Satuan Pendidikan Peserta Didik Dinas Pendidikan
18		Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada Jenjang Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.74	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Pendataan tidak dilakukan secara rutin - Kurangnya koordinasi antara sekolah, desa, dan Dinas Pendidikan - Basis data kemiskinan tidak sinkron dengan Dapodik	Internal	C	- Siswa tidak mampu tidak mendapat bantuan - Program intervensi tidak tepat sasaran - Rendahnya efektivitas kebijakan afirmatif	Peserta didik dari keluarga tidak mampu Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.75	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Mekanisme seleksi penerima bantuan belum optimal - Koordinasi antar instansi lemah - Nilai bantuan tidak mencukupi kebutuhan belajar siswa	Internal	C	- Siswa tetap mengalami kesulitan ekonomi - Risiko putus sekolah meningkat - Kepercayaan publik terhadap program menurun	Peserta didik dari keluarga tidak mampu Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
				Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.76	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Tingkat pendidikan orang tua rendah - Anak dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga atau mencari nafkah - Kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan wajib 12 tahun	Internal	C	- Anak tidak mampu tidak disekolahkan - Tingkat kehadiran siswa rendah - Rendahnya angka partisipasi murni (APM)	Peserta didik dari keluarga tidak mampu Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.77	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal- Kondisi sarana rusak atau tidak layak- Guru enggan ditempatkan di daerah sulit	Internal	C	- Anak dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah - Ketimpangan akses pendidikan antar wilayah	Peserta didik dari keluarga tidak mampu Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
				Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.78	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Tidak ada koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Bappeda, dll.) - Program bantuan bersifat sementara - Belum ada evaluasi efektivitas program	Internal	C	- Penurunan capaian persentase siswa tidak mampu bersekolah - Program tidak berdampak jangka panjang	Peserta didik dari keluarga tidak mampu Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
				Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.79	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Pendapatan keluarga menurun tajam - Fokus keluarga pada kebutuhan dasar non pendidikan - Peningkatan jumlah anak tidak mampu baru	Internal	C	- Kenaikan angka anak tidak sekolah dari keluarga miskin - Gangguan keberlanjutan belajar	Peserta didik dari keluarga tidak mampu Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
19		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang ditingkatkan kompetensinya	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.80	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	- Guru kesulitan mengatur waktu karena beban kerja tinggi - Kurangnya motivasi mengikuti pelatihan - Sosialisasi kegiatan peningkatan kompetensi belum optimal	Internal	C	- Capaian indikator tidak terpenuhi - Kompetensi guru stagnan - Kualitas pembelajaran menurun	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.81	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	- Materi tidak kontekstual dengan kebutuhan lapangan - Narasumber tidak sesuai bidang - Tidak ada evaluasi hasil pelatihan	Internal	C	- Pelatihan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi nyata - Efektivitas program rendah	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.82	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Jumlah pengawas dan widyaiswara terbatas - Distribusi pengawas tidak merata - Pembinaan jarang dilakukan secara tatap muka	Internal	C	- Guru kekurangan pendampingan profesional - Hasil pelatihan tidak berkelanjutan	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.83	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Literasi digital guru masih rendah- Fasilitas TIK di sekolah belum memadai- Tidak ada pendampingan penggunaan aplikasi pembelajaran	Internal	C	- Pembelajaran kurang inovatif dan interaktif - Keteringgalan	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.84	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Data pelatihan guru tidak terdokumentasi dengan baik - Belum ada sistem pelaporan capaian pelatihan - Tidak ada indikator kinerja yang terukur	Internal	C	- Kesulitan menilai capaian indikator - Pengambilan keputusan tidak berbasis data	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.85	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Kepala sekolah belum memahami perannya sebagai supervisor akademik - Tidak ada budaya belajar di lingkungan sekolah - Pembinaan lebih fokus pada administrasi	Internal	C	- Guru kurang termotivasi untuk berkembang - Pelatihan tidak diikuti dengan praktik nyata	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
20		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.86	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi	Internal	C	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun	Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.87	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidapatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.88	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.89	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidakesesuaian laporan dengan transaksi riil	Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.90	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
21		Nilai Kebhinekaan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.91	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi sekolah.	Internal	C	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakesesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.92	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.93	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.94	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksiesuaian laporan dengan transaksi riil	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.95	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.96	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan kepada komite sekolah - Lemahnya pengawasan masyarakat	Internal	C	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.97	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan lemah - Evaluasi pelaporan tidak dilakukan rutin	Internal	C	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau tidak lengkap	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
22		Nilai Iklim Inklusifitas	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.98	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap prinsip inklusifitas	Internal	C	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan rasa aman dan nyaman belajar	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.99	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan diferensiasi pembelajaran	Internal	C	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan belajar yang setara	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.100	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar) - Terbatasnya anggaran untuk sarana inklusi	Internal	C	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara siswa reguler dan ABK	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.101	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus kekerasan/perundungan - Minimnya pendidikan karakter dan empati	Internal	C	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidakyamanan bagi korban	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.102	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus	Internal	C	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.103	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek akademik saja	Internal	C	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan tindak lanjut	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.104	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif - Fokus lebih pada target akademik dan administratif	Internal	C	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
23		Nilai Iklim Keamanan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.105	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	Internal	C	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.106	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial			- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.107	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)			- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.108	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah dilatih evakuasi bencana - Kurangnya koordinasi dengan BPBD			- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah - Gangguan proses pembelajaran	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.0 1.01.109	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas			- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.0 1.01.110	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua - Tidak tersedia layanan konseling memadai			Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.0 1.01.111	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia			- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
24		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.0 1.01.112	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Pembelajaran bahasa dan literasi belum efektif - Minimnya pembiasaan membaca di sekolah dan rumah - Kurangnya bahan bacaan yang menarik dan sesuai usia	Internal	C	- Nilai literasi tidak meningkat - Sekolah gagal mencapai kategori "Nilai Literasi Baik"	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi masih terbatas	ROO.22.0 1.01.113	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Guru belum memahami strategi pengajaran literasi berbasis teks - Minimnya pelatihan tentang literasi dasar dan berpikir kritis	Internal	C	- Pembelajaran tidak menumbuhkan keterampilan membaca dan memahami makna	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung literasi di sekolah	ROO.22.0 1.01.114	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Perpustakaan sekolah tidak aktif atau koleksi terbatas - Tidak tersedia ruang baca atau pojok literasi - Keterbatasan anggaran pengadaan buku	Internal	C	- Rendahnya minat baca siswa - Kegiatan literasi tidak berkelanjutan	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat	ROO.22.0 1.01.115	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Orang tua kurang terlibat dalam pembiasaan membaca - Tidak ada sinergi program literasi antara sekolah dan masyarakat	Internal	C	- Literasi siswa hanya tumbuh di lingkungan sekolah - Kemampuan membaca kritis rendah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum optimalnya sistem penilaian dan monitoring capaian literasi	ROO.22.0 1.01.116	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Tidak adanya instrumen evaluasi literasi yang baku - Sekolah tidak rutin mengukur perkembangan kemampuan literasi	Internal	C	- Data capaian literasi tidak akurat - Kebijakan peningkatan literasi sulit disusun	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca dan menulis	ROO.22.0 1.01.117	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Pembelajaran terlalu berorientasi pada ujian - Aktivitas literasi tidak menarik bagi siswa	Internal	C	- Kemampuan berpikir kritis dan reflektif rendah - Nilai literasi stagnan	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
25		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.118	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Pembelajaran matematika berfokus pada hafalan rumus, bukan pemahaman konsep - Keterbatasan media dan alat peraga numerasi - Kurangnya pembiasaan berpikir logis dalam pelajaran non-matematika	Internal	C	- Nilai numerasi rendah pada asesmen nasional - Sekolah gagal mencapai kategori "Nilai Numerasi Baik"	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran numerasi masih terbatas	ROO.22.01.01.119	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Kurangnya pelatihan dan pendampingan guru dalam strategi numerasi - Guru belum memahami pendekatan numerasi lintas kurikulum	Internal	C	Pembelajaran tidak menarik dan tidak menumbuhkan pemikiran matematis siswa	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana dan bahan ajar numerasi yang mendukung	ROO.22.01.01.120	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Keterbatasan buku, lembar kerja, atau alat bantu numerasi - Tidak tersedia media digital interaktif untuk latihan numerasi	Internal	C	- Aktivitas belajar kurang variatif - Siswa kesulitan memahami konsep abstrak	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika	ROO.22.01.01.121	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Anggapan bahwa matematika sulit dan menakutkan - Kurangnya metode pembelajaran yang menyenangkan - Minimnya apresiasi terhadap prestasi numerasi	Internal	C	- Sikap negatif terhadap pelajaran matematika - Penurunan hasil belajar numerasi	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Dukungan keluarga terhadap pembelajaran numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.122	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Orang tua kurang memahami pentingnya numerasi dalam kehidupan sehari-hari - Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan belajar anak	Internal	C	- Tidak terbentuk budaya belajar numerasi di rumah - Ketimpangan capaian numerasi antar siswa	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum optimalnya sistem asesmen numerasi di sekolah	ROO.22.01.01.123	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Sekolah belum memiliki instrumen evaluasi numerasi non-tes - Hasil asesmen tidak digunakan untuk perbaikan pembelajaran	Internal	C	- Data capaian numerasi tidak akurat - Kebijakan peningkatan numerasi tidak tepat sasaran	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
26		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya jumlah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik	ROO.22.01.01.124	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Pembelajaran belum berbasis diferensiasi dan pengayaan- Kurangnya program pembinaan peserta didik berpotensi unggul- Minimnya dukungan guru dalam pembimbingan lomba akademik	Internal	C	- Target indikator prestasi akademik tidak tercapai - Rendahnya citra mutu sekolah di masyarakat	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non-akademik	ROO.22.01.01.125	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Jadwal kegiatan ekstrakurikuler tidak teratur - Kegiatan non-akademik tidak menarik atau tidak sesuai minat siswa - Keterbatasan sarana kegiatan seni, olahraga, dan kepramukaan	Internal	C	- Potensi siswa tidak berkembang optimal - Penurunan motivasi dan kreativitas peserta didik	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi siswa	ROO.22.01.01.126	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua - Orang tua lebih fokus pada capaian akademik formal daripada pengembangan bakat	Internal	C	Siswa tidak mendapat dukungan moral dan material untuk mengikuti lomba atau kegiatan prestasi	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan kegiatan prestasi	ROO.22.01.01.127	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Anggaran sekolah belum mengalokasikan dana untuk pembinaan prestasi - Tidak ada sponsor atau dukungan mitra eksternal	Internal	C	- Tidak semua siswa berbakat mendapat kesempatan pembinaan - Sekolah sulit mengirim peserta ke lomba luar daerah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Guru pembina dan pelatih belum memiliki kompetensi khusus	ROO.22.01.01.128	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Tidak ada pelatihan bagi guru pembina lomba - Guru tidak memiliki pengalaman di bidang non-akademik tertentu	Internal	C	- Pembinaan tidak efektif - Prestasi siswa tidak berkembang signifikan	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem seleksi dan pemantauan prestasi siswa yang berkelanjutan	ROO.22.01.01.129	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Data prestasi siswa tidak terdokumentasi - Tidak ada indikator penilaian bakat dan minat secara rutin	Internal	C	- Kesempatan pengembangan bakat tidak merata - Siswa berpotensi tinggi tidak terdeteksi	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakeimbangan fokus antara prestasi akademik dan non-akademik	ROO.22.01.01.130	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Sekolah lebih menekankan aspek akademik dalam evaluasi kinerja - Kurangnya pemahaman tentang pentingnya prestasi non-akademik untuk karakter siswa	Internal	C	- Pengembangan karakter, kreativitas, dan kepemimpinan siswa terhambat	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
27		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya internalisasi nilai karakter di lingkungan sekolah	ROO.22.01.01.131	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Pembelajaran nilai karakter tidak terintegrasi dalam kurikulum - Guru belum memahami strategi pembelajaran berbasis karakter - Kurangnya keteladanan di lingkungan sekolah	Internal	C	- Penurunan sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati siswa - Rendahnya hasil penilaian karakter sekolah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	ROO.22.01.01.132	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Minim komunikasi antara sekolah dan orang tua - Pengawasan perilaku anak di rumah lemah - Lingkungan sosial kurang mendukung nilai-nilai positif	Internal	C	- Ketidakkonsisten nilai antara di sekolah dan di rumah - Rendahnya efektivitas pendidikan karakter secara menyeluruh	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakterpaduan antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter	ROO.22.01.01.133	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Fokus guru pada capaian akademik - Kegiatan pembiasaan positif tidak terstruktur - Evaluasi karakter tidak dilakukan secara konsisten	Internal	C	- Pendidikan karakter hanya bersifat formalitas - Nilai karakter siswa tidak meningkat signifikan	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya kapasitas guru dalam menilai dan menumbuhkan karakter peserta didik	ROO.22.01.01.134	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Belum ada pelatihan penilaian sikap dan karakter - Guru belum mampu memberikan umpan balik pembentukan karakter	Internal	C	- Hasil penilaian karakter tidak objektif atau tidak akurat - Penurunan kualitas pembinaan karakter di sekolah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter	ROO.22.01.01.135	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Kegiatan ekstrakurikuler belum rutin atau tidak menarik - Fasilitas dan pembina terbatas	Internal	C	- Siswa kurang terlatih dalam kerja sama, tanggung jawab, dan disiplin - Tidak tercapai indikator karakter unggul	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya budaya organisasi sekolah yang mendukung karakter baik	ROO.22.01.01.136	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	- Kepala sekolah belum berperan aktif sebagai role model - Tidak ada sistem penghargaan dan sanksi yang adil	Internal	C	- Nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab tidak tertanam kuat - Menurunnya kredibilitas sekolah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
28	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.137	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	Internal	C	- Sarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidaknyamanan bagi peserta didik dan guru	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.138	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	Internal	C	- Kesalahan perencanaan kebutuhan sarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.139	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Tidak ada SOP pemeliharaan sarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	Internal	C	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.0 1.01.140	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata - Infrastruktur dasar (listrik, internet, air) belum memadai	Internal	C	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit mencapai SNP - Ketidakadilan akses pendidikan	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.0 1.01.141	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasi - Pengawasan internal lemah	Internal	C	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran - Hambatan dalam realisasi target indikator	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
29		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.0 1.01.142	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	Internal	C	- Prasarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidakyamanan bagi peserta didik dan guru	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.0 1.01.143	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	Internal	C	- Kesalahan perencanaan kebutuhan prasarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.0 1.01.144	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Tidak ada SOP pemeliharaan prasarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	Internal	C	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.0 1.01.145	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata - Infrastruktur dasar (listrik, internet, air) belum memadai	Internal	C	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit mencapai SNP - Ketidakadilan akses pendidikan	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.0 1.01.146	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasi - Pengawasan internal lemah	Internal	C	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran - Hambatan dalam realisasi target indikator	Peserta Didik Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
30		Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.147	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Pendataan tidak dilakukan secara rutin - Kurangnya koordinasi antara sekolah, desa, dan Dinas Pendidikan - Basis data kemiskinan tidak sinkron dengan Dapodik	Internal	C	- Siswa tidak mampu tidak mendapat bantuan - Program intervensi tidak tepat sasaran - Rendahnya efektivitas kebijakan afirmatif	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.148	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Mekanisme seleksi penerima bantuan belum optimal - Koordinasi antar instansi lemah - Nilai bantuan tidak mencukupi kebutuhan belajar siswa	Internal	C	- Siswa tetap mengalami kesulitan ekonomi - Risiko putus sekolah meningkat - Kepercayaan publik terhadap program menurun	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.149	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Tingkat pendidikan orang tua rendah - Anak dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga atau mencari nafkah - Kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan wajib 12 tahun	Internal	C	- Anak tidak mampu tidak disekolahkan - Tingkat kehadiran siswa rendah - Rendahnya angka partisipasi murni (APM)	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.150	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal- Kondisi sarana rusak atau tidak layak- Guru enggan ditempatkan di daerah sulit	Internal	C	- Anak dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah - Ketimpangan akses pendidikan antar wilayah	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.151	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Tidak ada koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Bappeda, dll.) - Program bantuan bersifat sementara - Belum ada evaluasi efektivitas program	Internal	C	- Penurunan capaian persentase siswa tidak mampu bersekolah - Program tidak berdampak jangka panjang	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.152	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Pendapatan keluarga menurun tajam - Fokus keluarga pada kebutuhan dasar non pendidikan - Peningkatan jumlah anak tidak mampu baru	Internal	C	- Kenaikan angka anak tidak sekolah dari keluarga miskin - Gangguan keberlanjutan belajar	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
31		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.153	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	- Guru kesulitan mengatur waktu karena beban kerja tinggi - Kurangnya motivasi mengikuti pelatihan - Sosialisasi kegiatan peningkatan kompetensi belum optimal	Internal	C	- Capaian indikator tidak terpenuhi - Kompetensi guru stagnan - Kualitas pembelajaran menurun	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.0 1.01.154	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Mengah Pertama	- Materi tidak kontekstual dengan kebutuhan lapangan - Narasumber tidak sesuai bidang - Tidak ada evaluasi hasil pelatihan	Internal	C	- Pelatihan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi nyata - Efektivitas program rendah	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.0 1.01.155	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Mengah Pertama	- Jumlah pengawas dan widyaiswara terbatas - Distribusi pengawas tidak merata - Pembinaan jarang dilakukan secara tatap muka	Internal	C	- Guru kekurangan pendampingan profesional - Hasil pelatihan tidak berkelanjutan	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.0 1.01.156	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Mengah Pertama	- Literasi digital guru masih rendah- Fasilitas TIK di sekolah belum memadai- Tidak ada pendampingan penggunaan aplikasi pembelajaran	Internal	C	- Pembelajaran kurang inovatif dan interaktif - Keteringgalan	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.0 1.01.157	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Mengah Pertama	- Data pelatihan guru tidak terdokumentasi dengan baik - Belum ada sistem pelaporan capaian pelatihan - Tidak ada indikator kinerja yang terukur	Internal	C	- Kesulitan menilai capaian indikator - Pengambilan keputusan tidak berbasis data	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
				Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.0 1.01.158	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Mengah Pertama	- Kepala sekolah belum memahami perannya sebagai supervisor akademik - Tidak ada budaya belajar di lingkungan sekolah - Pembinaan lebih fokus pada administrasi	Internal	C	- Guru kurang termotivasi untuk berkembang - Pelatihan tidak diikuti dengan praktik nyata	PTK Peserta Didik Dinas Pendidikan
32		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.0 1.01.159	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi	Internal	C	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan
				Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.0 1.01.160	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.161	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.162	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidakesesuaian laporan dengan transaksi riil	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.163	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan
33		Nilai Kebhinekaan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.164	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi sekolah.	Internal	C	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakesesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.165	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.166	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.0 1.01.167	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksiesuaian laporan dengan transaksi riil	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.0 1.01.168	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.0 1.01.169	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan kepada komite sekolah - Lemahnya pengawasan masyarakat	Internal	C	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.0 1.01.170	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan lemah - Evaluasi pelaporan tidak dilakukan rutin	Internal	C	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau tidak lengkap	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
34		Nilai Iklim Inklusifitas	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.0 1.01.171	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap prinsip inklusifitas	Internal	C	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan rasa aman dan nyaman belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.0 1.01.172	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan diferensiasi pembelajaran	Internal	C	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan belajar yang setara	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.0 1.01.173	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar) - Terbatasnya anggaran untuk sarana inklusi	Internal	C	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara siswa reguler dan ABK	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.174	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus kekerasan/perundungan - Minimnya pendidikan karakter dan empati	Internal	C	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidakyamanan bagi korban	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.175	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus	Internal	C	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.176	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek akademik saja	Internal	C	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan tindak lanjut	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.177	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif - Fokus lebih pada target akademik dan administratif	Internal	C	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
35		Nilai Iklim Keamanan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.178	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	Internal	C	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.179	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial	Internal	C	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.180	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)	Internal	C	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.181	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah dilatih evakuasi bencana - Kurangnya koordinasi dengan BPBD	Internal	C	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah - Gangguan proses pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.0 1.01.182	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas	Internal	C	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.0 1.01.183	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua - Tidak tersedia layanan konseling memadai	Internal	C	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.0 1.01.184	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia	Internal	C	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
36		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.0 1.01.185	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Pembelajaran bahasa dan literasi belum efektif - Minimnya pembiasaan membaca di sekolah dan rumah - Kurangnya bahan bacaan yang menarik dan sesuai usia	Internal	C	- Nilai literasi tidak meningkat - Sekolah gagal mencapai kategori "Nilai Literasi Baik"	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi masih terbatas	ROO.22.0 1.01.186	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Guru belum memahami strategi pengajaran literasi berbasis teks - Minimnya pelatihan tentang literasi dasar dan berpikir kritis	Internal	C	- Pembelajaran tidak menumbuhkan keterampilan membaca dan memahami makna	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung literasi di sekolah	ROO.22.0 1.01.187	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Perpustakaan sekolah tidak aktif atau koleksi terbatas - Tidak tersedia ruang baca atau pojok literasi - Keterbatasan anggaran pengadaan buku	Internal	C	- Rendahnya minat baca siswa - Kegiatan literasi tidak berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat	ROO.22.0 1.01.188	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Orang tua kurang terlibat dalam pembiasaan membaca - Tidak ada sinergi program literasi antara sekolah dan masyarakat	Internal	C	- Literasi siswa hanya tumbuh di lingkungan sekolah - Kemampuan membaca kritis rendah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum optimalnya sistem penilaian dan monitoring capaian literasi	ROO.22.0 1.01.189	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Tidak adanya instrumen evaluasi literasi yang baku - Sekolah tidak rutin mengukur perkembangan kemampuan literasi	Internal	C	- Data capaian literasi tidak akurat - Kebijakan peningkatan literasi sulit disusun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca dan menulis	ROO.22.0 1.01.190	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Pembelajaran terlalu berorientasi pada ujian - Aktivitas literasi tidak menarik bagi siswa	Internal	C	- Kemampuan berpikir kritis dan reflektif rendah - Nilai literasi stagnan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
37		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.191	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Pembelajaran matematika berfokus pada hafalan rumus, bukan pemahaman konsep - Keterbatasan media dan alat peraga numerasi - Kurangnya pembiasaan berpikir logis dalam pelajaran non-matematika	Internal	C	- Nilai numerasi rendah pada asesmen nasional - Sekolah gagal mencapai kategori "Nilai Numerasi Baik"	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran numerasi masih terbatas	ROO.22.01.01.192	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pelatihan dan pendampingan guru dalam strategi numerasi - Guru belum memahami pendekatan numerasi lintas kurikulum	Internal	C	Pembelajaran tidak menarik dan tidak menumbuhkan pemikiran matematis siswa	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana dan bahan ajar numerasi yang mendukung	ROO.22.01.01.193	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Keterbatasan buku, lembar kerja, atau alat bantu numerasi - Tidak tersedia media digital interaktif untuk latihan numerasi	Internal	C	- Aktivitas belajar kurang variatif - Siswa kesulitan memahami konsep abstrak	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika	ROO.22.01.01.194	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Anggapan bahwa matematika sulit dan menakutkan - Kurangnya metode pembelajaran yang menyenangkan - Minimnya apresiasi terhadap prestasi numerasi	Internal	C	- Sikap negatif terhadap pelajaran matematika - Penurunan hasil belajar numerasi	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Dukungan keluarga terhadap pembelajaran numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.195	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Orang tua kurang memahami pentingnya numerasi dalam kehidupan sehari-hari - Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan belajar anak	Internal	C	- Tidak terbentuk budaya belajar numerasi di rumah - Ketimpangan capaian numerasi antar siswa	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum optimalnya sistem asesmen numerasi di sekolah	ROO.22.01.01.196	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Sekolah belum memiliki instrumen evaluasi numerasi non-tes - Hasil asesmen tidak digunakan untuk perbaikan pembelajaran	Internal	C	- Data capaian numerasi tidak akurat - Kebijakan peningkatan numerasi tidak tepat sasaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
38		Persentase Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya jumlah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik	ROO.22.01.01.197	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Pembelajaran belum berbasis diferensiasi dan pengayaan- Kurangnya program pembinaan peserta didik berpotensi unggul- Minimnya dukungan guru dalam pembimbingan lomba akademik	Internal	C	- Target indikator prestasi akademik tidak tercapai - Rendahnya citra mutu sekolah di masyarakat	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non-akademik	ROO.22.0 1.01.198	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Jadwal kegiatan ekstrakurikuler tidak teratur - Kegiatan non-akademik tidak menarik atau tidak sesuai minat siswa - Keterbatasan sarana kegiatan seni, olahraga, dan kepramukaan	Internal	C	- Potensi siswa tidak berkembang optimal - Penurunan motivasi dan kreativitas peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi siswa	ROO.22.0 1.01.199	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua - Orang tua lebih fokus pada capaian akademik formal daripada pengembangan bakat	Internal	C	Siswa tidak mendapat dukungan moral dan material untuk mengikuti lomba atau kegiatan prestasi	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan kegiatan prestasi	ROO.22.0 1.01.200	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Anggaran sekolah belum mengalokasikan dana untuk pembinaan prestasi - Tidak ada sponsor atau dukungan mitra eksternal	Internal	C	- Tidak semua siswa berbakat mendapat kesempatan pembinaan - Sekolah sulit mengirim peserta ke lomba luar daerah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Guru pembina dan pelatih belum memiliki kompetensi khusus	ROO.22.0 1.01.201	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Tidak ada pelatihan bagi guru pembina lomba - Guru tidak memiliki pengalaman di bidang non-akademik tertentu	Internal	C	- Pembinaan tidak efektif - Prestasi siswa tidak berkembang signifikan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem seleksi dan pemantauan prestasi siswa yang berkelanjutan	ROO.22.0 1.01.202	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Data prestasi siswa tidak terdokumentasi - Tidak ada indikator penilaian bakat dan minat secara rutin	Internal	C	- Kesempatan pengembangan bakat tidak merata - Siswa berpotensi tinggi tidak terdeteksi	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakseimbangan fokus antara prestasi akademik dan non-akademik	ROO.22.0 1.01.203	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Sekolah lebih menekankan aspek akademik dalam evaluasi kinerja - Kurangnya pemahaman tentang pentingnya prestasi non-akademik untuk karakter siswa	Internal	C	- Pengembangan karakter, kreativitas, dan kepemimpinan siswa terhambat	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
39		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya internalisasi nilai karakter di lingkungan sekolah	ROO.22.0 1.01.204	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Pembelajaran nilai karakter tidak terintegrasi dalam kurikulum - Guru belum memahami strategi pembelajaran berbasis karakter - Kurangnya keteladanan di lingkungan sekolah	Internal	C	- Penurunan sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati siswa - Rendahnya hasil penilaian karakter sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	ROO.22.01.01.205	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Minim komunikasi antara sekolah dan orang tua - Pengawasan perilaku anak di rumah lemah - Lingkungan sosial kurang mendukung nilai-nilai positif			- Ketidakkonsisten nilai antara di sekolah dan di rumah - Rendahnya efektivitas pendidikan karakter secara menyeluruh	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakterpaduan antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter	ROO.22.01.01.206	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Fokus guru pada capaian akademik - Kegiatan pembiasaan positif tidak terstruktur - Evaluasi karakter tidak dilakukan secara konsisten			- Pendidikan karakter hanya bersifat formalitas - Nilai karakter siswa tidak meningkat signifikan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya kapasitas guru dalam menilai dan menumbuhkan karakter peserta didik	ROO.22.01.01.207	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada pelatihan penilaian sikap dan karakter - Guru belum mampu memberikan umpan balik pembentukan karakter			- Hasil penilaian karakter tidak objektif atau tidak akurat - Penurunan kualitas pembinaan karakter di sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter	ROO.22.01.01.208	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Kegiatan ekstrakurikuler belum rutin atau tidak menarik - Fasilitas dan pembina terbatas			- Siswa kurang terlatih dalam kerja sama, tanggung jawab, dan disiplin - Tidak tercapai indikator karakter unggul	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya budaya organisasi sekolah yang mendukung karakter baik	ROO.22.01.01.209	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	- Kepala sekolah belum berperan aktif sebagai role model - Tidak ada sistem penghargaan dan sanksi yang adil			- Nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab tidak tertanam kuat - Menurunnya kredibilitas sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
40	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki Sarana dengan kondisi Lengkap dan Baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kondisi fisik sarana pendidikan	ROO.22.01.01.210	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	Internal	C	- Sarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidaknyamanan bagi peserta didik dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.211	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	Internal	C	- Kesalahan perencanaan kebutuhan sarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.212	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada SOP pemeliharaan sarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	Internal	C	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.213	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata - Infrastruktur dasar (listrik, internet, air) belum memadai	Internal	C	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit mencapai SNP - Ketidakadilan akses pendidikan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.214	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasi - Pengawasan internal lemah	Internal	C	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran - Hambatan dalam realisasi target indikator	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
41		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki Prasarana dengan kondisi Lengkap dan Baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.215	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	Internal	C	- Prasarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidaknyamanan bagi peserta didik dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Data kondisi Prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.216	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	Internal	C	- Kesalahan perencanaan kebutuhan prasarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan Prasarana	ROO.22.01.01.217	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada SOP pemeliharaan prasarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	Internal	C	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.218	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata - Infrastruktur dasar (listrik, internet, air) belum memadai	Internal	C	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit mencapai SNP - Ketidakadilan akses pendidikan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.219	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasi - Pengawasan internal lemah	Internal	C	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran - Hambatan dalam realisasi target indikator	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
42		Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.220	Kepala Seksi PAUD	- Pendataan tidak dilakukan secara rutin - Kurangnya koordinasi antara sekolah, desa, dan Dinas Pendidikan - Basis data kemiskinan tidak sinkron dengan Dapodik	Internal	C	- Siswa tidak mampu tidak mendapat bantuan - Program intervensi tidak tepat sasaran - Rendahnya efektivitas kebijakan afirmatif	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.221	Kepala Seksi PAUD	- Mekanisme seleksi penerima bantuan belum optimal - Koordinasi antar instansi lemah - Nilai bantuan tidak mencukupi kebutuhan belajar siswa	Internal	C	- Siswa tetap mengalami kesulitan ekonomi - Risiko putus sekolah meningkat - Kepercayaan publik terhadap program menurun	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.222	Kepala Seksi PAUD	- Tingkat pendidikan orang tua rendah - Anak dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga atau mencari nafkah - Kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan wajib 12 tahun	Internal	C	- Anak tidak mampu tidak disekolahkan - Tingkat kehadiran siswa rendah - Rendahnya angka partisipasi murni (APM)	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.223	Kepala Seksi PAUD	- Tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal- Kondisi sarana rusak atau tidak layak- Guru enggan ditempatkan di daerah sulit	Internal	C	- Anak dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah - Ketimpangan akses pendidikan antar wilayah	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.224	Kepala Seksi PAUD	- Tidak ada koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Bappeda, dll.) - Program bantuan bersifat sementara - Belum ada evaluasi efektivitas program	Internal	C	- Penurunan capaian persentase siswa tidak mampu bersekolah - Program tidak berdampak jangka panjang	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.225	Kepala Seksi PAUD	- Pendapatan keluarga menurun tajam - Fokus keluarga pada kebutuhan dasar non pendidikan - Peningkatan jumlah anak tidak mampu baru	Internal	C	- Kenaikan angka anak tidak sekolah dari keluarga miskin - Gangguan keberlanjutan belajar	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
43		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang meningkat kompetensinya	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.226	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Guru kesulitan mengatur waktu karena beban kerja tinggi - Kurangnya motivasi mengikuti pelatihan - Sosialisasi kegiatan peningkatan kompetensi belum optimal	Internal	C	- Capaian indikator tidak terpenuhi - Kompetensi guru stagnan - Kualitas pembelajaran menurun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.0 1.01.227	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Materi tidak kontekstual dengan kebutuhan lapangan - Narasumber tidak sesuai bidang - Tidak ada evaluasi hasil pelatihan	Internal	C	- Pelatihan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi nyata - Efektivitas program rendah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.0 1.01.228	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Jumlah pengawas dan widyaiswara terbatas - Distribusi pengawas tidak merata - Pembinaan jarang dilakukan secara tatap muka	Internal	C	- Guru kekurangan pendampingan profesional - Hasil pelatihan tidak berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.0 1.01.229	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital guru masih rendah- Fasilitas TIK di sekolah belum memadai- Tidak ada pendampingan penggunaan aplikasi pembelajaran	Internal	C	- Pembelajaran kurang inovatif dan interaktif - Keteringgalan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.0 1.01.230	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Data pelatihan guru tidak terdokumentasi dengan baik - Belum ada sistem pelaporan capaian pelatihan - Tidak ada indikator kinerja yang terukur	Internal	C	- Kesulitan menilai capaian indikator - Pengambilan keputusan tidak berbasis data	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.0 1.01.231	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum memahami perannya sebagai supervisor akademik - Tidak ada budaya belajar di lingkungan sekolah - Pembinaan lebih fokus pada administrasi	Internal	C	- Guru kurang termotivasi untuk berkembang - Pelatihan tidak diikuti dengan praktik nyata	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
44		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.0 1.01.232	Kepala Seksi PAUD	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi	Internal	C	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.233	Kepala Seksi PAUD	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.234	Kepala Seksi PAUD	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.235	Kepala Seksi PAUD	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan transaksi riil	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.236	Kepala Seksi PAUD	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Bendahara Kepala Sekolah Dinas Pendidikan
45		Nilai Kebhinekaan dan Inklusifitas	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tentang nilai kebhinekaan dan inklusifitas	ROO.22.01.01.237	Kepala Seksi PAUD	- Belum ada pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif dan kebhinekaan - Materi penguatan karakter belum diintegrasikan dalam pembelajaran PAUD - Kurangnya referensi dan panduan implementasi nilai-nilai kebhinekaan	Internal	C	- Lingkungan belajar belum mencerminkan keberagaman dan toleransi - Anak tidak mendapatkan pengalaman belajar yang menghargai perbedaan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya penerapan prinsip inklusif di lembaga PAUD	ROO.22.01.01.238	Kepala Seksi PAUD	- Belum semua lembaga siap menerima anak berkebutuhan khusus - Tidak tersedia sarana dan media pembelajaran adaptif - Pendidik belum memahami strategi pembelajaran inklusif	Internal	C	- Anak berkebutuhan khusus tidak terlayani dengan baik - Diskriminasi atau pengecualian masih terjadi di lingkungan sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat terhadap penerapan kebhinekaan dan inklusifitas	ROO.22.0 1.01.239	Kepala Seksi PAUD	- Kurangnya komunikasi sekolah dengan orang tua tentang pentingnya nilai kebhinekaan - Masih ada pandangan eksklusif atau bias sosial di masyarakat	Internal	C	- Upaya penanaman nilai toleransi tidak konsisten antara sekolah dan rumah - Lingkungan sosial kurang mendukung nilai inklusif	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran yang mencerminkan nilai kebhinekaan	ROO.22.0 1.01.240	Kepala Seksi PAUD	- Buku dan alat permainan edukatif (APE) tidak mewakili keberagaman budaya dan sosial- Belum ada panduan nasional atau daerah terkait bahan ajar inklusif	Internal	C	- Pembelajaran cenderung homogen dan tidak menumbuhkan empati terhadap perbedaan - Nilai kebhinekaan anak tidak berkembang optimal	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi nilai kebhinekaan dan inklusifitas di PAUD	ROO.22.0 1.01.241	Kepala Seksi PAUD	- Indikator penilaian belum terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu PAUD - Pengawas belum memiliki instrumen penilaian kebhinekaan	Internal	C	Tidak terpantau perkembangan penerapan nilai kebhinekaan dan inklusifitas di lembaga	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
46		Nilai Iklim Keamanan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.0 1.01.242	Kepala Seksi PAUD	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	Internal	C	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.0 1.01.243	Kepala Seksi PAUD	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial	Internal	C	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.0 1.01.244	Kepala Seksi PAUD	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)	Internal	C	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.0 1.01.245	Kepala Seksi PAUD	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah dilatih evakuasi bencana - Kurangnya koordinasi dengan BPBD	Internal	C	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah - Gangguan proses pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.0 1.01.246	Kepala Seksi PAUD	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas	Internal	C	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.0 1.01.247	Kepala Seksi PAUD	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua - Tidak tersedia layanan konseling memadai	Internal	C	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.0 1.01.248	Kepala Seksi PAUD	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia	Internal	C	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
47	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memiliki Sarana dengan kondisi lengkap dan baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.0 1.01.249	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	Internal	C	- Sarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidaknyamanan bagi peserta didik dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.0 1.01.250	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	Internal	C	- Kesalahan perencanaan kebutuhan sarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.0 1.01.251	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	- Tidak ada SOP pemeliharaan sarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	Internal	C	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.0 1.01.252	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata - Infrastruktur dasar (listrik, internet, air) belum memadai	Internal	C	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit mencapai SNP - Ketidakadilan akses pendidikan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.0 1.01.253	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasi - Pengawasan internal lemah	Internal	C	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran - Hambatan dalam realisasi target indikator	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
48		Persentase satuan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang memiliki Prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.254	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	Internal	C	- Prasarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidaknyamanan bagi peserta didik dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.255	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	Internal	C	- Kesalahan perencanaan kebutuhan prasarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.256	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Tidak ada SOP pemeliharaan prasarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	Internal	C	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.257	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata - Infrastruktur dasar (listrik, internet, air) belum memadai	Internal	C	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit mencapai SNP - Ketidakadilan akses pendidikan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.258	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai spesifikasi - Pengawasan internal lemah	Internal	C	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran - Hambatan dalam realisasi target indikator	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
49		Persentase peserta didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Non Formal/kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.259	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pendataan tidak dilakukan secara rutin - Kurangnya koordinasi antara sekolah, desa, dan Dinas Pendidikan - Basis data kemiskinan tidak sinkron dengan Dapodik	Internal	C	- Siswa tidak mampu tidak mendapat bantuan - Program intervensi tidak tepat sasaran - Rendahnya efektivitas kebijakan afirmatif	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.260	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Mekanisme seleksi penerima bantuan belum optimal - Koordinasi antar instansi lemah - Nilai bantuan tidak mencukupi kebutuhan belajar siswa	Internal	C	- Siswa tetap mengalami kesulitan ekonomi - Risiko putus sekolah meningkat - Kepercayaan publik terhadap program menurun	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.0 1.01.261	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tingkat pendidikan orang tua rendah - Anak dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga atau mencari nafkah - Kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan wajib 12 tahun	Internal	C	- Anak tidak mampu tidak disekolahkan - Tingkat kehadiran siswa rendah - Rendahnya angka partisipasi murni (APM)	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.0 1.01.262	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal- Kondisi sarana rusak atau tidak layak- Guru enggan ditempatkan di daerah sulit	Internal	C	- Anak dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah - Ketimpangan akses pendidikan antar wilayah	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.0 1.01.263	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Bappeda, dll.) - Program bantuan bersifat sementara - Belum ada evaluasi efektivitas program	Internal	C	- Penurunan capaian persentase siswa tidak mampu bersekolah - Program tidak berdampak jangka panjang	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.0 1.01.264	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pendapatan keluarga menurun tajam - Fokus keluarga pada kebutuhan dasar non pendidikan - Peningkatan jumlah anak tidak mampu baru	Internal	C	- Kenaikan angka anak tidak sekolah dari keluarga miskin - Gangguan keberlanjutan belajar	Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
50		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya minat Pondok Pesantren untuk menyelenggarakan program kesetaraan (Paket A, B, C)	ROO.22.0 1.01.265	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya sosialisasi manfaat program kesetaraan bagi santri - Belum ada pendampingan teknis penyusunan izin kesetaraan - Minimnya dukungan sumber daya manusia pendidik kesetaraan	Internal	C	- Pesantren tidak berminat membuka layanan kesetaraan - Santri tidak memiliki ijazah formal yang diakui pemerintah	Santri Pengelola Pondok Pesantren Dinas Pendidikan
				Terbatasnya tenaga pendidik dan tutor yang kompeten untuk mengajar program kesetaraan di pesantren	ROO.22.0 1.01.266	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak semua pesantren memiliki guru dengan kualifikasi sesuai jenjang - Belum ada pelatihan tutor kesetaraan yang memadai - Keterbatasan insentif bagi tutor	Internal	C	- Kualitas pembelajaran kesetaraan rendah - Nilai hasil belajar santri tidak optimal	Santri Pengelola Pondok Pesantren Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran kesetaraan di pesantren	ROO.22.0 1.01.267	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Fasilitas belajar seperti ruang kelas, buku paket, dan alat belajar kurang - Program kesetaraan belum memperoleh dukungan bantuan sarana dari pemerintah	Internal	C	- Proses belajar mengajar tidak efektif - Pesantren kesulitan memenuhi standar layanan pendidikan	Santri Pengelola Pondok Pesantren Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kendala perizinan dan administrasi penyelenggaraan program kesetaraan di pesantren	ROO.22.01.01.268	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Proses pengajuan izin operasional rumit dan memakan waktu - Pengelola belum memahami sistem Dapodik dan pelaporan kesetaraan	Internal	C	- Banyak pesantren belum terdaftar resmi sebagai penyelenggara kesetaraan - Tidak terdata dalam capaian indikator pendidikan nonformal	Santri Pengelola Pondok Pesantren Dinas Pendidikan
				Kurangnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan pesantren kesetaraan	ROO.22.01.01.269	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Koordinasi lintas sektor belum optimal - Belum ada forum kerja bersama pembinaan pesantren kesetaraan	Internal	C	- Data dan pembinaan berjalan terpisah - Duplikasi atau ketidakterpaduan program	Santri Pengelola Pondok Pesantren Dinas Pendidikan
51		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang meningkat kompetensinya	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.270	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Guru kesulitan mengatur waktu karena beban kerja tinggi - Kurangnya motivasi mengikuti pelatihan - Sosialisasi kegiatan peningkatan kompetensi belum optimal	Internal	C	- Capaian indikator tidak terpenuhi - Kompetensi guru stagnan - Kualitas pembelajaran menurun	Santri Pengelola Pondok Pesantren Dinas Pendidikan
				Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.271	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Materi tidak kontekstual dengan kebutuhan lapangan - Narasumber tidak sesuai bidang - Tidak ada evaluasi hasil pelatihan	Internal	C	- Pelatihan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi nyata - Efektivitas program rendah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.272	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Jumlah pengawas dan widyaiswara terbatas - Distribusi pengawas tidak merata - Pembinaan jarang dilakukan secara tatap muka	Internal	C	- Guru kekurangan pendampingan profesional - Hasil pelatihan tidak berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.273	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital guru masih rendah-Fasilitas TIK di sekolah belum memadai- Tidak ada pendampingan penggunaan aplikasi pembelajaran	Internal	C	- Pembelajaran kurang inovatif dan interaktif - Ketertinggalan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.274	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Data pelatihan guru tidak terdokumentasi dengan baik - Belum ada sistem pelaporan capaian pelatihan - Tidak ada indikator kinerja yang terukur	Internal	C	- Kesulitan menilai capaian indikator - Pengambilan keputusan tidak berbasis data	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.275	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum memahami perannya sebagai supervisor akademik - Tidak ada budaya belajar di lingkungan sekolah - Pembinaan lebih fokus pada administrasi	Internal	C	- Guru kurang termotivasi untuk berkembang - Pelatihan tidak diikuti dengan praktik nyata	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
52		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.276	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi	Internal	C	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun	Bendahara Pengelola Lembaga Dinas Pendidikan
				Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.277	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Bendahara Pengelola Lembaga Dinas Pendidikan
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.278	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Bendahara Pengelola Lembaga Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.279	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan transaksi riil	Bendahara Pengelola Lembaga Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.280	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Bendahara Pengelola Lembaga Dinas Pendidikan
53	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.281	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	Internal	C	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan	
Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik			ROO.22.01.01.282	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial	Internal	C	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik			ROO.22.01.01.283	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)	Internal	C	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah			ROO.22.01.01.284	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah dilatih evakuasi bencana - Kurangnya koordinasi dengan BPBD	Internal	C	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah - Gangguan proses pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)			ROO.22.01.01.285	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas	Internal	C	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi			ROO.22.01.01.286	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua - Tidak tersedia layanan konseling memadai	Internal	C	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak			ROO.22.01.01.287	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia	Internal	C	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
54		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.288	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi sekolah.	Internal	C	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.289	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidapatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.290	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.291	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan transaksi riil	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.292	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.293	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan kepada komite sekolah - Lemahnya pengawasan masyarakat	Internal	C	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.294	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan lemah - Evaluasi pelaporan tidak dilakukan rutin	Internal	C	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau tidak lengkap	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
55	Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.295	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap prinsip inklusifitas	Internal	C	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan rasa aman dan nyaman belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan	
Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik			ROO.22.01.01.296	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan diferensiasi pembelajaran	Internal	C	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan belajar yang setara	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus			ROO.22.01.01.297	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar) - Terbatasnya anggaran untuk sarana inklusi	Internal	C	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara siswa reguler dan ABK	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi			ROO.22.01.01.298	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus kekerasan/perundungan - Minimnya pendidikan karakter dan empati	Internal	C	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidakyamanan bagi korban	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah			ROO.22.01.01.299	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus	Internal	C	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas			ROO.22.01.01.300	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek akademik saja	Internal	C	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan tindak lanjut	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		
Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif			ROO.22.01.01.301	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif - Fokus lebih pada target akademik dan administratif	Internal	C	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan		

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
56		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.0 1.01.302	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	Internal	C	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.0 1.01.303	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial	Internal	C	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.0 1.01.304	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)	Internal	C	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.0 1.01.305	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah dilatih evakuasi bencana - Kurangnya koordinasi dengan BPBD	Internal	C	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah - Gangguan proses pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.0 1.01.306	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas	Internal	C	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.0 1.01.307	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua - Tidak tersedia layanan konseling memadai	Internal	C	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.0 1.01.308	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia	Internal	C	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				57		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.0 1.01.309	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggisekolah.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.0 1.01.310	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.0 1.01.311	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.0 1.01.312	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan transaksi riil	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.0 1.01.313	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.0 1.01.314	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan kepada komite sekolah - Lemahnya pengawasan masyarakat	Internal	C	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.0 1.01.315	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan lemah - Evaluasi pelaporan tidak dilakukan rutin	Internal	C	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau tidak lengkap	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
58		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.0 1.01.316	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap prinsip inklusivitas	Internal	C	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan rasa aman dan nyaman belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.0 1.01.317	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan diferensiasi pembelajaran	Internal	C	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan belajar yang setara	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.0 1.01.318	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar) - Terbatasnya anggaran untuk sarana inklusi	Internal	C	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara siswa reguler dan ABK	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.0 1.01.319	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus kekerasan/perundungan - Minimnya pendidikan karakter dan empati	Internal	C	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidakyamanan bagi korban	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.0 1.01.320	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus	Internal	C	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.0 1.01.321	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek akademik saja	Internal	C	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan tindak lanjut	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.0 1.01.322	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif - Fokus lebih pada target akademik dan administratif	Internal	C	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
59		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolah ramah anak.	ROO.22.0 1.01.323	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	Internal	C	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.0 1.01.324	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial	Internal	C	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.325	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)	Internal	C	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.326	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah dilatih evakuasi bencana - Kurangnya koordinasi dengan BPBD	Internal	C	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah - Gangguan proses pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.327	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas	Internal	C	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.328	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua - Tidak tersedia layanan konseling memadai	Internal	C	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.329	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia	Internal	C	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
60		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.330	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi sekolah.	Internal	C	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.331	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	Internal	C	- Potensi temuan audit - Ketidapatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.332	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	Internal	C	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.333	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	Internal	C	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidakesesuaian laporan dengan transaksi riil	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.334	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	Internal	C	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.335	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan kepada komite sekolah - Lemahnya pengawasan masyarakat	Internal	C	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.336	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan lemah - Evaluasi pelaporan tidak dilakukan rutin	Internal	C	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau tidak lengkap	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
61		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.337	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap prinsip inklusifitas	Internal	C	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan rasa aman dan nyaman belajar	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.338	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan diferensiasi pembelajaran	Internal	C	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan belajar yang setara	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.339	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar) - Terbatasnya anggaran untuk sarana inklusi	Internal	C	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara siswa reguler dan ABK	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.340	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus kekerasan/perundungan - Minimnya pendidikan karakter dan empati	Internal	C	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidakyamanan bagi korban	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.341	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya sosialisasi tentang pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus	Internal	C	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.342	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek akademik saja	Internal	C	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan tindak lanjut	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.343	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif - Fokus lebih pada target akademik dan administratif	Internal	C	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
62	2. Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.344	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan kurikulum terbaru (Merdeka Belajar / Kurikulum 2013) - Belum ada sosialisasi dan pendampingan memadai dari dinas pendidikan	Internal	C	- Ketidaksesuaian proses pembelajaran dengan standar nasional - Keteringgalan mutu dan capaian belajar peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.345	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada penetapan kurikulum muatan lokal dari pemerintah daerah - Guru tidak memiliki bahan ajar atau panduan pelaksanaan mulok - Kegiatan pembelajaran muatan lokal belum terjadwal dengan baik	Internal	C	- Identitas budaya dan kearifan lokal tidak tergal di sekolah - Nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi pada peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.346	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum baru - Minimnya supervisi pembelajaran dan umpan balik profesional	Internal	C	- Proses pembelajaran tidak sesuai prinsip kurikulum aktif dan kontekstual - Mutu hasil belajar tidak meningkat	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.347	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Perencanaan muatan lokal tidak mempertimbangkan capaian pembelajaran nasional- Tidak ada tim kurikulum daerah yang memantau keterpaduan	Internal	C	- Tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara konten nasional dan lokal- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
63		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.348	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan kurikulum terbaru (Merdeka Belajar / Kurikulum 2013) - Belum ada sosialisasi dan pendampingan memadai dari dinas pendidikan	Internal	C	- Ketidaksesuaian proses pembelajaran dengan standar nasional - Keteringgalan mutu dan capaian belajar peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.349	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Belum ada penetapan kurikulum muatan lokal dari pemerintah daerah - Guru tidak memiliki bahan ajar atau panduan pelaksanaan mulok - Kegiatan pembelajaran muatan lokal belum terjadwal dengan baik	Internal	C	- Identitas budaya dan kearifan lokal tidak tergal di sekolah - Nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi pada peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.350	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum baru - Minimnya supervisi pembelajaran dan umpan balik profesional	Internal	C	- Proses pembelajaran tidak sesuai prinsip kurikulum aktif dan kontekstual - Mutu hasil belajar tidak meningkat	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.351	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Perencanaan muatan lokal tidak mempertimbangkan capaian pembelajaran nasional- Tidak ada tim kurikulum daerah yang memantau keterpaduan	Internal	C	- Tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara konten nasional dan lokal- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
64		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.352	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan kurikulum terbaru (Merdeka Belajar / Kurikulum 2013) - Belum ada sosialisasi dan pendampingan memadai dari dinas pendidikan	Internal	C	- Ketidakesesuaian proses pembelajaran dengan standar nasional - Keteringgalan mutu dan capaian belajar peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.353	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada penetapan kurikulum muatan lokal dari pemerintah daerah - Guru tidak memiliki bahan ajar atau panduan pelaksanaan mulok - Kegiatan pembelajaran muatan lokal belum terjadwal dengan baik			- Identitas budaya dan kearifan lokal tidak tergal di sekolah - Nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi pada peserta didik	
				Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.354	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum baru - Minimnya supervisi pembelajaran dan umpan balik profesional			- Proses pembelajaran tidak sesuai prinsip kurikulum aktif dan kontekstual - Mutu hasil belajar tidak meningkat	
				Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.355	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Perencanaan muatan lokal tidak mempertimbangkan capaian pembelajaran nasional- Tidak ada tim kurikulum daerah yang memantau keterpaduan			- Tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara konten nasional dan lokal- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik	
65		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.356	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan kurikulum terbaru (Merdeka Belajar / Kurikulum 2013) - Belum ada sosialisasi dan pendampingan memadai dari dinas pendidikan	Internal	C	- Ketidakesesuaian proses pembelajaran dengan standar nasional - Keteringgalan mutu dan capaian belajar peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.357	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada penetapan kurikulum muatan lokal dari pemerintah daerah - Guru tidak memiliki bahan ajar atau panduan pelaksanaan mulok - Kegiatan pembelajaran muatan lokal belum terjadwal dengan baik			- Identitas budaya dan kearifan lokal tidak tergal di sekolah - Nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi pada peserta didik	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.358	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum baru - Minimnya supervisi pembelajaran dan umpan balik profesional	Internal	C	- Proses pembelajaran tidak sesuai prinsip kurikulum aktif dan kontekstual - Mutu hasil belajar tidak meningkat	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.359	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Perencanaan muatan lokal tidak mempertimbangkan capaian pembelajaran nasional- Tidak ada tim kurikulum daerah yang memantau keterpaduan	Internal	C	- Tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara konten nasional dan lokal- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
66	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.360	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Belum dilakukan analisis potensi lokal secara komprehensif- Tidak melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat dalam penyusunan kurikulum	Internal	C	- Kurikulum tidak kontekstual dengan kondisi lingkungan peserta didik- Kurikulum sulit diterapkan secara berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.361	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Guru dan kepala sekolah belum memahami prinsip pengembangan kurikulum - Tidak ada pelatihan khusus tentang desain dan implementasi muatan lokal	Internal	C	- Dokumen kurikulum tidak memenuhi standar - Pelaksanaan pembelajaran tidak efektif	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.362	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Belum tersedia modul, media, dan instrumen pembelajaran - Tidak ada dukungan anggaran pengembangan bahan ajar	Internal	C	- Pembelajaran muatan lokal tidak berjalan optimal - Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
67		Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan yang sesuai dengan kebutuhan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.363	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum dilakukan analisis potensi lokal secara komprehensif- Tidak melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat dalam penyusunan kurikulum	Internal	C	- Kurikulum tidak kontekstual dengan kondisi lingkungan peserta didik- Kurikulum sulit diterapkan secara berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.364	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Guru dan kepala sekolah belum memahami prinsip pengembangan kurikulum - Tidak ada pelatihan khusus tentang desain dan implementasi muatan lokal	Internal	C	- Dokumen kurikulum tidak memenuhi standar - Pelaksanaan pembelajaran tidak efektif	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					f						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.0 1.01.365	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum tersedia modul, media, dan instrumen pembelajaran - Tidak ada dukungan anggaran pengembangan bahan ajar	Internal	C	- Pembelajaran muatan lokal tidak berjalan optimal - Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
68	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.0 1.01.366	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	- Belum dilakukan analisis potensi lokal secara komprehensif. Tidak melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat dalam penyusunan kurikulum	Internal	C	- Kurikulum tidak kontekstual dengan kondisi lingkungan peserta didik. Kurikulum sulit diterapkan secara berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.0 1.01.367	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	- Guru dan kepala sekolah belum memahami prinsip pengembangan kurikulum - Tidak ada pelatihan khusus tentang desain dan implementasi muatan lokal	Internal	C	- Dokumen kurikulum tidak memenuhi standar - Pelaksanaan pembelajaran tidak efektif	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.0 1.01.368	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	- Belum tersedia modul, media, dan instrumen pembelajaran - Tidak ada dukungan anggaran pengembangan bahan ajar	Internal	C	- Pembelajaran muatan lokal tidak berjalan optimal - Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
69		Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.0 1.01.369	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum dilakukan analisis potensi lokal secara komprehensif. Tidak melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat dalam penyusunan kurikulum	Internal	C	- Kurikulum tidak kontekstual dengan kondisi lingkungan peserta didik. Kurikulum sulit diterapkan secara berkelanjutan	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.0 1.01.370	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Guru dan kepala sekolah belum memahami prinsip pengembangan kurikulum - Tidak ada pelatihan khusus tentang desain dan implementasi muatan lokal	Internal	C	- Dokumen kurikulum tidak memenuhi standar - Pelaksanaan pembelajaran tidak efektif	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
				Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.0 1.01.371	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum tersedia modul, media, dan instrumen pembelajaran - Tidak ada dukungan anggaran pengembangan bahan ajar	Internal	C	- Pembelajaran muatan lokal tidak berjalan optimal - Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran	Peserta Didik PTK Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
70	3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.0 1.01.372	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Penempatan guru belum merata - Kurangnya kebijakan afirmatif untuk daerah terpencil	Internal	C	- Satuan Pendidikan Kekurangan guru pada pelajaran tertentu - Penurunan mutu pelajaran	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
71		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.373	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Penempatan guru belum merata - Kurangnya kebijakan afirmatif untuk daerah terpencil	Internal	C	- Satuan Pendidikan Kekurangan guru pada pelajaran tertentu - Penurunan mutu pelajaran	Dinas Pendidikan
72		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.374	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Penempatan guru belum merata - Kurangnya kebijakan afirmatif untuk daerah terpencil	Internal	C	- Satuan Pendidikan Kekurangan guru pada pelajaran tertentu - Penurunan mutu pelajaran	Dinas Pendidikan
73		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikasi Pendidik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.375	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Sebaran guru bersertifikat terkonsentrasi di wilayah kota - Sekolah terpencil kekurangan guru bersertifikat - Tidak ada kebijakan redistribusi guru berbasis kualifikasi	Internal	C	- Kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah - Ketimpangan layanan pembelajaran	Dinas Pendidikan
74		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang Bersertifikasi Pendidik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.376	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Sebaran guru bersertifikat terkonsentrasi di wilayah kota - Sekolah terpencil kekurangan guru bersertifikat - Tidak ada kebijakan redistribusi guru berbasis kualifikasi	Internal	C	- Kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah - Ketimpangan layanan pembelajaran	Dinas Pendidikan
75		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang Bersertifikasi Pendidik	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.377	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Sebaran guru bersertifikat terkonsentrasi di wilayah kota - Sekolah terpencil kekurangan guru bersertifikat - Tidak ada kebijakan redistribusi guru berbasis kualifikasi	Internal	C	- Kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah - Ketimpangan layanan pembelajaran	Dinas Pendidikan
76	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/K	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.378	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD PNF/Kesetaraan	- Banyak sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif - Proses pengangkatan dan penetapan kepala sekolah belum optimal - Keterbatasan calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	Internal	C	- Rasio kepala sekolah terhadap satuan pendidikan tidak ideal - Penurunan efektivitas manajemen sekolah - Pengawasan dan pembinaan sekolah tidak optimal	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
77	kesetaraan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.379	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Banyak sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif - Proses pengangkatan dan penetapan kepala sekolah belum optimal - Keterbatasan calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	Internal	C	- Rasio kepala sekolah terhadap satuan pendidikan tidak ideal - Penurunan efektivitas manajemen sekolah - Pengawasan dan pembinaan sekolah tidak optimal	Dinas Pendidikan
78		Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.380	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Banyak sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif - Proses pengangkatan dan penetapan kepala sekolah belum optimal - Keterbatasan calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	Internal	C	- Rasio kepala sekolah terhadap satuan pendidikan tidak ideal - Penurunan efektivitas manajemen sekolah - Pengawasan dan pembinaan sekolah tidak optimal	Dinas Pendidikan
79		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Anak usia Dini	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.381	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD PNF/Kesetaraan	- Banyak pengawas pensiun tanpa rekrutmen baru - Tidak ada formasi pengawas dalam seleksi ASN/P3K - Beban kerja per pengawas terlalu besar	Internal	C	- Pengawasan tidak optimal - Mutu pembelajaran dan manajemen sekolah tidak terpantau - Penurunan kinerja sekolah	Dinas Pendidikan
80		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.382	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Banyak pengawas pensiun tanpa rekrutmen baru - Tidak ada formasi pengawas dalam seleksi ASN/P3K - Beban kerja per pengawas terlalu besar	Internal	C	- Pengawasan tidak optimal - Mutu pembelajaran dan manajemen sekolah tidak terpantau - Penurunan kinerja sekolah	Dinas Pendidikan
81		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.383	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Banyak pengawas pensiun tanpa rekrutmen baru - Tidak ada formasi pengawas dalam seleksi ASN/P3K - Beban kerja per pengawas terlalu besar	Internal	C	- Pengawasan tidak optimal - Mutu pembelajaran dan manajemen sekolah tidak terpantau - Penurunan kinerja sekolah	Dinas Pendidikan
82		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Ketidakseimbangan sebaran guru antar satuan pendidikan	ROO.22.01.01.384	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Konsentrasi guru di wilayah perkotaan - Kekurangan guru di daerah terpencil - Sistem mutasi dan penempatan belum berbasis kebutuhan riil	Internal	C	- Sekolah tertentu kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan - Proses belajar terganggu di daerah tertentu - Indeks distribusi guru menurun	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
83		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Ketidakseimbangan sebaran guru antar satuan pendidikan	ROO.22.01.01.385	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Konsentrasi guru di wilayah perkotaan - Kekurangan guru di daerah terpencil - Sistem mutasi dan penempatan belum berbasis kebutuhan riil	Internal	C	- Sekolah tertentu kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan - Proses belajar terganggu di daerah tertentu - Indeks distribusi guru menurun	Dinas Pendidikan	
84		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Sekolah Dasar	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.386	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Banyak guru lama belum sempat melanjutkan studi - Terbatasnya akses pendidikan tinggi di daerah - Tidak ada program afirmasi kuliah bagi guru non-S1	Internal	C	- Persentase PTK berkualifikasi S1/D4 rendah - Tidak terpenuhinya standar kompetensi guru nasional - Mutu pembelajaran menurun	Dinas Pendidikan	
85		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.387	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Banyak guru lama belum sempat melanjutkan studi - Terbatasnya akses pendidikan tinggi di daerah - Tidak ada program afirmasi kuliah bagi guru non-S1	Internal	C	- Persentase PTK berkualifikasi S1/D4 rendah - Tidak terpenuhinya standar kompetensi guru nasional - Mutu pembelajaran menurun	Dinas Pendidikan	
86		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Perencanaan, Implementasi dan evaluasi	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.388	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD PNF/Kesetaraan	- Banyak guru lama belum sempat melanjutkan studi - Terbatasnya akses pendidikan tinggi di daerah - Tidak ada program afirmasi kuliah bagi guru non-S1	Internal	C	- Persentase PTK berkualifikasi S1/D4 rendah - Tidak terpenuhinya standar kompetensi guru nasional - Mutu pembelajaran menurun	Dinas Pendidikan	

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 2025 Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko f=dxe
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				0
1	Rendahnya angka partisipasi murni dan kasar di jenjang SD dan SMP	RSP.22.01.01.01	3	4	12
2	Masih adanya anak putus sekolah di jenjang SD dan SMP	RSP.22.01.01.02	3	4	12
3	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dasar	RSP.22.01.01.03	3	3	9
4	Kualitas layanan pembelajaran belum merata antar sekolah	RSP.22.01.01.04	3	4	12
5	Kendala ekonomi keluarga peserta didik	RSP.22.01.01.05	4	3	12
6	Akses sekolah sulit di daerah terpencil	RSP.22.01.01.06	4	3	12
7	Rendahnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak	RSP.22.01.01.07	3	3	9
8	Pendataan anak usia sekolah tidak bersekolah belum akurat	RSP.22.01.01.08	3	3	9
9	Rendahnya kesadaran gender dalam pendidikan dasar	RSP.22.01.01.09	3	3	9
II	Risiko Strategis OPD :	0			
1	Terjadinya pernikahan dini di usia sekolah	RSO.22.01.01.01	4	3	12
2	Pilihan ke sekolah agama lebih dominan dibanding pada sekolah formal	RSO.22.01.01.02	3	3	9
3	Anak usia sekolah putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan	RSO.22.01.01.03	4	3	12
4	Keterbatasan akses sekolah di daerah terpencil	RSO.22.01.01.04	4	3	12
5	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar	RSO.22.01.01.05	3	3	9
6	Data partisipasi sekolah tidak akurat atau tidak mutakhir	RSO.22.01.01.06	3	4	12
7	Kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan angka partisipasi	RSO.22.01.01.07	3	3	9
8	Keterbatasan program pendidikan alternatif (Paket A, B, C)	RSO.22.01.01.08	3	4	12
9	Gangguan eksternal (bencana, pandemi, atau cuaca ekstrem)	RSO.22.01.01.09	3	3	9
10	Ketidaktercapaian target indikator SPM pendidikan dasar	RSO.22.01.01.10	3	3	9
11	Rendahnya angka partisipasi sekolah usia wajib belajar (7–15 tahun)	RSO.22.01.01.11	4	3	12
12	Ketimpangan distribusi dan kualitas guru antar sekolah	RSO.22.01.01.12	3	3	9
13	Keterlambatan dan ketidakakuratan data pendidikan (Dapodik/SPM)	RSO.22.01.01.13	4	3	12
14	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	RSO.22.01.01.14	3	3	9
15	Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	RSO.22.01.01.15	3	3	9
16	Ketidakpatuhan sekolah terhadap standar pelayanan minimal	RSO.22.01.01.16	3	3	9
17	Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung penerapan SPM	RSO.22.01.01.17	4	3	12
18	Rendahnya kapasitas dan komitmen SDM pelaksana SPM	RSO.22.01.01.18	3	3	9
19	Keterlambatan pelaporan capaian SPM ke pemerintah pusat	RSO.22.01.01.19	3	3	9
20	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM belum optimal	RSO.22.01.01.20	3	4	12
21	Risiko penyimpangan dan inefisiensi pelaksanaan program SPM	RSO.22.01.01.21	3	3	9
22	Gangguan eksternal (bencana alam, pandemi, cuaca ekstrem)	RSO.22.01.01.22	3	3	9
23	Kurangnya sosialisasi SPM kepada masyarakat	RSO.22.01.01.23	3	4	12
24	Tidak tersedianya pembelajaran alternatif di daerah khusus	RSO.22.01.01.24	3	3	9
25	Kualitas perencanaan kinerja tidak selaras dengan tujuan strategis	RSO.22.01.01.25	3	4	12
26	Pengukuran dan pelaporan kinerja tidak akurat	RSO.22.01.01.26	3	3	9
27	Evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkelanjutan	RSO.22.01.01.27	3	3	9
28	Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja rendah	RSO.22.01.01.28	4	3	12
29	Komitmen pimpinan dan pegawai belum optimal	RSO.22.01.01.29	3	3	9
30	Sistem informasi akuntabilitas belum memadai	RSO.22.01.01.30	3	3	9
31	Ketidaksinambungan antar dokumen perencanaan dan pelaporan	RSO.22.01.01.31	3	4	12
III	1. Risiko Operasional OPD Program Pengelolaan Pendidikan	0			
1	Rendahnya capaian satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai SNP	ROO.22.01.01.01	3	3	9
2	Ketidaksesuaian antara sarana pembelajaran yang dimiliki sekolah dengan standar SNP	ROO.22.01.01.02	3	3	9
3	Rendahnya capaian satuan pendidikan yang memiliki Prasarana pembelajaran sesuai SNP	ROO.22.01.01.03	4	3	12
4	Ketidaksesuaian antara Prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah dengan standar SNP	ROO.22.01.01.04	3	3	9
5	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.05	3	3	9
6	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.06	3	3	9
7	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.07	3	3	9
8	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.08	3	4	12
9	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.09	3	3	9
10	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.10	3	3	9
11	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.11	4	3	12
12	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.12	3	3	9
13	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.13	3	3	9
14	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.14	3	3	9
15	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.15	3	4	12
16	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.16	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
17	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.17	3	3	9
18	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.18	3	3	9
19	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.19	3	3	9
20	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.20	4	3	12
21	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.21	3	3	9
22	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.22	3	3	9
23	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.23	3	3	9
24	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.24	3	3	9
25	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.25	3	3	9
26	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.26	3	4	12
27	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.27	3	3	9
28	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.28	3	3	9
29	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.29	3	3	9
30	Kualitas pembelajaran literasi belum optimal	ROO.22.01.01.30	4	3	12
31	Keterbatasan sarana dan sumber belajar literasi	ROO.22.01.01.31	3	3	9
32	Rendahnya dukungan keluarga terhadap pengembangan literasi	ROO.22.01.01.32	3	3	9
33	Kurangnya integrasi kebijakan literasi antar jenjang dan antar instansi	ROO.22.01.01.33	4	3	12
34	Faktor sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik	ROO.22.01.01.34	3	3	9
35	Kualitas pembelajaran numerasi belum optimal	ROO.22.01.01.35	3	3	9
36	Kurangnya sarana dan sumber belajar numerasi	ROO.22.01.01.36	3	3	9
37	Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap numerasi	ROO.22.01.01.37	3	3	9
38	Dukungan keluarga dan lingkungan terhadap numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.38	3	3	9
39	Kebijakan sekolah dan daerah belum fokus pada peningkatan numerasi	ROO.22.01.01.39	3	4	12
40	Faktor sosial ekonomi dan ketimpangan wilayah mempengaruhi kemampuan numerasi	ROO.22.01.01.40	3	3	9
41	Perilaku peserta didik dipengaruhi lingkungan sosial negatif	ROO.22.01.01.41	3	3	9
42	Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter	ROO.22.01.01.42	3	3	9
43	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif	ROO.22.01.01.43	3	3	9
44	Lemahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter	ROO.22.01.01.44	3	3	9
45	Sistem penilaian karakter belum terimplementasi secara baik	ROO.22.01.01.45	4	3	12
46	Kurangnya dukungan kebijakan dan monitoring dari Dinas Pendidikan	ROO.22.01.01.46	3	3	9
47	Kualitas pembelajaran literasi belum optimal	ROO.22.01.01.47	3	3	9
48	Keterbatasan sarana dan sumber belajar literasi	ROO.22.01.01.48	3	3	9
49	Rendahnya dukungan keluarga terhadap pengembangan literasi	ROO.22.01.01.49	3	4	12
50	Kurangnya integrasi kebijakan literasi antar jenjang dan antar instansi	ROO.22.01.01.50	3	3	9
51	Faktor sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik	ROO.22.01.01.51	3	3	9
52	Kualitas pembelajaran numerasi belum optimal	ROO.22.01.01.52	3	3	9
53	Kurangnya sarana dan sumber belajar numerasi	ROO.22.01.01.53	4	3	12
54	Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap numerasi	ROO.22.01.01.54	3	3	9
55	Dukungan keluarga dan lingkungan terhadap numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.55	3	3	9
56	Kebijakan sekolah dan daerah belum fokus pada peningkatan numerasi	ROO.22.01.01.56	3	3	9
57	Faktor sosial ekonomi dan ketimpangan wilayah mempengaruhi kemampuan numerasi	ROO.22.01.01.57	3	3	9
58	Perilaku peserta didik dipengaruhi lingkungan sosial negatif	ROO.22.01.01.58	3	4	12
59	Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter	ROO.22.01.01.59	4	3	12
60	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif	ROO.22.01.01.60	3	3	9
61	Lemahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter	ROO.22.01.01.61	3	4	12
62	Sistem penilaian karakter belum terimplementasi secara baik	ROO.22.01.01.62	3	3	9
63	Kurangnya dukungan kebijakan dan monitoring dari Dinas Pendidikan	ROO.22.01.01.63	3	3	9
IV 1. Risiko Operasional OPD Kegiatan					
64	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.64	3	3	9
65	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.65	3	4	12
66	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.66	3	3	9
67	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.67	3	3	9
68	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.68	3	3	9
69	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.69	4	3	12
70	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.70	3	3	9
71	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.71	3	3	9
72	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.72	3	3	9
73	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.73	3	4	12
74	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.74	3	3	9
75	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.75	3	3	9
76	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.76	3	3	9
77	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.77	3	3	9
78	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.78	4	3	12
79	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.79	3	3	9
80	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.80	3	3	9
81	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.81	4	3	12
82	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.82	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
83	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.83	3	3	9
84	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.84	3	4	12
85	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.85	3	3	9
86	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.86	3	3	9
87	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.87	3	3	9
88	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.88	4	3	12
89	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.89	3	3	9
90	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.90	3	3	9
91	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.91	3	3	9
92	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.92	4	3	12
93	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.93	3	3	9
94	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.94	3	3	9
95	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.95	3	3	9
96	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.96	3	4	12
97	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.97	3	3	9
98	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.98	3	3	9
99	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.99	3	4	12
100	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.100	3	3	9
101	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.101	3	3	9
102	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.102	3	3	9
103	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.103	4	3	12
104	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.104	3	3	9
105	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.105	3	3	9
106	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.106	3	3	9
107	Rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.107	3	3	9
108	Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi masih terbatas	ROO.22.01.01.108	3	4	12
109	Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung literasi di sekolah	ROO.22.01.01.109	3	3	9
110	Lemahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat	ROO.22.01.01.110	3	3	9
111	Belum optimalnya sistem penilaian dan monitoring capaian literasi	ROO.22.01.01.111	3	3	9
112	Rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca dan menulis	ROO.22.01.01.112	4	3	12
113	Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.113	3	3	9
114	Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran numerasi masih terbatas	ROO.22.01.01.114	3	3	9
115	Kurangnya sarana dan bahan ajar numerasi yang mendukung	ROO.22.01.01.115	3	4	12
116	Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika	ROO.22.01.01.116	3	3	9
117	Dukungan keluarga terhadap pembelajaran numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.117	3	3	9
118	Belum optimalnya sistem asesmen numerasi di sekolah	ROO.22.01.01.118	3	3	9
119	Rendahnya jumlah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik	ROO.22.01.01.119	4	3	12
120	Kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non -akademik	ROO.22.01.01.120	3	3	9
121	Rendahnya motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi siswa	ROO.22.01.01.121	3	3	9
122	Keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan kegiatan prestasi	ROO.22.01.01.122	4	3	12
123	Guru pembina dan pelatih belum memiliki kompetensi khusus	ROO.22.01.01.123	3	3	9
124	Tidak adanya sistem seleksi dan pemantauan prestasi siswa yang berkelanjutan	ROO.22.01.01.124	3	3	9
125	Ketidakeimbangan fokus antara prestasi akademik dan non-akademik	ROO.22.01.01.125	3	4	12
126	Rendahnya internalisasi nilai karakter di lingkungan sekolah	ROO.22.01.01.126	3	3	9
127	Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	ROO.22.01.01.127	3	3	9
128	Ketidakterpaduan antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter	ROO.22.01.01.128	4	3	12
129	Rendahnya kapasitas guru dalam menilai dan menumbuhkan karakter peserta didik	ROO.22.01.01.129	3	3	9
130	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter	ROO.22.01.01.130	3	3	9
131	Lemahnya budaya organisasi sekolah yang mendukung karakter baik	ROO.22.01.01.131	4	3	12
132	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.132	3	3	9
133	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.133	3	3	9
134	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.134	3	4	12
135	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.135	3	3	9
136	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.136	3	3	9
137	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.137	4	3	12
138	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.138	3	3	9
139	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.139	3	3	9
140	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.140	3	4	12
141	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.141	3	3	9
142	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.142	3	3	9
143	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.143	3	3	9
144	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.144	3	3	9
145	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.145	4	3	12
146	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.146	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
147	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.147	3	3	9
148	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.148	3	3	9
149	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.149	4	3	12
150	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.150	3	3	9
151	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.151	3	3	9
152	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.152	4	3	12
153	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.153	3	3	9
154	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.154	3	3	9
155	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.155	3	3	9
156	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.156	3	4	12
157	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.157	3	3	9
158	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.158	3	3	9
159	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.159	3	3	9
160	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.160	4	3	12
161	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.161	3	3	9
162	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.162	3	3	9
163	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.163	3	3	9
164	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.164	4	3	12
165	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.165	3	3	9
166	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.166	3	3	9
167	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.167	3	3	9
168	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.168	4	3	12
169	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.169	3	3	9
170	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.170	3	3	9
171	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.171	3	3	9
172	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.172	4	3	12
173	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.173	3	3	9
174	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.174	3	3	9
175	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.175	3	4	12
176	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.176	3	3	9
177	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.177	3	3	9
178	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.178	3	3	9
179	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.179	4	3	12
180	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.180	3	3	9
181	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.181	3	3	9
182	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.182	4	3	12
183	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.183	3	3	9
184	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.184	3	3	9
185	Rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.185	4	3	12
186	Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi masih terbatas	ROO.22.01.01.186	3	3	9
187	Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung literasi di sekolah	ROO.22.01.01.187	3	3	9
188	Lemahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat	ROO.22.01.01.188	4	3	12
189	Belum optimalnya sistem penilaian dan monitoring capaian literasi	ROO.22.01.01.189	3	3	9
190	Rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca dan menulis	ROO.22.01.01.190	3	3	9
191	Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.191	4	3	12
192	Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran numerasi masih terbatas	ROO.22.01.01.192	3	3	9
193	Kurangnya sarana dan bahan ajar numerasi yang mendukung	ROO.22.01.01.193	3	3	9
194	Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika	ROO.22.01.01.194	3	3	9
195	Dukungan keluarga terhadap pembelajaran numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.195	3	3	9
196	Belum optimalnya sistem asesmen numerasi di sekolah	ROO.22.01.01.196	3	3	9
197	Rendahnya jumlah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik	ROO.22.01.01.197	3	3	9
198	Kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non -akademik	ROO.22.01.01.198	3	3	9
199	Rendahnya motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi siswa	ROO.22.01.01.199	4	3	12
200	Keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan kegiatan prestasi	ROO.22.01.01.200	3	3	9
201	Guru pembina dan pelatih belum memiliki kompetensi khusus	ROO.22.01.01.201	3	3	9
202	Tidak adanya sistem seleksi dan pemantauan prestasi siswa yang berkelanjutan	ROO.22.01.01.202	3	3	9
203	Ketidakseimbangan fokus antara prestasi akademik dan non-akademik	ROO.22.01.01.203	3	3	9
204	Rendahnya internalisasi nilai karakter di lingkungan sekolah	ROO.22.01.01.204	3	3	9
205	Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	ROO.22.01.01.205	3	3	9
206	Ketidakterpaduan antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter	ROO.22.01.01.206	3	3	9
207	Rendahnya kapasitas guru dalam menilai dan menumbuhkan karakter peserta didik	ROO.22.01.01.207	3	4	12
208	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter	ROO.22.01.01.208	3	3	9
209	Lemahnya budaya organisasi sekolah yang mendukung karakter baik	ROO.22.01.01.209	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
210	Rendahnya kondisi fisik sarana pendidikan	ROO.22.01.01.210	3	3	9
211	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.211	3	3	9
212	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.212	3	4	12
213	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.213	3	3	9
214	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.214	3	3	9
215	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.215	3	3	9
216	Data kondisi Prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.216	3	3	9
217	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan Prasarana	ROO.22.01.01.217	3	3	9
218	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.218	4	3	12
219	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.219	3	3	9
220	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.220	3	3	9
221	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.221	3	3	9
222	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.222	3	3	9
223	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.223	3	3	9
224	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.224	3	3	9
225	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.225	3	3	9
226	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.226	3	3	9
227	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.227	3	3	9
228	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.228	3	3	9
229	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.229	3	3	9
230	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.230	3	3	9
231	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.231	3	3	9
232	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.232	4	3	12
233	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.233	3	3	9
234	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.234	3	3	9
235	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.235	3	3	9
236	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.236	3	3	9
237	Rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tentang nilai kebhinekaan dan inklusifitas	ROO.22.01.01.237	3	3	9
238	Kurangnya penerapan prinsip inklusif di lembaga PAUD	ROO.22.01.01.238	3	3	9
239	Kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat terhadap penerapan kebhinekaan dan inklusifitas	ROO.22.01.01.239	3	3	9
240	Keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran yang mencerminkan nilai kebhinekaan	ROO.22.01.01.240	3	3	9
241	Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi nilai kebhinekaan dan inklusifitas di PAUD	ROO.22.01.01.241	3	3	9
242	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.242	3	4	12
243	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.243	3	3	9
244	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.244	3	3	9
245	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.245	3	3	9
246	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.246	3	3	9
247	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.247	3	3	9
248	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.248	4	3	12
249	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.249	3	3	9
250	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.250	3	3	9
251	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.251	3	3	9
252	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.252	3	3	9
253	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.253	3	3	9
254	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.254	3	3	9
255	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.255	3	3	9
256	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.256	3	4	12
257	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.257	3	3	9
258	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.258	3	3	9
259	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.259	3	3	9
260	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.260	3	3	9
261	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.261	3	3	9
262	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.262	3	3	9
263	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.263	3	3	9
264	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.264	4	3	12
265	Rendahnya minat Pondok Pesantren untuk menyelenggarakan program kesetaraan (Paket A, B, C)	ROO.22.01.01.265	3	3	9
266	Terbatasnya tenaga pendidik dan tutor yang kompeten untuk mengajar program kesetaraan di pesantren	ROO.22.01.01.266	3	3	9
267	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran kesetaraan di pesantren	ROO.22.01.01.267	3	3	9
268	Kendala perizinan dan administrasi penyelenggaraan program kesetaraan di pesantren	ROO.22.01.01.268	4	3	12
269	Kurangnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan pesantren kesetaraan	ROO.22.01.01.269	3	3	9
270	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.270	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
271	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.271	3	3	9
272	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.272	3	3	9
273	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.273	4	3	12
274	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.274	3	3	9
275	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.275	3	3	9
276	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.276	3	3	9
277	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.277	3	4	12
278	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.278	3	3	9
279	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.279	3	3	9
280	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.280	3	3	9
281	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.281	3	3	9
282	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.282	3	4	12
283	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.283	3	3	9
284	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.284	3	3	9
285	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.285	3	3	9
286	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.286	4	3	12
287	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.287	3	3	9
288	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.288	3	3	9
289	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.289	3	3	9
290	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.290	3	3	9
291	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.291	3	3	9
292	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.292	3	4	12
293	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.293	3	3	9
294	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.294	3	3	9
295	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.295	3	4	12
296	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.296	3	3	9
297	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.297	3	3	9
298	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.298	3	3	9
299	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.299	3	4	12
300	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.300	3	3	9
301	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.301	3	3	9
302	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.302	3	3	9
303	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.303	4	3	12
304	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.304	3	3	9
305	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.305	3	3	9
306	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.306	3	3	9
307	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.307	3	3	9
308	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.308	3	3	9
309	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.309	4	3	12
310	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.310	3	3	9
311	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.311	3	3	9
312	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.312	3	3	9
313	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.313	3	3	9
314	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.314	3	3	9
315	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.315	4	3	12
316	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.316	3	3	9
317	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.317	3	3	9
318	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.318	3	3	9
319	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.319	3	3	9
320	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.320	4	3	12
321	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.321	3	3	9
322	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.322	3	4	12
323	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.323	3	3	9
324	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.324	3	4	12
325	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.325	3	3	9
326	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.326	3	3	9
327	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.327	4	3	12
328	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.328	3	3	9
329	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.329	3	3	9
330	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.330	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
331	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.331	3	3	9
332	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.332	4	3	12
333	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.333	3	3	9
334	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.334	3	3	9
335	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.335	3	4	12
336	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.336	3	3	9
337	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.337	3	3	9
338	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.338	3	3	9
339	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.339	3	3	9
340	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.340	3	4	12
341	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.341	3	3	9
342	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.342	3	3	9
343	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.343	3	3	9
2. Risiko Operasional OPD Program Pengembangan Kurikulum					
344	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.344	3	3	9
345	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.345	3	3	9
346	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.346	3	4	12
347	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.347	3	3	9
348	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.348	3	3	9
349	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.349	3	3	9
350	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.350	3	3	9
351	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.351	3	3	9
352	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.352	3	4	12
353	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.353	3	3	9
354	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.354	3	3	9
355	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.355	3	3	9
356	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.356	3	3	9
357	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.357	3	3	9
358	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.358	3	3	9
359	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.359	3	4	12
2. Risiko Operasional OPD Kegiatan					
369	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.360	3	3	9
361	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.361	3	3	9
353	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.362	3	4	12
345	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.363	3	3	9
337	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.364	4	3	12
329	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.365	3	3	9
321	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.366	3	3	9
313	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.367	4	3	12
305	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.368	3	3	9
297	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.369	3	3	9
289	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.370	4	3	12
281	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.371	3	3	9
3. Risiko Operasional OPD Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
282	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.372	4	3	12
283	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.373	3	3	9
284	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.374	3	3	9
285	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.375	3	3	9
286	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.376	3	3	9
287	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.377	4	3	12
2. Risiko Operasional OPD Kegiatan					
288	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.378	3	4	12
289	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.379	3	3	9
290	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.380	3	3	9
291	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.381	3	3	9
292	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.382	4	3	12

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
293	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.383	3	3	9
294	Ketidakeimbangan sebaran guru antar satuan pendidikan	ROO.22.01.01.384	4	3	12
295	Ketidakeimbangan sebaran guru antar satuan pendidikan	ROO.22.01.01.385	3	3	9
296	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.386	3	3	9
297	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.387	3	3	9
298	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.388	4	3	12

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 2025 Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Rendahnya angka partisipasi murni dan kasar di jenjang SD dan SMP	RSP.22.01.01.01	12	Kepala Daerah	Anak usia sekolah tidak terdaftar di sekolah, lebih memilih jalur pendidikan	Program penarikan anak tidak sekolah (ATS) ke sekolah formal, kampanye wajib belajar
2	Masih adanya anak putus sekolah di jenjang SD dan SMP	RSP.22.01.01.02	12	Kepala Daerah	Faktor ekonomi, lokasi sekolah jauh, atau pernikahan usia dini	Intervensi sosial dan beasiswa bagi anak berisiko putus sekolah, serta penguatan peran sekolah dan guru BK
3	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dasar	RSP.22.01.01.03	9	Kepala Daerah	Ruang kelas tidak memadai, kondisi bangunan rusak, atau kekurangan fasilitas belajar	Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan RKB, dan pengadaan sarana pembelajaran
4	Kualitas layanan pembelajaran belum merata antar sekolah	RSP.22.01.01.04	12	Kepala Daerah	Kompetensi guru bervariasi, supervisi kurang optimal	Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, supervisi
5	Kendala ekonomi keluarga peserta didik	RSP.22.01.01.05	12	Kepala Daerah	Pendapatan rendah, tidak mampu menanggung biaya	Optimalisasi BOS, KIP, bantuan seragam dan transportasi
6	Akses sekolah sulit di daerah terpencil	RSP.22.01.01.06	12	Kepala Daerah	Lokasi geografis sulit dijangkau, belum tersedia unit sekolah	Pembangunan sekolah satelit, transportasi antar jemput, dan
7	Rendahnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak	RSP.22.01.01.07	9	Kepala Daerah	Orang tua kurang memahami pentingnya pendidikan jangka	Program parenting dan sosialisasi nilai pendidikan
8	Pendataan anak usia sekolah tidak bersekolah belum akurat	RSP.22.01.01.08	9	Kepala Daerah	Sinkronisasi data Dapodik dan data kependudukan belum	Integrasi data lintas instansi (Dapodik, Disdukcapil, Dinsos),
9	Rendahnya kesadaran gender dalam pendidikan dasar	RSP.22.01.01.09	9	Kepala Daerah	Anak perempuan lebih sering membantu pekerjaan rumah	Sosialisasi kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, serta
II Risiko Strategis OPD DINAS PENDIDIKAN						
1	Terjadinya pernikahan dini di usia sekolah	RSO.22.01.01.01	12	Kepala Dinas	Pola Pikir sebagian Masyarakat tentang manfaat pendidikan masih rendah	Mutu SDM dalam pembangunan cenderung rendah
2	Pilihan ke sekolah agama lebih dominan dibanding pada sekolah formal	RSO.22.01.01.02	9	Kepala Dinas	Karakter Sosial Budaya Masyarakat yang Religius	terkendala administrasi dalam melamar pekerjaan atau memasuki dunia kerja (formal)
3	Anak usia sekolah putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan	RSO.22.01.01.03	12	Kepala Dinas	Kurangnya motivasi belajar, tekanan sosial/keluarga, pernikahan dini	Angka partisipasi sekolah menurun dan ketimpangan akses pendidikan meningkat
4	Keterbatasan akses sekolah di daerah terpencil	RSO.22.01.01.04	12	Kepala Dinas	Jarak sekolah jauh, tidak tersedia transportasi umum, kondisi geografis sulit	Anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan
5	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar	RSO.22.01.01.05	9	Kepala Dinas	Rendahnya literasi masyarakat, pengaruh budaya lokal yang kurang mendukung sekolah	Orang tua tidak mendorong anak bersekolah, angka partisipasi stagnan
6	Data partisipasi sekolah tidak akurat atau tidak mutakhir	RSO.22.01.01.06	12	Kepala Dinas	Keterlambatan penginputan Dapodik, kesalahan pelaporan sekolah	Kebijakan intervensi tidak tepat sasaran, capaian SPM tidak terukur dengan benar
7	Kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan angka partisipasi	RSO.22.01.01.07	9	Kepala Dinas	Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pemerintah desa belum optimal	Program dukungan sosial pendidikan tidak tepat sasaran
8	Keterbatasan program pendidikan alternatif (Paket A, B, C)	RSO.22.01.01.08	12	Kepala Dinas	Dukungan anggaran dan fasilitas pendidikan nonformal terbatas	Anak usia sekolah yang tidak masuk sekolah formal tidak terlayani
9	Gangguan eksternal (bencana, pandemi, atau cuaca ekstrem)	RSO.22.01.01.09	9	Kepala Dinas	Penutupan sekolah, keterbatasan akses teknologi untuk belajar jarak jauh	Penurunan angka partisipasi dan keterlambatan belajar siswa
10	Ketidaktercapaian target indikator SPM pendidikan dasar	RSO.22.01.01.10	9	Kepala Dinas	Keterbatasan sarana prasarana, guru, dan dana pendidikan	Kinerja layanan pendidikan dasar menurun, SPM tidak tercapai
11	Rendahnya angka partisipasi sekolah usia wajib belajar (7–15 tahun)	RSO.22.01.01.11	12	Kepala Dinas	Faktor ekonomi, sosial, jarak sekolah jauh, dan rendahnya kesadaran masyarakat	Anak putus sekolah meningkat dan capaian indikator SPM menurun
12	Ketimpangan distribusi dan kualitas guru antar sekolah	RSO.22.01.01.12	9	Kepala Dinas	Guru menumpuk di wilayah perkotaan, minimnya guru di daerah terpencil	Kualitas pembelajaran tidak merata, capaian SPM tidak seimbang
13	Keterlambatan dan ketidakakuratan data pendidikan (Dapodik/SPM)	RSO.22.01.01.13	12	Kepala Dinas	Keterbatasan kompetensi operator sekolah dan lemahnya pembinaan	Data tidak valid, menghambat perencanaan dan pelaporan SPM

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
14	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	RSO.22.01.01.14	9	Kepala Dinas	Dana pembangunan terbatas, kondisi geografis sulit dijangkau	Layanan pendidikan tidak memenuhi standar minimal
15	Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	RSO.22.01.01.15	9	Kepala Dinas	Komunikasi lintas sektor belum efektif	Program SPM tidak sinergis antar unit dan kegiatan tumpang tindih
16	Ketidakpatuhan sekolah terhadap standar pelayanan minimal	RSO.22.01.01.16	9	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman sekolah terhadap regulasi SPM	Layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan nasional
17	Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung penerapan SPM	RSO.22.01.01.17	12	Kepala Dinas	Porsi APBD pendidikan belum mencukupi kebutuhan dasar	Program prioritas SPM tertunda atau tidak berjalan optimal
18	Rendahnya kapasitas dan komitmen SDM pelaksana SPM	RSO.22.01.01.18	9	Kepala Dinas	Kurangnya pelatihan dan pembinaan ASN pelaksana	Pelaksanaan program tidak efektif, akuntabilitas menurun
19	Keterlambatan pelaporan capaian SPM ke pemerintah pusat	RSO.22.01.01.19	9	Kepala Dinas	SDM terbatas, sistem pelaporan masih manual	Penilaian kinerja daerah menurun, hambatan dalam evaluasi nasional
20	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM belum optimal	RSO.22.01.01.20	12	Kepala Dinas	Belum ada instrumen dan pedoman Monev yang baku	Hambatan tidak terdeteksi dini, perbaikan lambat
21	Risiko penyimpangan dan inefisiensi pelaksanaan program SPM	RSO.22.01.01.21	9	Kepala Dinas	Lemahnya pengawasan internal dan budaya integritas ASN	Potensi penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, penurunan kepercayaan publik
22	Gangguan eksternal (bencana alam, pandemi, cuaca ekstrem)	RSO.22.01.01.22	9	Kepala Dinas	Kondisi geografis dan alam yang sulit diprediksi	Gangguan kegiatan belajar mengajar dan capaian layanan dasar
23	Kurangnya sosialisasi SPM kepada masyarakat	RSO.22.01.01.23	12	Kepala Dinas	Informasi hak dan kewajiban pendidikan belum tersampaikan	Masyarakat tidak menuntut hak atas layanan minimal
24	Tidak tersedianya pembelajaran alternatif di daerah khusus	RSO.22.01.01.24	9	Kepala Dinas	Minim guru dan sarana, akses sulit	Anak usia sekolah tidak terlayani
25	Kualitas perencanaan kinerja tidak selaras dengan tujuan strategis	RSO.22.01.01.25	12	Kepala Dinas	• Renstra/Renja belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome)	• Tujuan strategis tidak tercapai • Program tidak berdampak signifikan pada layanan publik
26	Pengukuran dan pelaporan kinerja tidak akurat	RSO.22.01.01.26	9	Kepala Dinas	• Data capaian indikator tidak valid • Pelaporan manual	• LKJIP tidak mencerminkan kondisi sebenarnya • Potensi temuan audit
27	Evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkelanjutan	RSO.22.01.01.27	9	Kepala Dinas	• Tidak ada jadwal evaluasi rutin • Hasil monitoring tidak ditindaklanjuti	• Perbaikan kinerja stagnan • Risiko kesalahan berulang • Program tidak efektif
28	Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja rendah	RSO.22.01.01.28	12	Kepala Dinas	• Hasil evaluasi tidak dijadikan dasar perencanaan • Keputusan tidak berbasis	• Program tidak efisien • Arah kebijakan tidak berbasis hasil
29	Komitmen pimpinan dan pegawai belum optimal	RSO.22.01.01.29	9	Kepala Dinas	• SAKIP dianggap administratif • Budaya kerja belum berbasis kinerja	• Implementasi tidak berkelanjutan • Akuntabilitas rendah
30	Sistem informasi akuntabilitas belum memadai	RSO.22.01.01.30	9	Kepala Dinas	• Tidak ada integrasi antar bidang • Infrastruktur TI terbatas	• Pelaporan lambat • Data rentan kesalahan • Tidak efisien
31	Ketidaksinambungan antar dokumen perencanaan dan pelaporan	RSO.22.01.01.31	12	Kepala Dinas	• Dokumen Renstra, Renja, PK, LKJIP tidak konsisten • Perubahan indikator tidak	• Integrasi dokumen rendah • Potensi temuan audit • Penurunan nilai SAKIP
III	1. Risiko Operasional OPD Program Pengelolaan Pendidikan	0	0			
1	Rendahnya capaian satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai SNP	ROO.22.01.01.01	9	Kabid Sarana Prasarana	• Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pengadaan sarana pembelajaran • Ketergantungan tinggi terhadap bantuan pusat (DAK, BOS, dan hibah) • Ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan kebutuhan sarana	• Tidak tercapainya target SNP bidang sarana prasarana • Kualitas proses pembelajaran menurun • Penurunan indeks mutu pendidikan daerah
2	Ketidaksesuaian antara sarana pembelajaran yang dimiliki sekolah dengan standar SNP	ROO.22.01.01.02	9	Kabid Sarana Prasarana	• Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan operator terhadap kriteria sarana sesuai SNP	• Data capaian SNP tidak akurat • Sekolah tidak memenuhi standar mutu nasional
3	Rendahnya capaian satuan pendidikan yang memiliki Prasarana	ROO.22.01.01.03	12	Kabid Sarana Prasarana	• Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk	• Tidak tercapainya target SNP bidang Prasarana prasarana
4	Ketidaksesuaian antara Prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah dengan standar SNP	ROO.22.01.01.04	9	Kabid Sarana Prasarana	• Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan operator terhadap kriteria Prasarana sesuai SNP	• Data capaian SNP tidak akurat • Sekolah tidak memenuhi standar mutu nasional
5	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.05	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	• Belum optimalnya pemutakhiran data Dapodik dan pendataan lapangan	• Perencanaan program menjadi tidak tepat sasaran • Kebijakan tidak berbasis data

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
6	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.06	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Program antar-OPD belum sinergis (Dinas Pendidikan, Sosial, PPPA, Tenaga Kerja, dan Desa) 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya penanganan ATS berjalan parsial dan tumpang tindih Rendahnya efektivitas program
7	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.07	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pendampingan berkelanjutan bagi anak yang telah kembali ke sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ATS kembali putus sekolah Menurunnya efektivitas program penarikan ATS
8	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.08	12	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemutakhiran data Dapodik dan pendataan lapangan Lemahnya koordinasi antarinstansi (Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinsos, Bappeda) Tidak ada sistem integrasi data pendidikan berbasis wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan program menjadi tidak tepat sasaran Kebijakan tidak berbasis data faktual Sulit memantau efektivitas penurunan ATS
9	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.09	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Program antar-OPD belum sinergis (Dinas Pendidikan, Sosial, PPPA, Tenaga Kerja, dan Desa) Tidak ada forum koordinasi rutin Belum ada regulasi daerah khusus percepatan penurunan ATS 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya penanganan ATS berjalan parsial dan tumpang tindih Rendahnya efektivitas program lintas sektor
10	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.10	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pendampingan berkelanjutan bagi anak yang telah kembali ke sekolah Kurangnya koordinasi antara sekolah, pemerintah desa, dan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> ATS kembali putus sekolah Menurunnya efektivitas program penarikan ATS Tidak tercapainya target indikator RPJMD
11	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.11	12	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemutakhiran data Dapodik dan pendataan lapangan Lemahnya koordinasi antarinstansi (Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinsos, Bappeda) Tidak ada sistem integrasi data pendidikan berbasis wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan program menjadi tidak tepat sasaran Kebijakan tidak berbasis data faktual Sulit memantau efektivitas penurunan ATS
12	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.12	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Program antar-OPD belum sinergis (Dinas Pendidikan, Sosial, PPPA, Tenaga Kerja, dan Desa) Tidak ada forum koordinasi rutin Belum ada regulasi daerah khusus percepatan penurunan ATS 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya penanganan ATS berjalan parsial dan tumpang tindih Rendahnya efektivitas program lintas sektor
13	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.13	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pendampingan berkelanjutan bagi anak yang telah kembali ke sekolah Kurangnya koordinasi antara sekolah, pemerintah desa, dan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> ATS kembali putus sekolah Menurunnya efektivitas program penarikan ATS Tidak tercapainya target indikator RPJMD
14	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.14	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah Kurangnya supervisi dari pengawas Keterbatasan kemampuan kepala sekolah dalam manajemen berbasis mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai akreditasi sekolah rendah Sekolah tidak mencapai minimal peringkat B Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah
15	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.15	12	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana sesuai SNP Ketimpangan antara sekolah di wilayah kota dan terpencil Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai akreditasi menurun Sekolah sulit mencapai standar akreditasi B Kualitas pembelajaran terganggu
16	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.16	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio guru tidak seimbang Kurangnya guru bersertifikat pendidik Minimnya pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian akreditasi menurun pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan Kualitas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
17	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.17	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan	- Sekolah tidak rutin memperbarui dokumen administrasi - Lemahnya sistem dokumentasi	- Penilaian akreditasi menjadi rendah - Sekolah gagal naik peringkat akreditasi
18	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.18	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah - Kurangnya supervisi dari	- Nilai akreditasi sekolah rendah- Sekolah tidak mencapai minimal peringkat B - Penurunan
19	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.19	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana sesuai SNP - Ketimpangan antara sekolah di	- Nilai akreditasi menurun - Sekolah sulit mencapai standar akreditasi B - Kualitas
20	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.20	12	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	Rasio guru tidak seimbang- Kurangnya guru bersertifikat pendidik- Minimnya pelatihan	- Penilaian akreditasi menurun pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan - Kualitas
21	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.21	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Sekolah tidak rutin memperbarui dokumen administrasi - Lemahnya sistem dokumentasi	- Penilaian akreditasi menjadi rendah - Sekolah gagal naik peringkat akreditasi
22	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.22	9	Kabid. Pembinaan Sekolah	- Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah - Kurangnya supervisi dari	- Nilai akreditasi sekolah rendah- Sekolah tidak mencapai minimal peringkat B - Penurunan
23	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.23	9	Kabid. Pembinaan Sekolah	- Minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana sesuai SNP - Ketimpangan antara sekolah di	- Nilai akreditasi menurun - Sekolah sulit mencapai standar akreditasi B - Kualitas
24	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.24	9	Kabid. Pembinaan Sekolah	Rasio guru tidak seimbang- Kurangnya guru bersertifikat pendidik- Minimnya pelatihan	- Penilaian akreditasi menurun pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan - Kualitas
25	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.25	9	Kabid. Pembinaan Sekolah	- Sekolah tidak rutin memperbarui dokumen administrasi - Lemahnya sistem dokumentasi	- Penilaian akreditasi menjadi rendah - Sekolah gagal naik peringkat akreditasi
26	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.26	12	Kabid. Pembinaan Pendidikan	- Kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan program sekolah - Kurangnya supervisi dari	- Nilai akreditasi sekolah rendah- Sekolah tidak mencapai minimal peringkat B - Penurunan
27	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.27	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan	- Minimnya anggaran untuk pemenuhan sarana sesuai SNP - Ketimpangan antara sekolah di	- Nilai akreditasi menurun - Sekolah sulit mencapai standar akreditasi B - Kualitas
28	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.28	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan	Rasio guru tidak seimbang- Kurangnya guru bersertifikat pendidik- Minimnya pelatihan	- Penilaian akreditasi menurun pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan - Kualitas
29	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.29	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan	- Sekolah tidak rutin memperbarui dokumen administrasi - Lemahnya sistem dokumentasi	- Penilaian akreditasi menjadi rendah - Sekolah gagal naik peringkat akreditasi
30	Kualitas pembelajaran literasi belum optimal	ROO.22.01.01.30	12	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Guru belum menguasai metode pembelajaran literasi berbasis teks dan konteks- Pembelajaran masih	- Pembelajaran tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis- Hasil asesmen
31	Keterbatasan sarana dan sumber belajar literasi	ROO.22.01.01.31	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Koleksi buku perpustakaan tidak memadai- Tidak tersedia bahan bacaan digital- Minimnya fasilitas	- Siswa kurang terpapar bahan bacaan- Motivasi membaca menurun- Hasil literasi tidak optimal
32	Rendahnya dukungan keluarga terhadap pengembangan literasi	ROO.22.01.01.32	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya literasi- Tidak ada kebiasaan membaca	- Literasi anak tidak berkembang di luar sekolah- Timpang hasil belajar antar peserta didik
33	Kurangnya integrasi kebijakan literasi antar jenjang dan antar instansi	ROO.22.01.01.33	12	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Program literasi berjalan sektoral dan tidak sinkron- Tidak ada indikator literasi dalam Rencana	- Program literasi tidak berkelanjutan- Hasil peningkatan literasi sulit diukur
	Faktor sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik	ROO.22.01.01.34	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Siswa dari keluarga kurang mampu memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan dan	- Ketimpangan capaian literasi antarwilayah dan kelompok sosial- Nilai rata-rata literasi daerah
	Kualitas pembelajaran numerasi belum optimal	ROO.22.01.01.35	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Guru belum menguasai pendekatan pembelajaran numerasi berbasis pemecahan	- Siswa pasif dan tidak memahami penerapan konsep- Rendahnya kemampuan berpikir logis dan
	Kurangnya sarana dan sumber belajar numerasi	ROO.22.01.01.36	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Fasilitas laboratorium matematika tidak tersedia- Ketersediaan alat peraga dan media numerasi	- Siswa sulit memahami konsep abstrak matematika- Pembelajaran kurang menarik- Capaian numerasi
	Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap numerasi	ROO.22.01.01.37	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Anggapan bahwa matematika adalah pelajaran sulit- Metode pembelajaran kurang menarik-	- Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan numerasi rendah- Capaian hasil belajar menurun
	Dukungan keluarga dan lingkungan terhadap numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.38	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Orang tua kurang memahami pentingnya numerasi- Kurangnya aktivitas berhitung di rumah-	- Perkembangan kemampuan numerasi tidak berkelanjutan di luar sekolah- Perbedaan capaian antar
	Kebijakan sekolah dan daerah belum fokus pada peningkatan numerasi	ROO.22.01.01.39	12	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Tidak ada target capaian numerasi dalam RKS/RKPD- Lemahnya koordinasi antar bidang	- Program peningkatan numerasi tidak berkelanjutan- Rendahnya efektivitas intervensi kebijakan
	Faktor sosial ekonomi dan ketimpangan wilayah mempengaruhi kemampuan numerasi	ROO.22.01.01.40	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Akses sumber belajar rendah di daerah terpencil- Latar belakang ekonomi keluarga rendah-	- Ketimpangan capaian numerasi antar wilayah dan sekolah- Penurunan rata-rata numerasi
	Perilaku peserta didik dipengaruhi lingkungan sosial negatif	ROO.22.01.01.41	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Lingkungan keluarga dan pergaulan tidak kondusif- Paparan media sosial yang tidak terkontrol-	- Perilaku menyimpang meningkat- Rendahnya disiplin, tanggung jawab, dan empati peserta didik
	Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter	ROO.22.01.01.42	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Guru belum mengikuti pelatihan penguatan karakter- Pemahaman terhadap asesmen karakter masih	- Penilaian karakter tidak optimal- Nilai rerata karakter tidak menggambarkan kondisi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif	ROO.22.01.01.43	9	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan rutin- Minimnya pembimbing atau sarana kegiatan-	- Kesempatan pengembangan karakter siswa terbatas- Siswa kurang disiplin, tanggung jawab,
	Lemahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter	ROO.22.01.01.44	9	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Komunikasi sekolah-orang tua belum intensif- Orang tua kurang memahami pentingnya pendidikan	- Pembentukan karakter anak tidak berkesinambungan- Penurunan hasil penilaian karakter di sekolah
	Sistem penilaian karakter belum terimplementasi secara baik	ROO.22.01.01.45	12	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Guru kesulitan menilai aspek sikap dan perilaku secara objektif- Tidak ada panduan penilaian	- Nilai karakter tidak valid dan tidak mencerminkan perilaku nyata- Kesulitan dalam pemantauan
	Kurangnya dukungan kebijakan dan monitoring dari Dinas Pendidikan	ROO.22.01.01.46	9	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	- Belum ada indikator karakter dalam evaluasi kinerja sekolah- Pembinaan sekolah lebih fokus	- Program penguatan karakter tidak menjadi prioritas- Nilai rerata karakter tidak meningkat secara
	Kualitas pembelajaran literasi belum optimal	ROO.22.01.01.47	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Guru belum menguasai metode pembelajaran literasi berbasis teks dan konteks- Pembelajaran masih	- Pembelajaran tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis- Hasil asesmen
	Keterbatasan sarana dan sumber belajar literasi	ROO.22.01.01.48	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Koleksi buku perpustakaan tidak memadai- Tidak tersedia bahan bacaan digital- Minimnya fasilitas	- Siswa kurang terpapar bahan bacaan- Motivasi membaca menurun- Hasil literasi tidak optimal
	Rendahnya dukungan keluarga terhadap pengembangan literasi	ROO.22.01.01.49	12	Kabid Pembinaan Sekolah	- Kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya literasi- Tidak ada kebiasaan membaca	- Literasi anak tidak berkembang di luar sekolah- Timpang hasil belajar antar peserta didik
	Kurangnya integrasi kebijakan literasi antar jenjang dan antar instansi	ROO.22.01.01.50	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Program literasi berjalan sektoral dan tidak sinkron- Tidak ada indikator literasi dalam Rencana	- Program literasi tidak berkelanjutan- Hasil peningkatan literasi sulit diukur
	Faktor sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik	ROO.22.01.01.51	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Siswa dari keluarga kurang mampu memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan dan	- Ketimpangan capaian literasi antarwilayah dan kelompok sosial- Nilai rata-rata literasi daerah
	Kualitas pembelajaran numerasi belum optimal	ROO.22.01.01.52	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Guru belum menguasai pendekatan pembelajaran numerasi berbasis pemecahan	- Siswa pasif dan tidak memahami penerapan konsep- Rendahnya kemampuan berpikir logis dan
	Kurangnya sarana dan sumber belajar numerasi	ROO.22.01.01.53	12	Kabid Pembinaan Sekolah	- Fasilitas laboratorium matematika tidak tersedia- Ketersediaan alat peraga dan media numerasi	- Siswa sulit memahami konsep abstrak matematika- Pembelajaran kurang menarik- Capaian numerasi
	Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap numerasi	ROO.22.01.01.54	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Anggapan bahwa matematika adalah pelajaran sulit- Metode pembelajaran kurang menarik-	- Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan numerasi rendah- Capaian hasil belajar menurun
	Dukungan keluarga dan lingkungan terhadap numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.55	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Orang tua kurang memahami pentingnya numerasi- Kurangnya aktivitas berhitung di rumah-	- Perkembangan kemampuan numerasi tidak berkelanjutan di luar sekolah- Perbedaan capaian antar
	Kebijakan sekolah dan daerah belum fokus pada peningkatan numerasi	ROO.22.01.01.56	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Tidak ada target capaian numerasi dalam RKS/RKPD- Lemahnya koordinasi antar bidang	- Program peningkatan numerasi tidak berkelanjutan- Rendahnya efektivitas intervensi kebijakan
	Faktor sosial ekonomi dan ketimpangan wilayah mempengaruhi kemampuan numerasi	ROO.22.01.01.57	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Akses sumber belajar rendah di daerah terpencil- Latar belakang ekonomi keluarga rendah-	- Ketimpangan capaian numerasi antar wilayah dan sekolah- Penurunan rata-rata numerasi
	Perilaku peserta didik dipengaruhi lingkungan sosial negatif	ROO.22.01.01.58	12	Kabid Pembinaan Sekolah	- Lingkungan keluarga dan pergaulan tidak kondusif- Paparan media sosial yang tidak terkontrol-	- Perilaku menyimpang meningkat- Rendahnya disiplin, tanggung jawab, dan empati peserta didik
	Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter	ROO.22.01.01.59	12	Kabid Pembinaan Sekolah	- Guru belum mengikuti pelatihan penguatan karakter- Pemahaman terhadap asesmen karakter masih	- Penilaian karakter tidak optimal- Nilai rerata karakter tidak menggambarkan kondisi
	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif	ROO.22.01.01.60	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan rutin- Minimnya pembimbing atau sarana kegiatan-	- Kesempatan pengembangan karakter siswa terbatas- Siswa kurang disiplin, tanggung jawab,
	Lemahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter	ROO.22.01.01.61	12	Kabid Pembinaan Sekolah	- Komunikasi sekolah-orang tua belum intensif- Orang tua kurang memahami pentingnya pendidikan	- Pembentukan karakter anak tidak berkesinambungan- Penurunan hasil penilaian karakter di sekolah
	Sistem penilaian karakter belum terimplementasi secara baik	ROO.22.01.01.62	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Guru kesulitan menilai aspek sikap dan perilaku secara objektif- Tidak ada panduan penilaian	- Nilai karakter tidak valid dan tidak mencerminkan perilaku nyata- Kesulitan dalam pemantauan
	Kurangnya dukungan kebijakan dan monitoring dari Dinas Pendidikan	ROO.22.01.01.63	9	Kabid Pembinaan Sekolah	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan	- Sarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses
IV	1. Risiko Operasional OPD Kegiatan					
	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.64	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata	- Kesalahan perencanaan kebutuhan sarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi
	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.65	12	Kepala Seksi Sarpras SD	- Tidak ada SOP pemeliharaan sarana - Keterbatasan tenaga teknis	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.66	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit
	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.67	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.68	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan	- Prasarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses
	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.69	12	Kepala Seksi Sarpras SD	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata	- Kesalahan perencanaan kebutuhan prasarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi
	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.70	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Tidak ada SOP pemeliharaan prasarana - Keterbatasan tenaga teknis	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap
	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.71	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses - Distribusi bantuan tidak merata	- Disparitas mutu layanan pendidikan - Sekolah di daerah tertinggal sulit
	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.72	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat - Pelaksanaan pengadaan tidak	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah - Potensi pemborosan anggaran
	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.73	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Pendataan tidak dilakukan secara rutin - Kurangnya koordinasi antara	- Siswa tidak mampu tidak mendapat bantuan - Program intervensi tidak tepat
	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.74	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Mekanisme seleksi penerima bantuan belum optimal - Koordinasi antar instansi lemah	- Siswa tetap mengalami kesulitan ekonomi - Risiko putus sekolah meningkat
	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.75	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Tingkat pendidikan orang tua rendah - Anak dilibatkan dalam pekerjaan	- Anak tidak mampu tidak disekolahkan - Tingkat kehadiran siswa rendah
	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.76	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal- Kondisi sarana rusak atau tidak layak- Guru	- Anak dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah - Ketimpangan akses pendidikan
	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.77	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Tidak ada koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Bappeda, dll.) - Program bantuan bersifat	- Penurunan capaian persentase siswa tidak mampu bersekolah - Program tidak berdampak jangka
	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.78	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Pendapatan keluarga menurun tajam - Fokus keluarga pada kebutuhan	- Kenaikan angka anak tidak sekolah dari keluarga miskin - Gangguan keberlanjutan belajar
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.79	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga	- Guru kesulitan mengatur waktu karena beban kerja tinggi - Kurangnya motivasi mengikuti	- Capaian indikator tidak terpenuhi - Kompetensi guru stagnan - Kualitas pembelajaran menurun
	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.80	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga	- Materi tidak kontekstual dengan kebutuhan lapangan - Narasumber tidak sesuai bidang	- Pelatihan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi nyata - Efektivitas program rendah
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.81	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Jumlah pengawas dan widyaiswara terbatas - Distribusi pengawas tidak merata	- Guru kekurangan pendampingan profesional - Hasil pelatihan tidak berkelanjutan
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.82	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Literasi digital guru masih rendah- Fasilitas TIK di sekolah belum memadai- Tidak ada	- Pembelajaran kurang inovatif dan interaktif - Ketertinggalan
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.83	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Data pelatihan guru tidak terdokumentasi dengan baik - Belum ada sistem pelaporan capaian pelatihan - Tidak ada indikator kinerja yang terukur	- Kesulitan menilai capaian indikator - Pengambilan keputusan tidak berbasis data
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.84	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Kepala sekolah belum memahami perannya sebagai supervisor akademik	- Guru kurang termotivasi untuk berkembang - Pelatihan tidak diikuti dengan
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.85	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.86	9	Kepala Seksi PAUD	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.87	9	Kepala Seksi PAUD	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.88	12	Kepala Seksi PAUD	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.89	9	Kepala Seksi PAUD	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip,	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.90	9	Kepala Seksi PAUD	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggisekolah.	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.91	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	- Potensi temuan audit - Ketidapatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.92	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen
	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.93	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan
	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.94	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip,	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program
	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.95	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik
	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.96	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau
	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.97	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan
	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.98	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan
	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.99	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar)	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara
	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.100	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidaknyamanan bagi
	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.101	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan
	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.102	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.103	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif	- Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan
	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.104	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.105	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.106	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi
	Rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.107	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah
	Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi masih terbatas	ROO.22.01.01.108	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru
	Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung literasi di sekolah	ROO.22.01.01.109	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua	- Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar
	Lemahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat	ROO.22.01.01.110	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi
	Belum optimalnya sistem penilaian dan monitoring capaian literasi	ROO.22.01.01.111	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Pembelajaran bahasa dan literasi belum efektif - Minimnya pembiasaan membaca	- Nilai literasi tidak meningkat - Sekolah gagal mencapai kategori "Nilai Literasi Baik"

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca dan menulis	ROO.22.01.01.11 2	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Guru belum memahami strategi pengajaran literasi berbasis teks - Minimnya pelatihan tentang	- Pembelajaran tidak menumbuhkan keterampilan membaca dan memahami makna
	Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.11 3	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Perpustakaan sekolah tidak aktif atau koleksi terbatas Tidak tersedia ruang baca atau	- Rendahnya minat baca siswa - Kegiatan literasi tidak berkelanjutan
	Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran numerasi masih terbatas	ROO.22.01.01.11 4	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Orang tua kurang terlibat dalam pembiasaan membaca Tidak ada sinergi program literasi	- Literasi siswa hanya tumbuh di lingkungan sekolah - Kemampuan membaca kritis
	Kurangnya sarana dan bahan ajar numerasi yang mendukung	ROO.22.01.01.11 5	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Tidak adanya instrumen evaluasi literasi yang baku - Sekolah tidak rutin mengukur	- Data capaian literasi tidak akurat - Kebijakan peningkatan literasi sulit disusun
	Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika	ROO.22.01.01.11 6	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Pembelajaran terlalu berorientasi pada ujian - Aktivitas literasi tidak menarik	- Kemampuan berpikir kritis dan reflektif rendah - Nilai literasi stagnan
	Dukungan keluarga terhadap pembelajaran numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.11 7	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Pembelajaran matematika berfokus pada hafalan rumus, bukan pemahaman konsep	- Nilai numerasi rendah pada asesmen nasional - Sekolah gagal mencapai kategori
	Belum optimalnya sistem asesmen numerasi di sekolah	ROO.22.01.01.11 8	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Kurangnya pelatihan dan pendampingan guru dalam strategi numerasi	Pembelajaran tidak menarik dan tidak menumbuhkan pemikiran matematis siswa
	Rendahnya jumlah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik	ROO.22.01.01.11 9	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Keterbatasan buku, lembar kerja, atau alat bantu numerasi - Tidak tersedia media digital	- Aktivitas belajar kurang variatif - Siswa kesulitan memahami konsep abstrak
	Kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non -akademik	ROO.22.01.01.12 0	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Anggapan bahwa matematika sulit dan menakutkan - Kurangnya metode pembelajaran	- Sikap negatif terhadap pelajaran matematika - Penurunan hasil belajar numerasi
	Rendahnya motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi siswa	ROO.22.01.01.12 1	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Orang tua kurang memahami pentingnya numerasi dalam kehidupan sehari-hari	- Tidak terbentuk budaya belajar numerasi di rumah - Ketimpangan capaian numerasi
	Keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan kegiatan prestasi	ROO.22.01.01.12 2	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Sekolah belum memiliki instrumen evaluasi numerasi non-tes	- Data capaian numerasi tidak akurat - Kebijakan peningkatan numerasi
	Guru pembina dan pelatih belum memiliki kompetensi khusus	ROO.22.01.01.12 3	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Pembelajaran belum berbasis diferensiasi dan pengayaan- Kurangnya program pembinaan	- Target indikator prestasi akademik tidak tercapai
	Tidak adanya sistem seleksi dan pemantauan prestasi siswa yang berkelanjutan	ROO.22.01.01.12 4	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Jadwal kegiatan ekstrakurikuler tidak teratur - Kegiatan non - akademik tidak	- Potensi siswa tidak berkembang optimal - Penurunan motivasi dan kreativitas
	Ketidakeimbangan fokus antara prestasi akademik dan non-akademik	ROO.22.01.01.12 5	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua - Orang tua lebih fokus pada	Siswa tidak mendapat dukungan moral dan material untuk mengikuti lomba atau kegiatan prestasi
	Rendahnya internalisasi nilai karakter di lingkungan sekolah	ROO.22.01.01.12 6	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Anggaran sekolah belum mengalokasikan dana untuk pembinaan prestasi	- Tidak semua siswa berbakat mendapat kesempatan pembinaan - Sekolah sulit mengirim peserta ke
	Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	ROO.22.01.01.12 7	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Tidak ada pelatihan bagi guru pembina lomba - Guru tidak memiliki pengalaman	- Pembinaan tidak efektif - Prestasi siswa tidak berkembang signifikan
	Ketidakterpaduan antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter	ROO.22.01.01.12 8	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Data prestasi siswa tidak terdokumentasi - Tidak ada indikator penilaian	- Kesempatan pengembangan bakat tidak merata - Siswa berpotensi tinggi tidak
	Rendahnya kapasitas guru dalam menilai dan menumbuhkan karakter peserta didik	ROO.22.01.01.12 9	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Sekolah lebih menekankan aspek akademik dalam evaluasi kinerja - Kurangnya pemahaman tentang	- Pengembangan karakter, kreativitas, dan kepemimpinan siswa terhambat
	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter	ROO.22.01.01.13 0	9	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Pembelajaran nilai karakter tidak terintegrasi dalam kurikulum - Guru belum memahami strategi	- Penurunan sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati siswa - Rendahnya hasil penilaian
	Lemahnya budaya organisasi sekolah yang mendukung karakter baik	ROO.22.01.01.13 1	12	Kepala Seksi Peserta Didik dan	- Minim komunikasi antara sekolah dan orang tua - Pengawasan perilaku anak di	- Ketidakkonsistenan nilai antara di sekolah dan di rumah - Rendahnya efektivitas pendidikan
16	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.13 2	9	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Fokus guru pada capaian akademik - Kegiatan pembiasaan positif tidak terstruktur Evaluasi karakter tidak dilakukan secara konsisten	- Pendidikan karakter hanya bersifat formalitas - Nilai karakter siswa tidak meningkat signifikan
17	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.13 3	9	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada pelatihan penilaian sikap dan karakter - Guru belum mampu memberikan umpan balik pembentukan karakter	- Hasil penilaian karakter tidak objektif atau tidak akurat - Penurunan kualitas pembinaan karakter di sekolah
18	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.13 4	12	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Kegiatan ekstrakurikuler belum rutin atau tidak menarik - Fasilitas dan pembina terbatas	- Siswa kurang terlatih dalam kerja sama, tanggung jawab, dan disiplin - Tidak tercapai indikator karakter unggul

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
19	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.13 5	9	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Kepala sekolah belum berperan aktif sebagai role model - Tidak ada sistem penghargaan dan sanksi yang adil	- Nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab tidak tertanam kuat - Menurunnya kredibilitas sekolah
19	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.13 6	9	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua - Minimnya anggaran perawatan - Kerusakan akibat bencana alam atau vandalisme	- Sarana tidak dapat digunakan secara optimal - Menurunnya kualitas proses pembelajaran - Ketidakyamanan bagi peserta didik dan guru
19	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.13 7	12	Kepala Seksi Sarpras SD	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai kondisi nyata - Kurangnya verifikasi lapangan oleh dinas - Kapasitas operator sekolah terbatas	- Kesalahan perencanaan kebutuhan sarana - Tidak tepat sasaran dalam alokasi bantuan - Akuntabilitas data rendah
19	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.13 8	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Tidak ada SOP pemeliharaan sarana - Keterbatasan tenaga teknis sekolah - Kurangnya pengawasan dari kepala sekolah	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun - Biaya perbaikan meningkat setiap tahun
19	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan	ROO.22.01.01.13 9	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses	- Disparitas mutu layanan pendidikan
19	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.14 0	12	Kepala Seksi Sarpras SD	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah
19	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.14 1	9	Kepala Seksi Sarpras SD	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua	- Prasarana tidak dapat digunakan secara optimal
19	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.14 2	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai	- Kesalahan perencanaan kebutuhan prasarana
19	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.14 3	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Tidak ada SOP pemeliharaan prasarana	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun
19	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.14 4	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses	- Disparitas mutu layanan pendidikan
19	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau	ROO.22.01.01.14 5	12	Kepala Seksi Peserta Didik	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah
19	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.14 6	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Pendataan tidak dilakukan secara rutin	- Siswa tidak mampu tidak mendapat bantuan
19	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan	ROO.22.01.01.14 7	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Mekanisme seleksi penerima bantuan belum optimal	- Siswa tetap mengalami kesulitan ekonomi - Risiko
19	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.14 8	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Tingkat pendidikan orang tua rendah - Anak dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga atau mencari nafkah - Kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan wajib 12 tahun	- Anak tidak mampu tidak disekolahkan - Tingkat kehadiran siswa rendah - Rendahnya angka partisipasi murni (APM)
19	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.14 9	12	Kepala Seksi Pendidik dan	- Tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal- Kondisi sarana	- Anak dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah
19	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan	ROO.22.01.01.15 0	9	Kepala Seksi Pendidik dan	- Tidak ada koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Bappeda, dll.)	- Penurunan capaian persentase siswa tidak mampu bersekolah
19	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.15 1	9	Kepala Seksi Pendidik dan	- Pendapatan keluarga menurun tajam	- Kenaikan angka anak tidak sekolah dari keluarga miskin
19	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.15 2	12	Kepala Seksi Pendidik dan	- Guru kesulitan mengatur waktu karena beban kerja tinggi	- Capaian indikator tidak terpenuhi - Kompetensi guru stagnan
19	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.15 3	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Materi tidak kontekstual dengan kebutuhan lapangan - Narasumber tidak sesuai bidang - Tidak ada evaluasi hasil pelatihan	- Pelatihan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi nyata - Efektivitas program rendah
19	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.15 4	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Jumlah pengawas dan widyaiswara terbatas - Distribusi pengawas tidak merata - Pembinaan jarang dilakukan secara tatap muka	- Guru kekurangan pendampingan profesional - Hasil pelatihan tidak berkelanjutan
19	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.15 5	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital guru masih rendah- Fasilitas TIK di sekolah belum memadai- Tidak ada pendampingan penggunaan aplikasi pembelajaran	- Pembelajaran kurang inovatif dan interaktif - Ketertinggalan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
19	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.15 6	12	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Data pelatihan guru tidak terdokumentasi dengan baik	- Kesulitan menilai capaian indikator -
19	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.15 7	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Kepala sekolah belum memahami perannya sebagai	- Guru kurang termotivasi untuk berkembang -
19	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.15 8	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
19	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.15 9	9	Kepala Seksi PAUD	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	- Potensi temuan audit - Ketidapatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah
19	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan	ROO.22.01.01.16 0	12	Kepala Seksi PAUD	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah,	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan
19	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.16 1	9	Kepala Seksi PAUD	- Pergantian bendahara yang terlalu sering	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS -
19	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.16 2	9	Kepala Seksi PAUD	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau
19	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.16 3	9	Kepala Seksi PAUD	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi/sekolah.	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
19	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.16 4	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	- Potensi temuan audit - Ketidapatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah
19	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan	ROO.22.01.01.16 5	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah,	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan
19	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.16 6	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS -
19	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.16 7	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau
19	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.16 8	12	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain
19	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.16 9	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan lemah - Evaluasi pelaporan tidak dilakukan rutin	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau tidak lengkap
19	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.17 0	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau
19	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap	ROO.22.01.01.17 1	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran -
19	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan	ROO.22.01.01.17 2	12	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar
19	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik	ROO.22.01.01.17 3	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Pengawasan perilaku siswa kurang -	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman -
19	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.17 4	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah -
19	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung	ROO.22.01.01.17 5	12	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur -
19	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim	ROO.22.01.01.17 6	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan
19	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.17 7	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik
19	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolah/sekolah ramah	ROO.22.01.01.17 8	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa
19	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta	ROO.22.01.01.17 9	12	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.)	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar
19	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.18 0	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Belum ada rencana tanggap darurat	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan
19	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.18 1	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
19	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik)	ROO.22.01.01.18 2	12	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi
19	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah	ROO.22.01.01.18 3	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah
19	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan	ROO.22.01.01.18 4	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Pembelajaran bahasa dan literasi belum efektif	- Nilai literasi tidak meningkat - Sekolah gagal mencapai kategori
19	Rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.18 5	12	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Guru belum memahami strategi pengajaran literasi berbasis teks	- Pembelajaran tidak menumbuhkan keterampilan
19	Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi masih terbatas	ROO.22.01.01.18 6	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Perpustakaan sekolah tidak aktif atau koleksi terbatas	- Rendahnya minat baca siswa - Kegiatan literasi tidak
19	Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung literasi di sekolah	ROO.22.01.01.18 7	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Orang tua kurang terlibat dalam membiasakan membaca	- Literasi siswa hanya tumbuh di lingkungan sekolah
19	Lemahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat	ROO.22.01.01.18 8	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Tidak adanya instrumen evaluasi literasi yang baku - Sekolah tidak rutin mengukur perkembangan kemampuan literasi	- Data capaian literasi tidak akurat - Kebijakan peningkatan literasi sulit disusun
19	Belum optimalnya sistem penilaian dan monitoring capaian literasi	ROO.22.01.01.18 9	9	Kepala Seksi Kurikulum dan	- Pembelajaran terlalu berorientasi pada ujian	- Kemampuan berpikir kritis dan reflektif rendah -Nilai
19	Rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca dan menulis	ROO.22.01.01.19 0	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Pembelajaran matematika berfokus pada hafalan rumus,	- Nilai numerasi rendah pada asesmen nasional -
19	Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.19 1	12	Kepala Seksi Peserta Didik	- Kurangnya pelatihan dan pendampingan guru dalam strategi	Pembelajaran tidak menarik dan tidak menumbuhkan pemikiran
19	Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran	ROO.22.01.01.19 2	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Keterbatasan buku, lembar kerja, atau alat bantu numerasi	- Aktivitas belajar kurang variatif - Siswa kesulitan memahami
19	Kurangnya sarana dan bahan ajar numerasi yang mendukung	ROO.22.01.01.19 3	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Anggapan bahwa matematika sulit dan menakutkan	- Sikap negatif terhadap pelajaran matematika -
19	Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika	ROO.22.01.01.19 4	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Orang tua kurang memahami pentingnya numerasi dalam	- Tidak terbentuk budaya belajar numerasi di rumah -
19	Dukungan keluarga terhadap pembelajaran numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.19 5	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Sekolah belum memiliki instrumen evaluasi numerasi non-	- Data capaian numerasi tidak akurat -
19	Belum optimalnya sistem asesmen numerasi di sekolah	ROO.22.01.01.19 6	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Pembelajaran belum berbasis diferensiasi dan pengayaan-	- Target indikator prestasi
19	Rendahnya jumlah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik	ROO.22.01.01.19 7	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Jadwal kegiatan ekstrakurikuler tidak teratur	- Potensi siswa tidak berkembang optimal -
19	Kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non -akademik	ROO.22.01.01.19 8	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua	Siswa tidak mendapat dukungan moral dan material untuk mengikuti
19	Rendahnya motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi siswa	ROO.22.01.01.19 9	12	Kepala Seksi Peserta Didik	- Anggaran sekolah belum mengalokasikan dana untuk	- Tidak semua siswa berbakat mendapat kesempatan pembinaan
19	Keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan kegiatan prestasi	ROO.22.01.01.20 0	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Tidak ada pelatihan bagi guru pembina lomba	- Pembinaan tidak efektif - Prestasi siswa tidak berkembang
19	Guru pembina dan pelatih belum memiliki kompetensi khusus	ROO.22.01.01.20 1	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Data prestasi siswa tidak terdokumentasi	- Kesempatan pengembangan bakat tidak merata -
19	Tidak adanya sistem seleksi dan pemantauan prestasi siswa yang	ROO.22.01.01.20 2	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Sekolah lebih menekankan aspek akademik dalam evaluasi kinerja	- Pengembangan karakter, kreativitas, dan kepemimpinan
19	Ketidakeimbangan fokus antara prestasi akademik dan non-akademik	ROO.22.01.01.20 3	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Pembelajaran nilai karakter tidak terintegrasi dalam kurikulum	- Penurunan sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati siswa
19	Rendahnya internalisasi nilai karakter di lingkungan sekolah	ROO.22.01.01.20 4	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Minim komunikasi antara sekolah dan orang tua	- Ketidakkonsistenan nilai antara di sekolah dan di rumah
19	Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan	ROO.22.01.01.20 5	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Fokus guru pada capaian akademik	- Pendidikan karakter hanya bersifat formalitas -
19	Ketidakterpaduan antara pembelajaran akademik dan	ROO.22.01.01.20 6	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Belum ada pelatihan penilaian sikap dan karakter	- Hasil penilaian karakter tidak objektif atau tidak akurat
19	Rendahnya kapasitas guru dalam menilai dan menumbuhkan karakter	ROO.22.01.01.20 7	12	Kepala Seksi Peserta Didik	- Kegiatan ekstrakurikuler belum rutin atau tidak menarik	- Siswa kurang terlatih dalam kerja sama, tanggung jawab, dan disiplin
19	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan	ROO.22.01.01.20 8	9	Kepala Seksi Peserta Didik	- Kepala sekolah belum berperan aktif sebagai role model	- Nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab tidak tertanam kuat
19	Lemahnya budaya organisasi sekolah yang mendukung karakter baik	ROO.22.01.01.20 9	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua	- Sarana tidak dapat digunakan secara optimal -
19	Rendahnya kondisi fisik sarana pendidikan	ROO.22.01.01.21 0	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai	- Kesalahan perencanaan kebutuhan sarana
19	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.21 1	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Tidak ada SOP pemeliharaan sarana	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun
19	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan	ROO.22.01.01.21 2	12	Kepala Seksi Sarana dan	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses	- Disparitas mutu layanan pendidikan
19	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.21 3	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah -
19	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.21 4	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua	- Prasarana tidak dapat digunakan secara optimal -
19	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.21 5	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai	- Kesalahan perencanaan kebutuhan prasarana
19	Data kondisi Prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.21 6	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Tidak ada SOP pemeliharaan prasarana	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
19	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan	ROO.22.01.01.217	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses	- Disparitas mutu layanan pendidikan
19	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.218	12	Kepala Seksi Sarana dan	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah
19	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.219	9	Kepala Seksi PAUD	- Pendataan tidak dilakukan secara rutin	- Siswa tidak mampu tidak mendapat bantuan
19	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.220	9	Kepala Seksi PAUD	- Mekanisme seleksi penerima bantuan belum optimal	- Siswa tetap mengalami kesulitan ekonomi - Risiko
19	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.221	9	Kepala Seksi PAUD	- Tingkat pendidikan orang tua rendah	- Anak tidak mampu tidak disekolahkan
19	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.222	9	Kepala Seksi PAUD	- Tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal- Kondisi sarana	- Anak dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah
19	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau	ROO.22.01.01.223	9	Kepala Seksi PAUD	- Tidak ada koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Bappeda, dll.)	- Penurunan capaian persentase siswa tidak mampu bersekolah
19	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.224	9	Kepala Seksi PAUD	- Pendapatan keluarga menurun tajam	- Kenaikan angka anak tidak sekolah dari keluarga miskin
19	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan	ROO.22.01.01.225	9	Kepala Seksi PAUD	- Guru kesulitan mengatur waktu karena beban kerja tinggi	- Capaian indikator tidak terpenuhi - Kompetensi guru stagnan
19	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.226	9	Kepala Seksi Pendidik dan	- Materi tidak kontekstual dengan kebutuhan lapangan	- Pelatihan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi nyata
19	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.227	9	Kepala Seksi Pendidik dan	- Jumlah pengawas dan widyaiswara terbatas	- Guru kekurangan pendampingan profesional - Hasil
19	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.228	9	Kepala Seksi Pendidik dan	- Literasi digital guru masih rendah- Fasilitas TIK di sekolah belum	- Pembelajaran kurang inovatif dan interaktif
19	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.230	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Data pelatihan guru tidak terdokumentasi dengan baik	- Kesulitan menilai capaian indikator
19	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.231	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum memahami perannya sebagai supervisor akademik - Tidak ada budaya belajar di lingkungan sekolah - Pembinaan lebih fokus pada administrasi	- Guru kurang termotivasi untuk berkembang - Pelatihan tidak diikuti dengan praktik nyata
19	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.232	12	Kepala Seksi PAUD	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
19	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan	ROO.22.01.01.233	9	Kepala Seksi PAUD	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan
19	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.234	9	Kepala Seksi PAUD	- Pergantian bendahara yang terlalu sering	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS
19	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.235	9	Kepala Seksi PAUD	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau
19	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.236	9	Kepala Seksi PAUD	- Belum ada pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif dan	- Lingkungan belajar belum mencerminkan keberagaman dan
19	Rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tentang	ROO.22.01.01.237	9	Kepala Seksi PAUD	- Belum semua lembaga siap menerima anak berkebutuhan	- Anak berkebutuhan khusus tidak terlayani dengan baik
19	Kurangnya penerapan prinsip inklusif di lembaga PAUD	ROO.22.01.01.238	9	Kepala Seksi PAUD	- Kurangnya komunikasi sekolah dengan orang tua tentang	- Upaya penanaman nilai toleransi tidak konsisten antara sekolah dan
19	Kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat terhadap penerapan	ROO.22.01.01.239	9	Kepala Seksi PAUD	- Buku dan alat permainan edukatif (APE) tidak mewakili keberagaman	- Pembelajaran cenderung homogen dan tidak menumbuhkan
19	Keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran yang mencerminkan	ROO.22.01.01.240	9	Kepala Seksi PAUD	- Indikator penilaian belum terintegrasi dalam sistem	- Tidak terpantau perkembangan penerapan nilai kebhinekaan dan
19	Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi nilai kebhinekaan dan	ROO.22.01.01.241	9	Kepala Seksi PAUD	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik
19	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah	ROO.22.01.01.242	12	Kepala Seksi PAUD	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa
19	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta	ROO.22.01.01.243	9	Kepala Seksi PAUD	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.)	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar
19	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.244	9	Kepala Seksi PAUD	- Belum ada rencana tanggap darurat	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.245	9	Kepala Seksi PAUD	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi
	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik)	ROO.22.01.01.246	9	Kepala Seksi PAUD	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah	ROO.22.01.01.247	9	Kepala Seksi PAUD	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan	ROO.22.01.01.248	12	Kepala Seksi Sarana dan	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua	- Sarana tidak dapat digunakan secara optimal -
	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.249	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai	- Kesalahan perencanaan kebutuhan sarana
	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.250	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Tidak ada SOP pemeliharaan sarana	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan	ROO.22.01.01.251	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses	- Disparitas mutu layanan pendidikan
	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.252	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah -
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.253	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Usia bangunan dan peralatan yang sudah tua	- Prasarana tidak dapat digunakan secara optimal -
	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.254	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Pengisian data Dapodik tidak tepat waktu atau tidak sesuai	- Kesalahan perencanaan kebutuhan prasarana
	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.255	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Tidak ada SOP pemeliharaan prasarana	- Kerusakan sarana meningkat - Umur pakai fasilitas menurun
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan	ROO.22.01.01.256	12	Kepala Seksi Sarana dan	- Sekolah di daerah terpencil sulit diakses	- Disparitas mutu layanan pendidikan
	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.257	9	Kepala Seksi Sarana dan	- Perencanaan kebutuhan tidak tepat	- Kualitas sarana yang diperoleh rendah -
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.258	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Pendataan tidak dilakukan secara rutin -	- Siswa tidak mampu tidak mendapat bantuan
	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.259	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Mekanisme seleksi penerima bantuan belum optimal	- Siswa tetap mengalami kesulitan ekonomi - Risiko
	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.260	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Tingkat pendidikan orang tua rendah	- Anak tidak mampu tidak disekolahkan
	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.261	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal- Kondisi sarana	- Anak dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah
	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau	ROO.22.01.01.262	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Tidak ada koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Bappeda, dll.)	- Penurunan capaian persentase siswa tidak mampu bersekolah
	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.263	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Pendapatan keluarga menurun tajam	- Kenaikan angka anak tidak sekolah dari keluarga miskin
	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan	ROO.22.01.01.264	12	Kepala Seksi Pendidikan	- Kurangnya sosialisasi manfaat program kesetaraan bagi santri	- Pesantren tidak berminat membuka layanan kesetaraan
	Rendahnya minat Pondok Pesantren untuk menyelenggarakan program	ROO.22.01.01.265	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Tidak semua pesantren memiliki guru dengan kualifikasi sesuai	- Kualitas pembelajaran kesetaraan rendah - Nilai
	Terbatasnya tenaga pendidik dan tutor yang kompeten untuk mengajar	ROO.22.01.01.266	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Fasilitas belajar seperti ruang kelas, buku paket, dan alat belajar	- Proses belajar mengajar tidak efektif -
	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran kesetaraan	ROO.22.01.01.267	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Proses pengajuan izin operasional rumit dan memakan	- Banyak pesantren belum terdaftar resmi sebagai penyelenggara
	Kendala perizinan dan administrasi penyelenggaraan program kesetaraan di pesantren	ROO.22.01.01.268	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Koordinasi lintas sektor belum optimal - Belum ada forum kerja bersama pembinaan pesantren kesetaraan	- Data dan pembinaan berjalan terpisah - Duplikasi atau ketidakterpaduan program
	Kurangnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan pesantren kesetaraan	ROO.22.01.01.269	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Guru kesulitan mengatur waktu karena beban kerja tinggi - Kurangnya motivasi mengikuti pelatihan - - Sosialisasi kegiatan peningkatan kompetensi belum optimal	- Capaian indikator tidak terpenuhi - Kompetensi guru stagnan - Kualitas pembelajaran menurun
	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.270	9	Kepala Seksi Pendidik dan	- Materi tidak kontekstual dengan kebutuhan lapangan	- Pelatihan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi nyata
	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.271	9	Kepala Seksi Pendidik dan	- Jumlah pengawas dan widyaiswara terbatas	- Guru kekurangan pendampingan profesional - Hasil

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.27 2	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital guru masih rendah- Fasilitas TIK di sekolah belum memadai- Tidak ada pendampingan penggunaan aplikasi pembelajaran	- Pembelajaran kurang inovatif dan interaktif - Keteringgalan
20	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.27 3	12	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Data pelatihan guru tidak terdokumentasi dengan baik - Belum ada sistem pelaporan capaian pelatihan - Tidak ada indikator kinerja yang terukur	- Kesulitan menilai capaian indikator - Pengambilan keputusan tidak berbasis data
21	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.27 4	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum memahami perannya sebagai supervisor akademik - Tidak ada budaya belajar di lingkungan sekolah - Pembinaan lebih fokus pada administrasi	- Guru kurang termotivasi untuk berkembang - Pelatihan tidak diikuti dengan praktik nyata
22	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.27 5	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
23	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.27 6	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah
24	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.27 7	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban
25	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.27 8	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan transaksi riil
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.27 9	9	Kepala Seksi Pendidikan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau
26	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.28 0	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.
27	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.28 1	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial
28	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.28 2	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
29	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.283	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah dilatih evakuasi bencana - Kurangnya koordinasi dengan BPBD	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah - Gangguan proses pembelajaran
30	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.284	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru
31	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.285	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua - Tidak tersedia layanan konseling memadai	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar
32	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.286	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas
33	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.287	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi sekolah.	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
34	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.288	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah
35	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.289	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen pertanggungjawaban
36	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.290	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan transaksi riil
37	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.291	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.292	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan kepada komite sekolah - Lemahnya pengawasan masyarakat	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah
38	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.293	9	Kepala Seksi Pendidikan Non	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau
39	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.294	9	Kepala Seksi Pendidikan Non	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan
40	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.295	12	Kepala Seksi Pendidikan Non	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan
41	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.296	9	Kepala Seksi Pendidikan Non	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar)	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara
42	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.297	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus kekerasan/perundungan	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidaknyamanan bagi korban

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
43	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.298	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan
44	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.299	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek akademik saja	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan tindak lanjut
45	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.300	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif - Fokus lebih pada target	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan
46	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.301	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.
47	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.302	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial
48	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.303	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah
49	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.304	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.305	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru
50	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.306	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar
51	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.307	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas
52	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.308	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggisekolah.	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
53	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.309	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan	- Potensi temuan audit - Ketidapatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan
54	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.310	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertiban dokumen
55	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.311	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan transaksi riil
56	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.312	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.313	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan kepada komite sekolah - Lemahnya pengawasan masyarakat	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
57	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.314	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan lemah - Evaluasi pelaporan tidak	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau tidak lengkap
58	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.315	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap prinsip	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan rasa aman dan nyaman belajar
59	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.316	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan diferensiasi pembelajaran	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan belajar yang setara
60	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.317	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar) - Terbatasnya anggaran untuk	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara siswa reguler dan ABK
61	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.318	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus kekerasan/perundungan - Minimnya pendidikan karakter dan empati	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidaknyamanan bagi korban
62	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.319	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan
63	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.320	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek akademik saja	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan tindak lanjut
64	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.321	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif - Fokus lebih pada target akademik dan administratif	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan
65	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.322	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pengawasan terhadap interaksi antar siswa - Tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan - Lemahnya peran guru BK dan wali kelas	- Rasa takut dan trauma pada peserta didik - Gangguan konsentrasi belajar - Citra negatif terhadap sekolahpeserta didik.
66	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.323	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Literasi digital rendah - Tidak ada pengawasan aktivitas daring siswa - Pengaruh negatif media sosial	- Penurunan rasa aman dan kepercayaan diri siswa - Gangguan kesehatan mental dan sosial
67	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.324	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Bangunan atau fasilitas rusak (atap, listrik, tangga, dll.) - Tidak adanya sistem keamanan fisik (CCTV, pagar, APAR)	- Potensi kecelakaan atau cedera - Gangguan aktivitas belajar - Tanggung jawab hukum bagi sekolah
68	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.325	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada rencana tanggap darurat - Warga sekolah belum pernah dilatih evakuasi bencana - Kurangnya koordinasi dengan BPBD	- Risiko korban jiwa atau luka saat bencana - Kerusakan aset sekolah - Gangguan proses pembelajaran
69	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.326	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya penjaga atau sistem keamanan sekolah - Lingkungan sekolah terbuka tanpa pagar pembatas	- Potensi pencurian, gangguan keamanan, atau intimidasi - Ketakutan siswa dan guru
70	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.327	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Beban akademik berat - Kurangnya dukungan emosional dari guru dan orang tua - Tidak tersedia layanan konseling memadai	Stres, depresi, atau perilaku menyimpang- Penurunan prestasi dan semangat belajar
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.328	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak - Dokumen SOP perlindungan anak tidak tersedia	- Pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah - Potensi masalah hukum bagi sekolah dan dinas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.329	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah atau bendahara belum memahami jadwal dan format pelaporan - Keterlambatan dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban - Beban administrasi sekolah tinggi di sekolah.	- Laporan tidak sesuai batas waktu - Hambatan pencairan dana tahap berikutnya - Penilaian kinerja sekolah menurun
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.330	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman bendahara dan kepala sekolah terhadap juknis BOS - Kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi transaksi - Tidak dilakukan verifikasi internal	- Potensi temuan audit - Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan negara - Citra buruk terhadap pengelolaan keuangan sekolah
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.331	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, bendahara, dan operator - Dokumen keuangan tidak diperiksa secara berkala - Minimnya pemahaman prinsip akuntabilitas	- Potensi penyimpangan administrasi dan keuangan - Ketidaktertibn dokumen pertanggungjawaban
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.332	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pergantian bendahara yang terlalu sering - Kurangnya pelatihan akuntansi sekolah - Tidak adanya sistem arsip digital	- Kesalahan input dan pengelolaan dana BOS - Ketidaksesuaian laporan dengan transaksi riil
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.333	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak tertib - Lemahnya tata kelola surat, arsip, dan dokumen penting - Kurangnya dukungan tenaga administrasi	- Laporan administrasi tidak valid - Kesulitan dalam audit atau evaluasi program
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.334	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas - Tidak ada publikasi laporan kepada komite sekolah - Lemahnya pengawasan masyarakat	- Potensi penyimpangan dana BOS atau bantuan lain - Menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah
	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.335	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan sekolah - Koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan lemah - Evaluasi pelaporan tidak dilakukan rutin	- Dinas kesulitan mengukur kepatuhan sekolah - Data pelaporan tidak valid atau tidak lengkap
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.336	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada kebijakan sekolah inklusif secara formal - Kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap prinsip inklusifitas	- Munculnya diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus atau minoritas - Penurunan rasa aman dan nyaman belajar
	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.337	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pelatihan pendidikan inklusif - Keterbatasan kompetensi guru dalam melakukan diferensiasi pembelajaran	- Peserta didik tertentu tertinggal dalam pembelajaran - Tidak terciptanya kesempatan belajar yang setara
	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.338	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Fasilitas fisik sekolah belum aksesibel (ramp, toilet, media bantu belajar) - Terbatasnya anggaran untuk sarana inklusi	- Peserta didik ABK kesulitan mengikuti kegiatan belajar - Ketimpangan layanan antara siswa reguler dan ABK
	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.339	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Pengawasan perilaku siswa kurang - Belum ada sistem pelaporan kasus kekerasan/perundungan - Minimnya pendidikan karakter dan empati	- Terhambatnya pembentukan iklim sekolah yang aman - Trauma dan ketidaknyamanan bagi korban
	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.340	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif - Masih ada stigma negatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus	- Dukungan terhadap kebijakan inklusif lemah - Program inklusi sulit berkelanjutan
	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.341	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Tidak adanya instrumen atau indikator yang jelas - Sekolah fokus pada aspek akademik saja	- Perbaikan iklim inklusif tidak terukur - Program berjalan tanpa arah dan tindak lanjut

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.34 2	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kepala sekolah belum mendapat pembekalan manajemen sekolah inklusif - Fokus lebih pada target akademik dan administratif	Arah kebijakan sekolah kurang berpihak pada keberagaman dan kesetaraan
	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.34 3	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan kurikulum terbaru (Merdeka Belajar / Kurikulum 2013) - Belum ada sosialisasi dan pendampingan memadai dari dinas pendidikan	- Ketidaksesuaian proses pembelajaran dengan standar nasional - Keteringgalan mutu dan capaian belajar peserta didik
	2. Risiko Operasional OPD Program Pengembangan Kurikulum					
	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.34 4	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum baru - Minimnya supervisi pembelajaran dan umpan balik profesional	- Proses pembelajaran tidak sesuai prinsip kurikulum aktif dan kontekstual - Mutu hasil belajar tidak meningkat
	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.34 5	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Perencanaan muatan lokal tidak mempertimbangkan capaian pembelajaran nasional- Tidak ada tim kurikulum daerah yang memantau keterpaduan	- Tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara konten nasional dan lokal- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik
	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.34 6	12	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan kurikulum terbaru (Merdeka Belajar / Kurikulum 2013) - Belum ada sosialisasi dan pendampingan memadai dari dinas pendidikan	- Ketidaksesuaian proses pembelajaran dengan standar nasional - Keteringgalan mutu dan capaian belajar peserta didik
	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.34 7	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum ada penetapan kurikulum muatan lokal dari pemerintah daerah - Guru tidak memiliki bahan ajar atau panduan pelaksanaan mulok - Kegiatan pembelajaran muatan lokal belum terjadwal dengan baik	- Identitas budaya dan kearifan lokal tidak tergal di sekolah - Nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi pada peserta didik
	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.34 8	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum baru - Minimnya supervisi pembelajaran dan umpan balik profesional	- Proses pembelajaran tidak sesuai prinsip kurikulum aktif dan kontekstual - Mutu hasil belajar tidak meningkat
	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.34 9	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Perencanaan muatan lokal tidak mempertimbangkan capaian pembelajaran nasional- Tidak ada tim kurikulum daerah yang memantau keterpaduan	- Tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara konten nasional dan lokal- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik
	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.35 0	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan kurikulum terbaru (Merdeka Belajar / Kurikulum 2013) - Belum ada sosialisasi dan pendampingan memadai dari dinas pendidikan	- Ketidaksesuaian proses pembelajaran dengan standar nasional - Keteringgalan mutu dan capaian belajar peserta didik

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.35 1	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Belum ada penetapan kurikulum muatan lokal dari pemerintah daerah - Guru tidak memiliki bahan ajar atau panduan pelaksanaan mulok - Kegiatan pembelajaran muatan lokal belum terjadwal dengan baik	- Identitas budaya dan kearifan lokal tidak tergal di sekolah - Nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi pada peserta didik
	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.35 2	12	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum baru - Minimnya supervisi pembelajaran dan umpan balik profesional	- Proses pembelajaran tidak sesuai prinsip kurikulum aktif dan kontekstual - Mutu hasil belajar tidak meningkat
	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.35 3	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Perencanaan muatan lokal tidak mempertimbangkan capaian pembelajaran nasional- Tidak ada tim kurikulum daerah yang memantau keterpaduan	- Tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara konten nasional dan lokal- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik
	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.35 4	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan kurikulum terbaru (Merdeka Belajar / Kurikulum 2013) - Belum ada sosialisasi dan pendampingan memadai dari dinas pendidikan	- Ketidaksiharian proses pembelajaran dengan standar nasional - Keteringgalan mutu dan capaian belajar peserta didik
	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.35 5	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Belum ada penetapan kurikulum muatan lokal dari pemerintah daerah - Guru tidak memiliki bahan ajar atau panduan pelaksanaan mulok - Kegiatan pembelajaran muatan lokal belum terjadwal dengan baik	- Identitas budaya dan kearifan lokal tidak tergal di sekolah - Nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi pada peserta didik
	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.35 6	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum baru - Minimnya supervisi pembelajaran dan umpan balik profesional	- Proses pembelajaran tidak sesuai prinsip kurikulum aktif dan kontekstual - Mutu hasil belajar tidak meningkat
	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.35 7	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Perencanaan muatan lokal tidak mempertimbangkan capaian pembelajaran nasional- Tidak ada tim kurikulum daerah yang memantau keterpaduan	- Tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara konten nasional dan lokal- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik
	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.35 8	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Belum dilakukan analisis potensi lokal secara komprehensif- Tidak melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat dalam penyusunan kurikulum	- Kurikulum tidak kontekstual dengan kondisi lingkungan peserta didik- Kurikulum sulit diterapkan secara berkelanjutan
	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.35 9	12	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Guru dan kepala sekolah belum memahami prinsip pengembangan kurikulum - Tidak ada pelatihan khusus tentang desain dan implementasi muatan lokal	- Dokumen kurikulum tidak memenuhi standar - Pelaksanaan pembelajaran tidak efektif
	2. Risiko Operasional OPD Kegiatan					
	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.36 0	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Belum dilakukan analisis potensi lokal secara komprehensif- Tidak melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat dalam penyusunan kurikulum	- Kurikulum tidak kontekstual dengan kondisi lingkungan peserta didik- Kurikulum sulit diterapkan secara berkelanjutan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.361	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Guru dan kepala sekolah belum memahami prinsip pengembangan kurikulum - Tidak ada pelatihan khusus tentang desain dan implementasi muatan lokal	- Dokumen kurikulum tidak memenuhi standar - Pelaksanaan pembelajaran tidak efektif
	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.362	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	- Belum tersedia modul, media, dan instrumen pembelajaran - Tidak ada dukungan anggaran pengembangan bahan ajar	- Pembelajaran muatan lokal tidak berjalan optimal - Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran
	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.363	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum dilakukan analisis potensi lokal secara komprehensif- Tidak melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat dalam penyusunan kurikulum	- Kurikulum tidak kontekstual dengan kondisi lingkungan peserta didik- Kurikulum sulit diterapkan secara berkelanjutan
	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.364	12	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Guru dan kepala sekolah belum memahami prinsip pengembangan kurikulum - Tidak ada pelatihan khusus tentang desain dan implementasi muatan lokal	- Dokumen kurikulum tidak memenuhi standar - Pelaksanaan pembelajaran tidak efektif
	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.365	9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	- Belum tersedia modul, media, dan instrumen pembelajaran - Tidak ada dukungan anggaran pengembangan bahan ajar	- Pembelajaran muatan lokal tidak berjalan optimal - Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran
	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.366	9	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	- Belum dilakukan analisis potensi lokal secara komprehensif- Tidak melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat dalam penyusunan kurikulum	- Kurikulum tidak kontekstual dengan kondisi lingkungan peserta didik- Kurikulum sulit diterapkan secara berkelanjutan
	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.367	12	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	- Guru dan kepala sekolah belum memahami prinsip pengembangan kurikulum - Tidak ada pelatihan khusus tentang desain dan implementasi muatan lokal	- Dokumen kurikulum tidak memenuhi standar - Pelaksanaan pembelajaran tidak efektif
	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.368	9	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	- Belum tersedia modul, media, dan instrumen pembelajaran - Tidak ada dukungan anggaran pengembangan bahan ajar	- Pembelajaran muatan lokal tidak berjalan optimal - Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran
	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.369	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Penempatan guru belum merata - Kurangnya kebijakan afirmatif untuk daerah terpencil	- Satuan Pendidikan Kekurangan guru pada pelajaran tertentu - Penurunan mutu pelajaran
	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.370	12	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Penempatan guru belum merata - Kurangnya kebijakan afirmatif untuk daerah terpencil	- Satuan Pendidikan Kekurangan guru pada pelajaran tertentu - Penurunan mutu pelajaran
	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.371	9	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Penempatan guru belum merata - Kurangnya kebijakan afirmatif untuk daerah terpencil	- Satuan Pendidikan Kekurangan guru pada pelajaran tertentu - Penurunan mutu pelajaran
	3. Risiko Operasional OPD Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0			
	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.372	12	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Sebaran guru bersertifikat terkonsentrasi di wilayah kota - Sekolah terpencil kekurangan guru bersertifikat - Tidak ada kebijakan redistribusi guru berbasis kualifikasi	- Kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah - Ketimpangan layanan pembelajaran
	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.373	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Sebaran guru bersertifikat terkonsentrasi di wilayah kota - Sekolah terpencil kekurangan guru bersertifikat - Tidak ada kebijakan redistribusi guru berbasis kualifikasi	- Kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah - Ketimpangan layanan pembelajaran

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.374	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Banyak sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif - Proses pengangkatan dan penetapan kepala sekolah belum optimal - Keterbatasan calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	- Rasio kepala sekolah terhadap satuan pendidikan tidak ideal - Penurunan efektivitas manajemen sekolah - Pengawasan dan pembinaan sekolah tidak optimal
	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.375	9	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	- Banyak sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif - Proses pengangkatan dan penetapan kepala sekolah belum optimal - Keterbatasan calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	- Rasio kepala sekolah terhadap satuan pendidikan tidak ideal - Penurunan efektivitas manajemen sekolah - Pengawasan dan pembinaan sekolah tidak optimal
	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.376	9	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	- Banyak sekolah belum memiliki kepala sekolah definitif - Proses pengangkatan dan penetapan kepala sekolah belum optimal - Keterbatasan calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	- Rasio kepala sekolah terhadap satuan pendidikan tidak ideal - Penurunan efektivitas manajemen sekolah - Pengawasan dan pembinaan sekolah tidak optimal
	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.377	12	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	- Banyak pengawas pensiun tanpa rekrutmen baru - Tidak ada formasi pengawas dalam seleksi ASN/P3K - Beban kerja per pengawas terlalu besar	- Pengawasan tidak optimal - Mutu pembelajaran dan manajemen sekolah tidak terpantau - Penurunan kinerja sekolah
	2. Risiko Operasional OPD Kegiatan	0	0			
	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.378	12	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD PNF/Kesetaraan	- Banyak pengawas pensiun tanpa rekrutmen baru - Tidak ada formasi pengawas dalam seleksi ASN/P3K - Beban kerja per pengawas terlalu besar	- Pengawasan tidak optimal - Mutu pembelajaran dan manajemen sekolah tidak terpantau - Penurunan kinerja sekolah
	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.379	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Konsentrasi guru di wilayah perkotaan - Kekurangan guru di daerah terpencil - Sistem mutasi dan penempatan belum berbasis kebutuhan riil	- Sekolah tertentu kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan - Proses belajar terganggu di daerah tertentu - Indeks distribusi guru menurun
	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.380	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Konsentrasi guru di wilayah perkotaan - Kekurangan guru di daerah terpencil - Sistem mutasi dan penempatan belum berbasis kebutuhan riil	- Sekolah tertentu kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan - Proses belajar terganggu di daerah tertentu - Indeks distribusi guru menurun
	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.381	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD PNF/Kesetaraan	- Banyak guru lama belum sempat melanjutkan studi - Terbatasnya akses pendidikan tinggi di daerah - Tidak ada program afirmasi kuliah bagi guru non-S1	- Persentase PTK berkualifikasi S1/D4 rendah - Tidak terpenuhinya standar kompetensi guru nasional - Mutu pembelajaran menurun
	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.382	12	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Banyak guru lama belum sempat melanjutkan studi - Terbatasnya akses pendidikan tinggi di daerah - Tidak ada program afirmasi kuliah bagi guru non-S1	- Persentase PTK berkualifikasi S1/D4 rendah - Tidak terpenuhinya standar kompetensi guru nasional - Mutu pembelajaran menurun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.38 3	9	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Banyak guru lama belum sempat melanjutkan studi - Terbatasnya akses pendidikan tinggi di daerah - Tidak ada program afirmasi kuliah bagi guru non-S1	- Persentase PTK berkualifikasi S1/D4 rendah - Tidak terpenuhinya standar kompetensi guru nasional - Mutu pembelajaran menurun
	Ketidakseimbangan sebaran guru antar satuan pendidikan	ROO.22.01.01.38 4	12	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	- Konsentrasi guru di wilayah perkotaan - Kekurangan guru di daerah terpencil - Sistem mutasi dan penempatan belum berbasis kebutuhan riil	- Sekolah tertentu kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan - Proses belajar terganggu di daerah tertentu - Indeks distribusi guru menurun
	Ketidakseimbangan sebaran guru	ROO.22.01.01.38	9	Kepala Seksi	- Konsentrasi guru di wilayah	- Sekolah tertentu kelebihan guru,
	Masih adanya pendidik dan tenaga	ROO.22.01.01.38	9	Kepala Seksi	- Banyak guru lama belum sempat	- Persentase PTK berkualifikasi
	Masih adanya pendidik dan tenaga	ROO.22.01.01.38	9	Kepala Seksi	- Banyak guru lama belum sempat	- Persentase PTK berkualifikasi
	Masih adanya pendidik dan tenaga	ROO.22.01.01.38	12	Kepala Seksi	- Banyak guru lama belum sempat	- Persentase PTK berkualifikasi

Keterangan

0

Kolom a diisi dengan nomor urut

0

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 2025 Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Rendahnya angka partisipasi murni dan kasar di jenjang SD dan SMP	RSP.22.01.01.01			Program penarikan anak tidak sekolah (ATS) ke	Kepala Daerah	
2	Masih adanya anak putus sekolah di jenjang SD dan SMP	RSP.22.01.01.02			Intervensi sosial dan beasiswa bagi anak berisiko	Kepala Daerah	
3	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dasar	RSP.22.01.01.03			Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan RKB, dan	Kepala Daerah	
4	Kualitas layanan pembelajaran belum merata antar sekolah	RSP.22.01.01.04			Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan,	Kepala Daerah	
5	Kendala ekonomi keluarga peserta didik	RSP.22.01.01.05			Optimalisasi BOS, KIP, bantuan seragam dan	Kepala Daerah	
6	Akses sekolah sulit di daerah terpencil	RSP.22.01.01.06			Pembangunan sekolah satelit, transportasi antar	Kepala Daerah	
7	Rendahnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak	RSP.22.01.01.07			Program parenting dan sosialisasi nilai pendidikan	Kepala Daerah	
8	Pendataan anak usia sekolah tidak bersekolah belum akurat	RSP.22.01.01.08			Integrasi data lintas instansi (Dapodik, Disdukcapil,	Kepala Daerah	
9	Rendahnya kesadaran gender dalam pendidikan dasar	RSP.22.01.01.09			Sosialisasi kesetaraan gender dalam pendidikan	Kepala Daerah	
II Risiko Strategis OPD							
1	Terjadinya pernikahan dini di usia sekolah	RSO.22.01.01.01			Pembinaan dan	Kepala Dinas	
2	Pilihan ke sekolah agama lebih dominan dibanding pada sekolah formal	RSO.22.01.01.02			Pembinaan dan pendampingan oleh guru	Kepala Dinas	
3	Anak usia sekolah putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan	RSO.22.01.01.03			Pembinaan dan pendampingan oleh guru BK dan perangkat desa, pemberian beasiswa anak rentan putus sekolah	Kepala Dinas	
4	Keterbatasan akses sekolah di daerah terpencil	RSO.22.01.01.04			Pendirian sekolah satu atap, program guru keliling/guru kunjung, dan penyediaan asrama pendidikan	Kepala Dinas	
5	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar	RSO.22.01.01.05			Sosialisasi pentingnya wajib belajar 9 tahun melalui kader pendidikan, tokoh masyarakat, dan media lokal	Kepala Dinas	
6	Data partisipasi sekolah tidak akurat atau tidak mutakhir	RSO.22.01.01.06			Pembinaan operator sekolah, verifikasi dan validasi data pendidikan secara berkala	Kepala Dinas	
7	Kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan angka partisipasi	RSO.22.01.01.07			Pembentukan tim terpadu penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta pemetaan terpadu berbasis data Dapodik dan DTKS	Kepala Dinas	
8	Keterbatasan program pendidikan alternatif (Paket A, B, C)	RSO.22.01.01.08			Penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dukungan dana hibah untuk pendidikan kesetaraan	Kepala Dinas	
9	Gangguan eksternal (bencana, pandemi, atau cuaca ekstrem)	RSO.22.01.01.09			Program pembelajaran darurat, penyediaan modul cetak, dan peningkatan kesiapsiagaan satuan pendidikan	Kepala Dinas	
10	Ketidaktercapaian target indikator SPM pendidikan dasar	RSO.22.01.01.10			Pemetaan capaian SPM, integrasi ke RKPd, serta monitoring capaian secara berkala	Kepala Dinas	
11	Rendahnya angka partisipasi sekolah usia wajib belajar (7–15 tahun)	RSO.22.01.01.11			Sosialisasi pentingnya pendidikan dasar, pemberian bantuan BOS/PIP, dan penyediaan sekolah satu atap	Kepala Dinas	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
12	Ketimpangan distribusi dan kualitas guru antar sekolah	RSO.22.01.01.12			Redistribusi guru berbasis Dapodik, pelatihan dan peningkatan kapasitas guru di daerah tertinggal	Kepala Dinas	
13	Keterlambatan dan ketidakakuratan data pendidikan (Dapodik/SPM)	RSO.22.01.01.13			Pembinaan operator, verifikasi & validasi data berkala, serta peningkatan kapasitas teknis	Kepala Dinas	
14	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	RSO.22.01.01.14			Prioritas pembangunan sarpras dalam Renstra Dinas, optimalisasi DAK fisik, dan BOS reguler	Kepala Dinas	
15	Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	RSO.22.01.01.15			Pembentukan tim koordinasi lintas unit dan rapat koordinasi rutin	Kepala Dinas	
16	Ketidakpatuhan sekolah terhadap standar pelayanan minimal	RSO.22.01.01.16			Sosialisasi SPM ke sekolah, monitoring oleh pengawas, dan pembinaan kepala sekolah	Kepala Dinas	
17	Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung penerapan SPM	RSO.22.01.01.17			Optimalisasi dana transfer (DAK, BOSP) dan perencanaan berbasis kebutuhan	Kepala Dinas	
18	Rendahnya kapasitas dan komitmen SDM pelaksana SPM	RSO.22.01.01.18			Pelatihan teknis SPM, coaching, reward & punishment bagi pelaksana	Kepala Dinas	
19	Keterlambatan pelaporan capaian SPM ke pemerintah pusat	RSO.22.01.01.19			Digitalisasi sistem pelaporan dan peningkatan	Kepala Dinas	
20	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM belum optimal	RSO.22.01.01.20			Penyusunan pedoman Monev SPM, pelaporan triwulanan, dan evaluasi berbasis data	Kepala Dinas	
21	Risiko penyimpangan dan inefisiensi pelaksanaan program SPM	RSO.22.01.01.21			Penguatan SPIP, audit internal, penerapan whistleblowing system, dan pembinaan etika ASN	Kepala Dinas	
22	Gangguan eksternal (bencana alam, pandemi, cuaca ekstrem)	RSO.22.01.01.22			Rencana kontinjensi pendidikan darurat, pembelajaran jarak jauh, dan penyediaan modul alternatif	Kepala Dinas	
23	Kurangnya sosialisasi SPM kepada masyarakat	RSO.22.01.01.23			Kampanye publik, kolaborasi dengan media dan organisasi masyarakat	Kepala Dinas	
24	Tidak tersedianya pembelajaran alternatif di daerah khusus	RSO.22.01.01.24			Program guru kunjung, modul belajar mandiri, dan kerja sama dengan lembaga nonformal	Kepala Dinas	
25	Kualitas perencanaan kinerja tidak selaras dengan tujuan strategis	RSO.22.01.01.25			<ul style="list-style-type: none"> • Reviu dan penyelarasan dokumen perencanaan dengan Renstra dan RPJMD • Pelatihan indikator SMART • Rapat koordinasi lintas bidang 	Kepala Dinas	
26	Pengukuran dan pelaporan kinerja tidak akurat	RSO.22.01.01.26			<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SDM perencanaan dan pelapor kinerja • Aplikasi e-SAKIP • Verifikasi dan validasi data berkala 	Kepala Dinas	
27	Evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkelanjutan	RSO.22.01.01.27			<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi triwulanan kinerja • Tim monev internal • Rencana aksi perbaikan 	Kepala Dinas	
28	Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja rendah	RSO.22.01.01.28			<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi hasil evaluasi dalam perencanaan tahunan • Pelatihan pimpinan tentang manajemen kinerja • Kebijakan keputusan berbasis hasil evaluasi 	Kepala Dinas	
29	Komitmen pimpinan dan pegawai belum optimal	RSO.22.01.01.29			<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas dan perjanjian kinerja • Internalisasi budaya kerja berbasis hasil • Apresiasi unit berprestasi 	Kepala Dinas	
30	Sistem informasi akuntabilitas belum memadai	RSO.22.01.01.30			<ul style="list-style-type: none"> • Dashboard SAKIP berbasis web • Pelatihan operator data • Penguatan infrastruktur TI 	Kepala Dinas	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
31	Ketidaksinambungan antar dokumen perencanaan dan pelaporan	RSO.22.01.01.31			<ul style="list-style-type: none"> • Reviu tahunan konsistensi dokumen • Tim pengendali dokumen kinerja • Reviu Inspektorat 	Kepala Dinas	
III Risiko Operasional Pengelolaan Pendidikan							
	Rendahnya capaian satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai SNP	ROO.22.01.01.01			<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kebutuhan sarana berbasis data Dapodik dan hasil verifikasi lapangan • Pemanfaatan sumber pendanaan alternatif (CSR, BOS, APBDes) • Prioritas penganggaran daerah untuk sekolah dengan sarana minimal 	Kabid Sarana Prasarana	
	Ketidaksesuaian antara sarana pembelajaran yang dimiliki sekolah dengan standar SNP	ROO.22.01.01.02			<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang standar sarana pembelajaran sesuai SNP • Pendampingan teknis oleh pengawas sekolah dan tim fasilitator daerah • Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan sarana sesuai SNP 	Kabid Sarana Prasarana	
	Rendahnya capaian satuan pendidikan yang memiliki Prasarana pembelajaran sesuai SNP	ROO.22.01.01.03			<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kebutuhan prasarana berbasis data Dapodik dan hasil verifikasi lapangan • Pemanfaatan sumber pendanaan alternatif (CSR, BOS, APBDes) • Prioritas penganggaran daerah untuk sekolah dengan prasarana minimal 	Kabid Sarana Prasarana	
	Ketidaksesuaian antara Prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah dengan standar SNP	ROO.22.01.01.04			<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang prastandar sarana pembelajaran sesuai SNP • Pendampingan teknis oleh pengawas sekolah dan tim fasilitator daerah • Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan prasarana sesuai SNP 	Kabid Sarana Prasarana	
	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.05			<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data Dapodik secara rutin • Integrasi data antar-OPD melalui sistem informasi daerah • Pembentukan tim validasi dan verifikasi data ATS di tingkat kecamatan 	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.06			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim koordinasi lintas sektor penanganan ATS • Penetapan SK Bupati tentang percepatan penurunan ATS • Pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring rutin antarinstansi 	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.07			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kader pendidikan desa untuk pemantauan ATS • Program pembinaan dan pendampingan berkelanjutan di sekolah dan rumah • Pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam mendukung anak kembali sekolah 	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.08			<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data Dapodik secara rutin • Integrasi data antar-OPD melalui sistem informasi daerah • Pembentukan tim validasi dan verifikasi data ATS di tingkat kecamatan 	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.09			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim koordinasi lintas sektor penanganan ATS • Penetapan SK Bupati tentang percepatan penurunan ATS • Pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring rutin antarinstansi 	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.10			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kader pendidikan desa untuk pemantauan ATS • Program pembinaan dan pendampingan berkelanjutan di sekolah dan rumah • Pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam mendukung anak kembali sekolah 	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Data ATS tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.11			<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data Dapodik secara rutin • Integrasi data antar-OPD melalui sistem informasi daerah • Pembentukan tim validasi dan verifikasi data ATS di tingkat kecamatan 	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ATS	ROO.22.01.01.12			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim koordinasi lintas sektor penanganan ATS • Penetapan SK Bupati tentang percepatan penurunan ATS • Pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring rutin antarinstansi 	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Rendahnya keberlanjutan program pasca penarikan ATS	ROO.22.01.01.13			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kader pendidikan desa untuk pemantauan ATS • Program pembinaan dan pendampingan berkelanjutan di sekolah dan rumah • Pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam mendukung anak kembali sekolah 	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.14			<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan manajemen sekolah bagi kepala sekolah dan guru - Peningkatan peran pengawas sekolah dalam pembinaan mutu - Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) secara konsisten 	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.15			<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan sarana prasarana secara bertahap berdasarkan hasil audit kebutuhan- Pemanfaatan DAK, BOS, dan CSR untuk peningkatan sarana - Monitoring dan evaluasi sarana prasarana secara berkala 	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.16			- Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru - Redistribusi guru untuk pemerataan mutu - Penguatan peran KKG dan MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.17			- Bimbingan teknis penyusunan dokumen akreditasi (instrumen IASP 2020) - Supervisi rutin oleh pengawas untuk memastikan kelengkapan eviden - Digitalisasi dokumen akreditasi melalui sistem manajemen sekolah	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.18			- Pelatihan manajemen sekolah bagi kepala sekolah dan guru - Peningkatan peran pengawas sekolah dalam pembinaan mutu - Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) secara konsisten	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.19			- Pemenuhan sarana prasarana secara bertahap berdasarkan hasil audit kebutuhan- Pemanfaatan DAK, BOS, dan CSR untuk peningkatan sarana - Monitoring dan evaluasi sarana prasarana secara berkala	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.20			- Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru - Redistribusi guru untuk pemerataan mutu - Penguatan peran KKG dan MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.21			- Bimbingan teknis penyusunan dokumen akreditasi (instrumen IASP 2020) - Supervisi rutin oleh pengawas untuk memastikan kelengkapan eviden - Digitalisasi dokumen akreditasi melalui sistem manajemen sekolah	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.22			- Pelatihan manajemen sekolah bagi kepala sekolah dan guru - Peningkatan peran pengawas sekolah dalam pembinaan mutu - Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) secara konsisten	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.23			- Pemenuhan sarana prasarana secara bertahap berdasarkan hasil audit kebutuhan- Pemanfaatan DAK, BOS, dan CSR untuk peningkatan sarana - Monitoring dan evaluasi sarana prasarana secara berkala	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.24			- Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru - Redistribusi guru untuk pemerataan mutu - Penguatan peran KKG dan MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.25			- Bimbingan teknis penyusunan dokumen akreditasi (instrumen IASP 2020) - Supervisi rutin oleh pengawas untuk memastikan kelengkapan eviden - Digitalisasi dokumen akreditasi melalui sistem manajemen sekolah	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Mutu manajemen sekolah belum memenuhi standar akreditasi B	ROO.22.01.01.26			- Pelatihan manajemen sekolah bagi kepala sekolah dan guru - Peningkatan peran pengawas sekolah dalam pembinaan mutu - Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) secara konsisten	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk memenuhi standar akreditasi	ROO.22.01.01.27			- Pemenuhan sarana prasarana secara bertahap berdasarkan hasil audit kebutuhan- Pemanfaatan DAK, BOS, dan CSR untuk peningkatan sarana - Monitoring dan evaluasi sarana prasarana secara berkala	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal	ROO.22.01.01.28			- Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru - Redistribusi guru untuk pemerataan mutu - Penguatan peran KKG dan MGMP dalam peningkatan profesionalisme guru	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Data dan dokumen pendukung akreditasi tidak lengkap atau tidak mutakhir	ROO.22.01.01.29			- Bimbingan teknis penyusunan dokumen akreditasi (instrumen IASP 2020) - Supervisi rutin oleh pengawas untuk memastikan kelengkapan eviden - Digitalisasi dokumen akreditasi melalui sistem manajemen sekolah	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kualitas pembelajaran literasi belum optimal	ROO.22.01.01.30			- Pelatihan dan pendampingan guru literasi - Supervisi akademik oleh kepala sekolah dan pengawas - Penggunaan media dan teknologi pembelajaran literasi	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Keterbatasan sarana dan sumber belajar literasi	ROO.22.01.01.31			- Pengadaan dan pemutakhiran bahan bacaan cetak dan digital - Pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan literasi - Kemitraan dengan perpustakaan daerah dan komunitas literasi	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Rendahnya dukungan keluarga terhadap pengembangan literasi	ROO.22.01.01.32			- Sosialisasi "Gerakan Literasi Keluarga" - Program baca bersama antara orang tua dan anak - Dukungan bahan bacaan murah/hibah buku bagi keluarga kurang mampu	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kurangnya integrasi kebijakan literasi antar jenjang dan antar instansi	ROO.22.01.01.33			- Integrasi indikator literasi dalam RKS dan RKPDPendidikan - Pembentukan tim literasi daerah lintas bidang - Monitoring dan evaluasi capaian literasi tahunan	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Faktor sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik	ROO.22.01.01.34			- Pemberian bantuan sosial pendidikan dan bahan bacaan - Kolaborasi dengan lembaga CSR dan organisasi masyarakat - Program remedial literasi bagi sekolah dengan capaian rendah	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Kualitas pembelajaran numerasi belum optimal	ROO.22.01.01.35			- Pelatihan dan pendampingan guru numerasi kontekstual- Penggunaan alat peraga dan teknologi digital pembelajaran- Supervisi akademik kepala sekolah dan pengawas	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Kurangnya sarana dan sumber belajar numerasi	ROO.22.01.01.36			- Pengadaan alat peraga numerasi sederhana- Penggunaan aplikasi pembelajaran numerasi berbasis teknologi- Kolaborasi dengan komunitas numerasi daerah	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap numerasi	ROO.22.01.01.37			- Pembelajaran numerasi berbasis permainan dan tantangan (game-based learning)- Kompetisi numerasi antar kelas/sekolah- Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi di bidang numerasi	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Dukungan keluarga dan lingkungan terhadap numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.38			- Sosialisasi "Gerakan Literasi dan Numerasi Keluarga"- Panduan aktivitas numerasi sederhana di rumah- Kegiatan komunitas belajar numerasi bersama masyarakat	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Kebijakan sekolah dan daerah belum fokus pada peningkatan numerasi	ROO.22.01.01.39			- Integrasi indikator numerasi dalam perencanaan sekolah dan daerah- Pembentukan tim peningkatan numerasi daerah- Monitoring capaian numerasi berbasis Asesmen Nasional (AN)	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Faktor sosial ekonomi dan ketimpangan wilayah mempengaruhi kemampuan numerasi	ROO.22.01.01.40			- Dukungan sosial berupa bantuan alat tulis dan bahan ajar numerasi- Program pendampingan khusus bagi sekolah 3T- Kolaborasi CSR untuk intervensi numerasi di daerah prioritas	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Perilaku peserta didik dipengaruhi lingkungan sosial negatif	ROO.22.01.01.41			- Kolaborasi sekolah-orang tua melalui kegiatan parenting- Edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial- Program pembiasaan karakter positif di sekolah	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter	ROO.22.01.01.42			- Pelatihan dan pendampingan guru dalam pembelajaran berbasis karakter- Supervisi akademik berfokus pada aspek karakter- Penggunaan instrumen asesmen karakter yang terstandar	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif	ROO.22.01.01.43			- Revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler berbasis karakter- Pembinaan rutin	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Lemahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter	ROO.22.01.01.44			- Sosialisasi program pembinaan karakter keluarga- Buku penghubung karakter antara sekolah dan rumah- Forum komunikasi orang tua dan guru secara berkala	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Sistem penilaian karakter belum terimplementasi secara baik	ROO.22.01.01.45			- Penerapan instrumen asesmen karakter berbasis observasi dan portofolio- Pelatihan guru dalam penilaian nonkognitif- Penggunaan aplikasi atau sistem pelaporan karakter terintegrasi	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Kurangnya dukungan kebijakan dan monitoring dari Dinas Pendidikan	ROO.22.01.01.46			- Integrasi indikator karakter dalam penilaian kinerja sekolah- Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan P5- Pemberian penghargaan untuk sekolah berbudaya karakter baik	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	
	Kualitas pembelajaran literasi belum optimal	ROO.22.01.01.47			- Pelatihan dan pendampingan guru literasi - Supervisi akademik oleh kepala sekolah dan pengawas - Penggunaan media dan teknologi pembelajaran literasi	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Keterbatasan sarana dan sumber belajar literasi	ROO.22.01.01.48			- Pengadaan dan pemutakhiran bahan bacaan cetak dan digital - Pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan literasi - Kemitraan dengan perpustakaan daerah dan komunitas literasi	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya dukungan keluarga terhadap pengembangan literasi	ROO.22.01.01.49			- Sosialisasi "Gerakan Literasi Keluarga" - Program baca bersama antara orang tua dan anak - Dukungan bahan bacaan murah/hibah buku bagi keluarga kurang mampu	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya integrasi kebijakan literasi antar jenjang dan antar instansi	ROO.22.01.01.50			- Integrasi indikator literasi dalam RKS dan RKPD Pendidikan - Pembentukan tim literasi daerah lintas bidang - Monitoring dan evaluasi capaian literasi tahunan	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Faktor sosial ekonomi mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik	ROO.22.01.01.51			- Pemberian bantuan sosial pendidikan dan bahan bacaan - Kolaborasi dengan lembaga CSR dan organisasi masyarakat - Program remedial literasi bagi sekolah dengan capaian rendah	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Kualitas pembelajaran numerasi belum optimal	ROO.22.01.01.52			- Pelatihan dan pendampingan guru numerasi kontekstual-	Kabid Pembinaan Sekolah	
	Kurangnya sarana dan sumber belajar numerasi	ROO.22.01.01.53			- Pengadaan alat peraga numerasi sederhana- Penggunaan aplikasi	Kabid Pembinaan Sekolah	
	Rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap numerasi	ROO.22.01.01.54			- Pembelajaran numerasi berbasis permainan dan tantangan (game-based	Kabid Pembinaan Sekolah	
	Dukungan keluarga dan lingkungan terhadap numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.55			- Sosialisasi "Gerakan Literasi dan Numerasi Keluarga"- Panduan	Kabid Pembinaan Sekolah	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kebijakan sekolah dan daerah belum fokus pada peningkatan numerasi	ROO.22.01.01.56			- Integrasi indikator numerasi dalam perencanaan sekolah dan	Kabid Pembinaan Sekolah	
	Faktor sosial ekonomi dan ketimpangan wilayah mempengaruhi kemampuan numerasi	ROO.22.01.01.57			- Dukungan sosial berupa bantuan alat tulis dan bahan ajar numerasi- Program	Kabid Pembinaan Sekolah	
	Perilaku peserta didik dipengaruhi lingkungan sosial negatif	ROO.22.01.01.58			- Kolaborasi sekolah-orang tua melalui kegiatan parenting- Edukasi literasi	Kabid Pembinaan Sekolah	
	Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter	ROO.22.01.01.59			- Pelatihan dan pendampingan guru dalam pembelajaran berbasis karakter- Supervisi akademik berfokus pada aspek karakter- Penggunaan instrumen asesmen karakter yang terstandar	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan positif	ROO.22.01.01.60			- Revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler berbasis karakter- Pembinaan rutin kegiatan OSIS, Pramuka, dan keagamaan- Integrasi kegiatan karakter dalam kalender akademik sekolah	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Lemahnya keterlibatan orang tua dalam pembinaan karakter	ROO.22.01.01.61			- Sosialisasi program pembinaan karakter keluarga- Buku penghubung karakter antara sekolah dan rumah- Forum komunikasi orang tua dan guru secara berkala	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Sistem penilaian karakter belum terimplementasi secara baik	ROO.22.01.01.62			- Penerapan instrumen asesmen karakter berbasis observasi dan portofolio- Pelatihan guru dalam	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah	
	Kurangnya dukungan kebijakan dan monitoring dari Dinas Pendidikan	ROO.22.01.01.63			-Program penguatan karakter tidak menjadi prioritas - Nilai rerata karakter tidak meningkat secara signifikan	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
IV 1. Risiko Operasional OPD Kegiatan							
	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.64			- Pendataan kondisi Prasarana secara berkala melalui Dapodik - Prioritas perbaikan	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.65			- Pelatihan operator Dapodik tentang pengisian data prasarana	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.66			- Pembentukan tim pemeliharaan prasarana di sekolah - Penyusunan jadwal dan standar perawatan berkala - Pembinaan kepala sekolah dalam manajemen aset pendidikan	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.67			- Pemetaan kebutuhan prasarana berbasis data	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.68			- Penguatan pengawasan internal (APIP) terhadap proses pengadaan - Peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan perencana - Audit dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.69			- Pemutakhiran data Dapodik secara berkala - Integrasi data kemiskinan dengan DTKS dan sekolah	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.70			- Peningkatan transparansi dan pengawasan bantuan pendidikan - Penyesuaian nilai bantuan	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.71			- Sosialisasi pendidikan wajib dan hak anak atas pendidikan - Keterlibatan tokoh	Kepala Seksi Sarpras SD	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.72			- Pembangunan sekolah filial/satelit di daerah terpencil	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.73			- Pembentukan tim koordinasi program afirmasi pendidikan- Integrasi	Kepala Seksi Peserta Didik dan	
	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.74			- Intervensi cepat melalui bantuan darurat pendidikan - Kerja sama dengan sektor	Kepala Seksi Peserta Didik dan	
	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.75			- Penjadwalan pelatihan yang fleksibel dan relevan	Kepala Seksi Peserta Didik	
	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.76			- Analisis kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis)	Kepala Seksi Peserta Didik dan	
	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.77			- Pelatihan calon fasilitator daerah (master trainer) - Pembentukan komunitas	Kepala Seksi Peserta Didik dan	
	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.78			- Pelatihan literasi digital dan penggunaan platform pembelajaran	Kepala Seksi Peserta Didik dan	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.79			- Pengembangan database pelatihan PTK berbasis	Kepala Seksi Pendidik dan	
	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.80			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran dan coaching - Penguatan budaya belajar di sekolah (learning organization) - Supervisi akademik berbasis kinerja guru	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.81			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring (SIPLAH/BOS Salur)	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.82			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.83			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.84			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi sederhana	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.85			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.86			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring (SIPLAH/BOS Salur)	Kepala Seksi PAUD	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.87			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi PAUD	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.88			- Penegakan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas	Kepala Seksi PAUD	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.89			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS	Kepala Seksi PAUD	
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.90			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi PAUD	
	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.91			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring (SIPLAH/BOS Salur)	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.92			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.93			- Penyusunan kebijakan sekolah inklusif dan anti diskriminasi - Sosialisasi dan pelatihan seluruh warga sekolah	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.94			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.95			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.96			- Implementasi program anti perundungan dan toleransi - Pembentukan tim satgas perlindungan anak di sekolah - Pelibatan guru BK dan orang tua dalam pemantauan perilaku siswa	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.97			- Sosialisasi dan edukasi publik tentang pendidikan inklusif - Pembentukan forum orang tua peduli inklusi - Kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas dan lembaga sosial	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.98			- Pengembangan instrumen penilaian iklim inklusif sekolah - Monitoring rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan - Publikasi hasil asesmen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.99			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen sekolah inklusif - Penilaian kinerja kepala sekolah berbasis indikator lingkungan ramah anak dan inklusi - Pembinaan dan supervisi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.100			- Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan - Pembentukan Satgas Perlindungan Anak Sekolah	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.101			- Edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial - Kampanye anti-bullying di sekolah - Pembinaan karakter dan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.102			- Audit keselamatan sekolah secara berkala - Pemeliharaan dan perbaikan sarana prioritas	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.103			- Penyusunan SOP tanggap darurat dan jalur evakuasi - Simulasi bencana secara berkala	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.104			- Penjagaan sekolah oleh petugas keamanan - Pembatasan akses tamu	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.105			- Penguatan layanan bimbingan konseling - Pelatihan guru dalam deteksi dini masalah psikologis - Program sekolah sehat dan ramah anak	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.106			- Sosialisasi kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan - Pembuatan dan penerapan SOP perlindungan anak - Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.107			- Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) secara rutin - Pengadaan dan distribusi bahan bacaan bermutu - Integrasi kegiatan membaca dalam semua	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi masih terbatas	ROO.22.01.01.108			- Pelatihan dan pendampingan guru dalam pembelajaran literasi - Pengembangan komunitas belajar guru (KKG/MGMP) literasi - Supervisi akademik berfokus pada literasi	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung literasi di sekolah	ROO.22.01.01.109			- Optimalisasi penggunaan BOS dan DAK Nonfisik untuk sarana literasi - Revitalisasi perpustakaan dan pojok baca - Kerja sama dengan penerbit dan perpustakaan daerah	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Lemahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat	ROO.22.01.01.110			- Sosialisasi Gerakan Literasi Keluarga (GLK) - Kolaborasi dengan PKK, perpustakaan desa, dan komunitas baca - Lomba dan festival literasi tingkat lokal	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Belum optimalnya sistem penilaian dan monitoring capaian literasi	ROO.22.01.01.11 1			- Pengembangan instrumen penilaian literasi oleh dinas - Asesmen literasi berkala di semua jenjang - Pelaporan hasil asesmen untuk evaluasi kebijakan	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca dan menulis	ROO.22.01.01.11 2			- Penguatan pembelajaran berbasis proyek literasi - Kegiatan menulis kreatif, pojok karya siswa, dan lomba literasi - Pemberian penghargaan bagi siswa dan sekolah literasi aktif	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.11 3			- Penguatan pembelajaran numerasi kontekstual dan berbasis masalah- Pemanfaatan alat peraga dan permainan edukatif- Integrasi numerasi dalam	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran numerasi masih terbatas	ROO.22.01.01.11 4			- Pelatihan guru tentang pembelajaran numerasi berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills)- Supervisi akademik oleh kepala sekolah dan	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Kurangnya sarana dan bahan ajar numerasi yang mendukung	ROO.22.01.01.11 5			- Penyediaan bahan ajar numerasi kontekstual- Pemanfaatan platform digital numerasi (seperti AKM, Rapor Pendidikan, Rumah Belajar)- Pengembangan modul numerasi lokal berbasis	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika	ROO.22.01.01.11 6			- Pembelajaran numerasi berbasis permainan dan proyek- Kegiatan lomba numerasi dan klub matematika- Pemberian penghargaan bagi siswa dengan peningkatan hasil belajar	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Dukungan keluarga terhadap pembelajaran numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.11 7			- Sosialisasi literasi dan numerasi keluarga-	Kepala Seksi Peserta Didik	
	Belum optimalnya sistem asesmen numerasi di sekolah	ROO.22.01.01.11 8			- Pengembangan instrumen penilaian formatif numerasi- Analisis hasil Asesmen Nasional (AN) untuk tindak lanjut pembelajaran- Pelaporan capaian numerasi sebagai dasar supervisi	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya jumlah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik	ROO.22.01.01.11 9			- Pembinaan kepala sekolah tentang manajemen berbasis numerasi- Integrasi numerasi dalam	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan	
	Kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non -akademik	ROO.22.01.01.12 0			- Revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah - Kerja sama dengan lembaga seni, olahraga, dan organisasi kepemudaan - Lomba antar sekolah dalam bidang non-akademik	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi siswa	ROO.22.01.01.12 1			- Sosialisasi pentingnya prestasi akademik dan non-akademik - Pelibatan komite sekolah dan orang tua dalam kegiatan pembinaan prestasi - Program penghargaan bagi siswa dan keluarga berprestasi	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan kegiatan prestasi	ROO.22.01.01.12 2			- Penganggaran pembinaan prestasi dalam RKAS	Kepala Seksi Peserta Didik	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Guru pembina dan pelatih belum memiliki kompetensi khusus	ROO.22.01.01.12 3			- Pelatihan guru pembina lomba akademik dan non-	Kepala Seksi Peserta Didik	
	Tidak adanya sistem seleksi dan pemantauan prestasi siswa yang berkelanjutan	ROO.22.01.01.12 4			- Pembuatan database prestasi siswa	Kepala Seksi Peserta Didik	
	Ketidakeimbangan fokus antara prestasi akademik dan non-akademik	ROO.22.01.01.12 5			- Penyeimbangan kurikulum akademik dan kegiatan ekstrakurikuler - Integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran - Evaluasi capaian prestasi secara proporsional di kedua bidang	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya internalisasi nilai karakter di lingkungan sekolah	ROO.22.01.01.12 6			- Penurunan sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati	Kepala Seksi Peserta Didik	
	Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	ROO.22.01.01.12 7			- Ketidakkonsistenan nilai antara di sekolah dan di	Kepala Seksi Peserta Didik	
	Ketidakterpaduan antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter	ROO.22.01.01.12 8			- Pendidikan karakter hanya bersifat formalitas- Nilai	Kepala Seksi Peserta Didik	
	Rendahnya kapasitas guru dalam menilai dan menumbuhkan karakter peserta didik	ROO.22.01.01.12 9			- Hasil penilaian karakter tidak objektif atau tidak	Kepala Seksi Peserta Didik	
	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter	ROO.22.01.01.13 0			- Siswa kurang terlatih dalam kerja sama, tanggung jawab, dan disiplin- Tidak tercapai indikator karakter unggul	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Lemahnya budaya organisasi sekolah yang mendukung karakter baik	ROO.22.01.01.13 1			- Nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab tidak tertanam kuat- Menurunnya kredibilitas sekolah	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.13 2			- Pendataan kondisi sarana secara berkala melalui Dapodik - Prioritas perbaikan sarana rusak berat melalui DAK fisik - Pengawasan rutin terhadap pemeliharaan aset sekolah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	
	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.13 3			- Pelatihan operator Dapodik tentang pengisian data sarana - Verifikasi lapangan secara berkala - Integrasi data Dapodik dengan sistem monitoring aset daerah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.13 4			- Pembentukan tim pemeliharaan sarana di sekolah - Penyusunan jadwal dan standar perawatan berkala - Pembinaan kepala sekolah dalam manajemen aset pendidikan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	
	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.13 5			- Pemetaan kebutuhan sarana berbasis data spasial - Prioritas alokasi untuk sekolah di wilayah 3T - Program afirmasi dan bantuan khusus daerah sulit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.13 6			- Penguatan pengawasan internal (APIP) terhadap proses pengadaan - Peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan perencanaan - Audit dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.137			- Pendataan kondisi sarana secara berkala melalui Dapodik - Prioritas perbaikan sarana rusak berat melalui DAK fisik - Pengawasan rutin terhadap pemeliharaan aset sekolah	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.138			- Pelatihan operator Dapodik tentang pengisian data sarana - Verifikasi lapangan secara berkala - Integrasi data Dapodik dengan sistem monitoring aset daerah	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.139			- Pembentukan tim pemeliharaan sarana di sekolah - Penyusunan jadwal dan standar perawatan berkala - Pembinaan kepala sekolah dalam manajemen aset pendidikan	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.140			- Pemetaan kebutuhan sarana berbasis data spasial - Prioritas alokasi untuk sekolah di wilayah 3T - Program afirmasi dan bantuan khusus daerah sulit	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.141			- Penguatan pengawasan internal (APIP) terhadap proses pengadaan - Peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan perencana - Audit dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa	Kepala Seksi Sarpras SD	
	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.142			- Pemutakhiran data Dapodik secara berkala - Integrasi data kemiskinan dengan DTKS dan sekolah - Verifikasi dan validasi data lapangan oleh tim lintas sektor	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.143			- Peningkatan transparansi dan pengawasan bantuan pendidikan - Penyesuaian nilai bantuan dengan kebutuhan riil peserta didik - Pengawasan partisipatif oleh masyarakat dan sekolah	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.144			- Sosialisasi pendidikan wajib dan hak anak atas pendidikan - Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kampanye pendidikan - Pemberdayaan kader PKK dan guru kunjung dalam advokasi keluarga	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.145			- Pembangunan sekolah filial/satelit di daerah terpencil - Program guru kunjung atau kelas multi-grade - Pemanfaatan sekolah terdekat lintas desa/kecamatan	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.146			- Pembentukan tim koordinasi program afirmasi pendidikan - Integrasi program daerah dan pusat untuk siswa miskin - Monitoring dan evaluasi tahunan pencapaian indikator	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.147			- Intervensi cepat melalui bantuan darurat pendidikan - Kerja sama dengan sektor swasta/CSR untuk beasiswa tanggap darurat - Pemantauan rutin perubahan sosial ekonomi keluarga siswa	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	
	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.148			- Penjadwalan pelatihan yang fleksibel dan relevan - Sosialisasi manfaat peningkatan kompetensi secara intensif - Insentif bagi guru yang aktif mengikuti pelatihan	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.149			- Analisis kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis) - Penggunaan narasumber berpengalaman sesuai bidang - Evaluasi pascapelatihan berbasis kinerja	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.150			- Pelatihan calon fasilitator daerah (master trainer) - Pembentukan komunitas belajar guru (KGB, MGMP SD) - Supervisi akademik berkelanjutan oleh pengawas	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.151			- Pelatihan literasi digital dan penggunaan platform pembelajaran - Penyediaan sarana TIK dasar di sekolah - Pendampingan teknis penggunaan aplikasi oleh tim IT Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.152			- Pengembangan database pelatihan PTK berbasis Dapodik - Laporan berkala peningkatan kompetensi per sekolah - Penetapan indikator kinerja pelatihan guru	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.153			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran dan coaching - Penguatan budaya belajar di sekolah (learning organization) - Supervisi akademik berbasis kinerja guru	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.154			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring (SIP/AR/POS Sekolah)	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.155			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.156			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.157			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.158			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.159			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring (SIPD PAUD BOS Selanjutnya)	Kepala Seksi PAUD	
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.160			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi PAUD	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.161			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi PAUD	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.162			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi	Kepala Seksi PAUD	
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.163			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi PAUD	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.164			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.165			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.166			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.167			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi bendahara	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.168			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai kebutuhan - Evaluasi berkala terhadap kelengkapan dokumen administrasi sekolah	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.169			- Implementasi transparansi laporan keuangan di papan informasi sekolah - Penguatan peran komite sekolah dalam pengawasan - Penegakan sanksi bagi pelanggaran administrasi dan keuangan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.170			- Pengembangan sistem pelaporan keuangan terintegrasi - Monev triwulanan kepatuhan pelaporan BOS dan administrasi sekolah - Forum koordinasi dinas –sekolah untuk perbaikan sistem pelaporan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.171			- Penyusunan kebijakan sekolah inklusif dan anti diskriminasi - Sosialisasi dan pelatihan seluruh warga sekolah tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.172			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi bendahara	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.173			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.174			- Implementasi program anti perundungan dan toleransi - Pembentukan tim satgas perlindungan anak di sekolah - Pelibatan guru BK dan orang tua dalam pemantauan perilaku siswa	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.175			- Sosialisasi dan edukasi publik tentang pendidikan inklusif - Pembentukan forum orang tua peduli inklusi - Kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas dan lembaga sosial	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.176			- Pengembangan instrumen penilaian iklim inklusif sekolah - Monitoring rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan - Publikasi hasil asesmen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.177			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen sekolah inklusif - Penilaian kinerja kepala sekolah berbasis indikator lingkungan ramah anak dan inklusi - Pembinaan dan supervisi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.178			- Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan - Pembentukan Satgas Perlindungan Anak Sekolah - Pelatihan guru dan siswa tentang pencegahan perundungan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.179			- Edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial - Kampanye anti-bullying di sekolah - Pembinaan karakter dan konseling rutin	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.180			- Audit keselamatan sekolah secara berkala - Pemeliharaan dan perbaikan sarana prioritas - Penganggaran rutin untuk keamanan dan keselamatan sekolah	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.181			- Penyusunan SOP tanggap darurat dan jalur evakuasi - Simulasi bencana secara berkala - Koordinasi dengan BPBD dan aparat keamanan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.18 2			- Penjagaan sekolah oleh petugas keamanan - Pembatasan akses tamu dengan kartu identitas - Koordinasi dengan pihak kepolisian setempat	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.18 3			- Penguatan layanan bimbingan konseling - Pelatihan guru dalam deteksi dini masalah psikologis - Program sekolah sehat dan ramah anak	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.18 4			- Sosialisasi kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan - Pembuatan dan penerapan SOP perlindungan anak - Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya kemampuan literasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.18 5			- Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) secara rutin - Pengadaan dan distribusi bahan bacaan bermutu - Integrasi kegiatan membaca dalam semua mata pelajaran	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi masih terbatas	ROO.22.01.01.18 6			- Pelatihan dan pendampingan guru dalam pembelajaran literasi - Pengembangan komunitas belajar guru (KKG/MGMP) literasi - Supervisi akademik berfokus pada literasi	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung literasi di sekolah	ROO.22.01.01.18 7			- Optimalisasi penggunaan BOS dan DAK Nonfisik untuk sarana literasi - Revitalisasi perpustakaan dan pojok baca - Kerja sama dengan penerbit dan perpustakaan daerah	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Lemahnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat	ROO.22.01.01.18 8			- Sosialisasi Gerakan Literasi Keluarga (GLK) - Kolaborasi dengan PKK, perpustakaan desa, dan komunitas baca - Lomba dan festival literasi tingkat lokal	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Belum optimalnya sistem penilaian dan monitoring capaian literasi	ROO.22.01.01.18 9			- Pengembangan instrumen penilaian literasi oleh dinas - Asesmen literasi berkala di semua jenjang - Pelaporan hasil asesmen untuk evaluasi kebijakan	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya motivasi peserta didik untuk membaca dan menulis	ROO.22.01.01.19 0			- Penguatan pembelajaran berbasis proyek literasi - Kegiatan menulis kreatif, pojok karya siswa, dan lomba literasi - Pemberian penghargaan bagi siswa dan sekolah literasi aktif	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sebagian sekolah	ROO.22.01.01.19 1			- Penguatan pembelajaran numerasi kontekstual dan berbasis masalah- Pemanfaatan alat peraga dan permainan edukatif- Integrasi numerasi dalam semua mata pelajaran	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran numerasi masih terbatas	ROO.22.01.01.19 2			- Pelatihan guru tentang pembelajaran numerasi berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills)- Supervisi akademik oleh kepala sekolah dan pengawas- Pembentukan komunitas guru numerasi	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya sarana dan bahan ajar numerasi yang mendukung	ROO.22.01.01.19 3			- Penyediaan bahan ajar numerasi kontekstual- Pemanfaatan platform digital numerasi (seperti AKM, Rapor Pendidikan, Rumah Belajar)- Pengembangan modul numerasi lokal berbasis konteks daerah	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika	ROO.22.01.01.19 4			- Pembelajaran numerasi berbasis permainan dan proyek- Kegiatan lomba numerasi dan klub matematika- Pemberian penghargaan bagi siswa dengan peningkatan hasil belajar	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Dukungan keluarga terhadap pembelajaran numerasi masih rendah	ROO.22.01.01.19 5			- Sosialisasi literasi dan numerasi keluarga- Program belajar bersama orang tua (home numeracy activities)- Kolaborasi sekolah-komite-orang tua dalam kegiatan numerasi	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Belum optimalnya sistem asesmen numerasi di sekolah	ROO.22.01.01.19 6			- Pengembangan instrumen penilaian formatif numerasi- Analisis hasil Asesmen Nasional (AN) untuk tindak lanjut pembelajaran- Pelaporan capaian numerasi sebagai dasar supervisi	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya jumlah peserta didik yang berprestasi di bidang akademik	ROO.22.01.01.19 7			- Pembinaan kepala sekolah tentang manajemen berbasis numerasi- Integrasi numerasi dalam perencanaan sekolah- Monitoring dan evaluasi capaian numerasi oleh dinas pendidikan	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non -akademik	ROO.22.01.01.19 8			- Revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah - Kerja sama dengan lembaga seni, olahraga, dan organisasi kepemudaan - Lomba antar sekolah dalam bidang non-akademik	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi siswa	ROO.22.01.01.19 9			- Sosialisasi pentingnya prestasi akademik dan non-akademik - Pelibatan komite sekolah dan orang tua dalam kegiatan pembinaan prestasi - Program penghargaan bagi siswa dan keluarga	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Keterbatasan sarana, prasarana, dan pendanaan kegiatan prestasi	ROO.22.01.01.200			- Penganggaran pembinaan prestasi dalam RKAS sekolah - Kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri (CSR pendidikan) - Pemanfaatan dana BOS dan bantuan pemerintah daerah secara optimal	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Guru pembina dan pelatih belum memiliki kompetensi khusus	ROO.22.01.01.201			- Pelatihan guru pembina lomba akademik dan non-akademik - Kolaborasi dengan pelatih eksternal atau alumni berprestasi - Pengembangan komunitas guru pembina prestasi	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Tidak adanya sistem seleksi dan pemantauan prestasi siswa yang berkelanjutan	ROO.22.01.01.202			- Pembuatan database prestasi siswa - Penilaian minat dan bakat secara periodik - Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan prestasi	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Ketidakeimbangan fokus antara prestasi akademik dan non-akademik	ROO.22.01.01.203			- Penyeimbangan kurikulum akademik dan kegiatan ekstrakurikuler - Integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran - Evaluasi capaian prestasi secara proporsional di kedua bidang	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya internalisasi nilai karakter di lingkungan sekolah	ROO.22.01.01.204			- Penguatan implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) - Pelatihan guru tentang pendidikan karakter - Penegakan budaya keteladanan di sekolah	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	ROO.22.01.01.205			- Program parenting dan sosialisasi nilai karakter kepada orang tua - Kerjasama sekolah dengan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan - Pembentukan ekosistem pendidikan karakter berbasis komunitas	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Ketidakterpaduan antara pembelajaran akademik dan pembentukan karakter	ROO.22.01.01.206			- Integrasi penilaian karakter dalam RPP dan asesmen formatif - Pembiasaan kegiatan positif (upacara, piket, refleksi nilai) - Supervisi kepala sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran karakter	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Rendahnya kapasitas guru dalam menilai dan menumbuhkan karakter peserta didik	ROO.22.01.01.207			- Bimbingan teknis penilaian sikap dan pembentukan karakter - Pendampingan oleh pengawas dan guru inti - Pengembangan instrumen penilaian karakter yang standar	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	
	Kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter	ROO.22.01.01.208			- Pengembangan program ekstrakurikuler wajib dan pilihan berbasis karakter - Kolaborasi dengan lembaga kepemudaan dan keagamaan - Dukungan anggaran kegiatan pembinaan karakter	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Lemahnya budaya organisasi sekolah yang mendukung karakter baik	ROO.22.01.01.209			- Penguatan kepemimpinan kepala sekolah berbasis keteladanan - Pembentukan tim penggerak budaya sekolah positif - Program penghargaan bagi warga sekolah berprestasi	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Rendahnya kondisi fisik sarana pendidikan	ROO.22.01.01.210			- Pendataan kondisi sarana secara berkala melalui Dapodik - Prioritas perbaikan sarana rusak berat melalui DAK fisik - Pengawasan rutin terhadap pemeliharaan aset sekolah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.211			- Pelatihan operator Dapodik tentang pengisian data sarana - Verifikasi lapangan secara berkala - Integrasi data Dapodik dengan sistem monitoring aset daerah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.212			- Pembentukan tim pemeliharaan sarana di sekolah - Penyusunan jadwal dan standar perawatan berkala - Pembinaan kepala sekolah dalam manajemen aset pendidikan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.213			- Pemetaan kebutuhan sarana berbasis data spasial - Prioritas alokasi untuk sekolah di wilayah 3T - Program afirmasi dan bantuan khusus daerah sulit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.214			- Penguatan pengawasan internal (APIP) terhadap proses pengadaan - Peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan perencana - Audit dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.215			- Pendataan kondisi prasarana secara berkala melalui Dapodik - Prioritas perbaikan prasarana rusak berat melalui DAK fisik - Pengawasan rutin terhadap pemeliharaan aset sekolah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Data kondisi Prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.216			- Pelatihan operator Dapodik tentang pengisian data prasarana - Verifikasi lapangan secara berkala - Integrasi data Dapodik dengan sistem monitoring aset daerah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan Prasarana	ROO.22.01.01.217			- Pembentukan tim pemeliharaan prasarana di sekolah - Penyusunan jadwal dan standar perawatan berkala - Pembinaan kepala sekolah dalam manajemen aset pendidikan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.218			- Pemetaan kebutuhan prasarana berbasis data spasial - Prioritas alokasi untuk sekolah di wilayah 3T - Program afirmasi dan bantuan khusus daerah sulit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.219			- Penguatan pengawasan internal (APIP) terhadap proses pengadaan - Peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan perencana - Audit dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa	Kepala Seksi PAUD	
	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.220			- Pemutakhiran data Dapodik secara berkala - Integrasi data kemiskinan dengan DTKS dan sekolah - Verifikasi dan validasi data lapangan oleh tim lintas sektor	Kepala Seksi PAUD	
	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.221			- Peningkatan transparansi dan pengawasan bantuan pendidikan - Penyesuaian nilai bantuan dengan kebutuhan riil peserta didik - Pengawasan partisipatif oleh masyarakat dan sekolah	Kepala Seksi PAUD	
	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.222			- Sosialisasi pendidikan wajib dan hak anak atas pendidikan - Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kampanye pendidikan - Pemberdayaan kader PKK dan guru kunjung dalam edukasi keluarga	Kepala Seksi PAUD	
	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.223			- Pembangunan sekolah filial/satelit di daerah terpencil - Program guru kunjung atau kelas multi-grade - Pemanfaatan sekolah terdekat lintas desa/kecamatan	Kepala Seksi PAUD	
	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.224			- Pembentukan tim koordinasi program afirmasi pendidikan - Integrasi program daerah dan pusat untuk siswa miskin - Monitoring dan evaluasi tahunan pencapaian indikator	Kepala Seksi PAUD	
	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.225			- Intervensi cepat melalui bantuan darurat pendidikan - Kerja sama dengan sektor swasta/CSR untuk beasiswa tanggap darurat - Pemantauan rutin perubahan sosial ekonomi keluarga siswa	Kepala Seksi PAUD	
	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.226			- Penjadwalan pelatihan yang fleksibel dan relevan - Sosialisasi manfaat peningkatan kompetensi secara intensif - Insentif bagi guru yang aktif mengikuti pelatihan	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.227			- Analisis kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis) - Penggunaan narasumber berpengalaman sesuai bidang - Evaluasi pascapelatihan berbasis kinerja	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.228			- Pelatihan calon fasilitator daerah (master trainer) - Pembentukan komunitas belajar guru (KGB, MGMP SD) - Supervisi akademik berkelanjutan oleh pengawas	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.229			- Pelatihan literasi digital dan penggunaan platform pembelajaran - Penyediaan sarana TIK dasar di sekolah - Pendampingan teknis penggunaan aplikasi oleh tim IT Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.230			- Pengembangan database pelatihan PTK berbasis Dapodik - Laporan berkala peningkatan kompetensi per sekolah - Penetapan indikator kinerja pelatihan guru	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.231			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran dan coaching - Penguatan budaya belajar di sekolah (learning organization) - Supervisi akademik berbasis kinerja guru	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.232			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring	Kepala Seksi PAUD	
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.233			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS- Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan- Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi PAUD	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.234			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi PAUD	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.235			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi bendahara	Kepala Seksi PAUD	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.236			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi PAUD	
	Rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan PAUD tentang nilai kebhinekaan dan inklusifitas	ROO.22.01.01.237			- Pelatihan dan bimbingan teknis pendidikan karakter, kebhinekaan, dan inklusifitas - Integrasi nilai-nilai kebhinekaan dalam RPPH dan kegiatan bermain anak- Supervisi berkala oleh kepala PAUD	Kepala Seksi PAUD	
	Kurangnya penerapan prinsip inklusif di lembaga PAUD	ROO.22.01.01.238			- Sosialisasi dan advokasi PAUD inklusif kepada lembaga dan masyarakat - Pengadaan sarana belajar ramah anak dan alat bantu sederhana- Kolaborasi dengan SLB dan lembaga pendamping ABK	Kepala Seksi PAUD	
	Kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat terhadap penerapan kebhinekaan dan inklusifitas	ROO.22.01.01.239			- Program parenting tematik tentang kebhinekaan dan toleransi- Kegiatan bersama masyarakat seperti "Hari Keberagaman" atau "PAUD Ramah Semua Anak" - Kemitraan dengan tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat	Kepala Seksi PAUD	
	Keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran yang mencerminkan nilai kebhinekaan	ROO.22.01.01.240			- Pengembangan bahan ajar dan APE berbasis lokal dan keberagaman budaya - Kurasi sumber belajar yang inklusif oleh Dinas Pendidikan - Pelibatan guru PAUD kreatif dalam pembuatan media tematik kebhinekaan	Kepala Seksi PAUD	
	Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi nilai kebhinekaan dan inklusifitas di PAUD	ROO.22.01.01.241			- Integrasi kegiatan kebhinekaan dalam program PAUD Holistik Integratif - Advokasi anggaran untuk penguatan karakter dan inklusifitas - Kolaborasi dengan mitra (Dik, CSR, lembaga)	Kepala Seksi PAUD	
	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.242			- Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan - Pembentukan Satgas Perlindungan Anak Sekolah - Pelatihan guru dan siswa tentang pencegahan perundungan	Kepala Seksi PAUD	
	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.243			- Edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial - Kampanye anti-bullying di sekolah - Pembinaan karakter dan konseling rutin	Kepala Seksi PAUD	
	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.244			- Audit keselamatan sekolah secara berkala - Pemeliharaan dan perbaikan sarana prioritas - Penganggaran rutin untuk keamanan dan keselamatan sekolah	Kepala Seksi PAUD	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.245			- Penyusunan SOP tanggap darurat dan jalur evakuasi - Simulasi bencana secara berkala - Koordinasi dengan BPBD dan aparat keamanan	Kepala Seksi PAUD	
	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.246			- Penjagaan sekolah oleh petugas keamanan - Pembatasan akses tamu dengan kartu identitas - Koordinasi dengan pihak kepolisian setempat	Kepala Seksi PAUD	
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.247			- Penguatan layanan bimbingan konseling - Pelatihan guru dalam deteksi dini masalah psikologis - Program sekolah sehat dan ramah anak	Kepala Seksi PAUD	
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.248			- Sosialisasi kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan - Pembuatan dan penerapan SOP perlindungan anak - Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Rendahnya kondisi fisik sarana dan prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.249			- Pendataan kondisi sarana secara berkala melalui Dapodik - Prioritas perbaikan sarana rusak berat melalui DAK fisik - Pengawasan rutin terhadap pemeliharaan aset sekolah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Data kondisi sarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.250			- Pelatihan operator Dapodik tentang pengisian data sarana - Verifikasi lapangan secara berkala - Integrasi data Dapodik dengan sistem monitoring aset daerah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan sarana	ROO.22.01.01.251			- Pembentukan tim pemeliharaan sarana di sekolah - Penyusunan jadwal dan standar perawatan berkala - Pembinaan kepala sekolah dalam manajemen aset pendidikan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Ketimpangan kondisi sarana antar wilayah	ROO.22.01.01.252			- Pemetaan kebutuhan sarana berbasis data spasial - Prioritas alokasi untuk sekolah di wilayah 3T - Program afirmasi dan bantuan khusus daerah sulit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.253			- Penguatan pengawasan internal (APIP) terhadap proses pengadaan - Peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan perencana - Audit dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Rendahnya kondisi fisik prasarana pendidikan	ROO.22.01.01.254			- Pendataan kondisi prasarana secara berkala melalui Dapodik - Prioritas perbaikan prasarana rusak berat melalui DAK fisik - Pengawasan rutin terhadap pemeliharaan aset sekolah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Data kondisi prasarana belum akurat dan mutakhir	ROO.22.01.01.255			- Pelatihan operator Dapodik tentang pengisian data prasarana - Verifikasi lapangan secara berkala - Integrasi data Dapodik dengan sistem monitoring aset daerah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya pemeliharaan prasarana	ROO.22.01.01.256			- Pembentukan tim pemeliharaan prasarana di sekolah - Penyusunan jadwal dan standar perawatan berkala - Pembinaan kepala sekolah dalam manajemen aset pendidikan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Ketimpangan kondisi prasarana antar wilayah	ROO.22.01.01.257			- Pemetaan kebutuhan prasarana berbasis data spasial - Prioritas alokasi untuk sekolah di wilayah 3T - Program afirmasi dan bantuan khusus daerah sulit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
	Proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien atau bermasalah	ROO.22.01.01.258			- Penguatan pengawasan internal (APIP) terhadap proses pengadaan - Peningkatan kapasitas pejabat pengadaan dan perencana - Audit dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Data peserta didik tidak mampu tidak akurat atau tidak terbaru	ROO.22.01.01.259			- Pemutakhiran data Dapodik secara berkala - Integrasi data kemiskinan dengan DTKS dan sekolah - Verifikasi dan validasi data lapangan oleh tim lintas sektor	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Bantuan sosial pendidikan tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi	ROO.22.01.01.260			- Peningkatan transparansi dan pengawasan bantuan pendidikan - Penyesuaian nilai bantuan dengan kebutuhan riil peserta didik - Pengawasan partisipatif oleh masyarakat dan sekolah	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan	ROO.22.01.01.261			- Sosialisasi pendidikan wajib dan hak anak atas pendidikan - Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kampanye pendidikan - Pemberdayaan kader PKK dan guru kunjung dalam advokasi keluarga	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan sarana dan layanan sekolah di wilayah miskin atau terpencil	ROO.22.01.01.262			- Pembangunan sekolah filial/satelit di daerah terpencil - Program guru kunjung atau kelas multi-grade - Pemanfaatan sekolah terdekat lintas desa/kecamatan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Program afirmasi belum terintegrasi dan berkelanjutan	ROO.22.01.01.263			- Pembentukan tim koordinasi program afirmasi pendidikan - Integrasi program daerah dan pusat untuk siswa miskin - Monitoring dan evaluasi tahunan pencapaian indikator	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Dampak sosial ekonomi (pandemi, inflasi, PHK) menurunkan kemampuan keluarga	ROO.22.01.01.264			- Intervensi cepat melalui bantuan darurat pendidikan - Kerja sama dengan sektor swasta/CSR untuk beasiswa tanggap darurat - Pemantauan rutin perubahan sosial ekonomi keluarga siswa	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Rendahnya minat Pondok Pesantren untuk menyelenggarakan program kesetaraan (Paket A, B, C)	ROO.22.01.01.265			- Sosialisasi intensif kepada pimpinan pesantren mengenai manfaat program kesetaraan - Pendampingan teknis pendaftaran dan penyusunan kurikulum kesetaraan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Terbatasnya tenaga pendidik dan tutor yang kompeten untuk mengajar program kesetaraan di pesantren	ROO.22.01.01.266			- Pelatihan tutor kesetaraan bagi guru pesantren - Penugasan guru sekolah formal sebagai tutor tambahan - Penyediaan insentif atau honorarium berbasis kinerja	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran kesetaraan di pesantren	ROO.22.01.01.267			- Bantuan sarana belajar melalui dana hibah pendidikan nonformal - Pemanfaatan ruang belajar pesantren secara multifungsi - Pengajuan bantuan ke Kemendikbudristek melalui Dapodik Nonformal	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kendala perizinan dan administrasi penyelenggaraan program kesetaraan di pesantren	ROO.22.01.01.268			- Penyederhanaan alur perizinan dan pelaporan kesetaraan - Pelatihan operator pesantren dalam pengisian Dapodik nonformal - Pendampingan intensif oleh dinas kabupaten	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan pesantren kesetaraan	ROO.22.01.01.269			- Pembentukan tim koordinasi pembinaan pesantren kesetaraan tingkat kabupaten - Sinkronisasi data antara EMIS dan Dapodik - Rapat koordinasi rutin lintas instansi	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Rendahnya partisipasi guru dalam program peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.270			- Penjadwalan pelatihan yang fleksibel dan relevan - Sosialisasi manfaat peningkatan kompetensi secara intensif - Insentif bagi guru yang aktif mengikuti pelatihan	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kualitas pelatihan tidak sesuai kebutuhan guru	ROO.22.01.01.271			- Analisis kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis) - Penggunaan narasumber berpengalaman sesuai bidang - Evaluasi pascapelatihan berbasis kinerja	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Keterbatasan fasilitator, mentor, dan pengawas dalam pembinaan kompetensi	ROO.22.01.01.272			- Pelatihan calon fasilitator daerah (master trainer)- Pembentukan komunitas belajar guru (KGB, MGMP SD)- Supervisi akademik berkelanjutan oleh pengawas	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Rendahnya pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh guru	ROO.22.01.01.273			- Pelatihan literasi digital dan penggunaan platform pembelajaran- Penyediaan sarana TIK dasar di sekolah- Pendampingan teknis penggunaan aplikasi oleh tim IT Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi	ROO.22.01.01.274			- Pengembangan database pelatihan PTK berbasis Dapodik- Laporan berkala peningkatan kompetensi per sekolah- Penetapan indikator kinerja pelatihan guru	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya dukungan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru	ROO.22.01.01.275			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran dan coaching- Penguatan budaya belajar di sekolah (learning organization)- Supervisi akademik berbasis kinerja guru	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.276			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun- Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan- Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring (SIPLAH/BOS Salur)	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.277			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.278			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.279			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.280			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.281			- Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan - Pembentukan Satgas Perlindungan Anak Sekolah - Pelatihan guru dan siswa tentang pencegahan perundungan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.282			- Edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial - Kampanye anti-bullying di sekolah - Pembinaan karakter dan konseling rutin	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.283			- Audit keselamatan sekolah secara berkala - Pemeliharaan dan perbaikan sarana prioritas - Penganggaran rutin untuk keamanan dan keselamatan sekolah	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.284			- Penyusunan SOP tanggap darurat dan jalur evakuasi - Simulasi bencana secara berkala - Koordinasi dengan BPBD dan aparat keamanan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.285			- Penjagaan sekolah oleh petugas keamanan - Pembatasan akses tamu dengan kartu identitas - Koordinasi dengan pihak kepolisian setempat	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.286			- Penguatan layanan bimbingan konseling - Pelatihan guru dalam deteksi dini masalah psikologis - Program sekolah sehat dan ramah anak	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.287			- Sosialisasi kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan - Pembuatan dan penerapan SOP perlindungan anak - Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.288			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring (SIPLAH/BOS Salur)	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.289			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.290			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.291			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi bendahara	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.292			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai kebutuhan - Evaluasi berkala terhadap kelengkapan dokumen administrasi sekolah	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.293			- Implementasi transparansi laporan keuangan di papan informasi sekolah - Penguatan peran komite sekolah dalam pengawasan - Penegakan sanksi bagi pelanggaran administrasi dan keuangan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.294			- Pengembangan sistem pelaporan keuangan terintegrasi - Monev triwulanan kepatuhan pelaporan BOS dan administrasi sekolah - Forum koordinasi dinas sekolah untuk perbaikan sistem pelaporan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.295			- Penyusunan kebijakan sekolah inklusif dan anti diskriminasi - Sosialisasi dan pelatihan seluruh warga sekolah tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.296			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.297			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.298			- Implementasi program anti perundungan dan toleransi - Pembentukan tim satgas perlindungan anak di sekolah - Pelibatan guru BK dan orang tua dalam pemantauan perilaku siswa	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.299			- Sosialisasi dan edukasi publik tentang pendidikan inklusif - Pembentukan forum orang tua peduli inklusi - Kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas dan lembaga sosial	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.300			- Pengembangan instrumen penilaian iklim inklusif sekolah - Monitoring rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan - Publikasi hasil asesmen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.301			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen sekolah inklusif - Penilaian kinerja kepala sekolah berbasis indikator lingkungan ramah anak dan inklusi - Pembinaan dan supervisi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.302			- Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan - Pembentukan Satgas Perlindungan Anak Sekolah - Pelatihan guru dan siswa tentang pencegahan perundungan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.303			- Edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial - Kampanye anti-bullying di sekolah - Pembinaan karakter dan konseling rutin	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.304			- Audit keselamatan sekolah secara berkala - Pemeliharaan dan perbaikan sarana prioritas - Penganggaran rutin untuk keamanan dan keselamatan sekolah	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.305			- Penyusunan SOP tanggap darurat dan jalur evakuasi - Simulasi bencana secara berkala - Koordinasi dengan BPBD dan aparat keamanan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.306			- Penjagaan sekolah oleh petugas keamanan - Pembatasan akses tamu dengan kartu identitas - Koordinasi dengan pihak kepolisian setempat	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.307			- Penguatan layanan bimbingan konseling - Pelatihan guru dalam deteksi dini masalah psikologis - Program sekolah sehat dan ramah anak	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.308			- Sosialisasi kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan - Pembuatan dan penerapan SOP perlindungan anak - Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.309			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketidaksiesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.310			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.31 1			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.31 2			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi bendahara	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.31 3			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai kebutuhan - Evaluasi berkala terhadap kelengkapan dokumen administrasi sekolah	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.31 4			- Implementasi transparansi laporan keuangan di papan informasi sekolah - Penguatan peran komite sekolah dalam pengawasan - Penegakan sanksi bagi pelanggaran administrasi dan keuangan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.31 5			- Pengembangan sistem pelaporan keuangan terintegrasi - Monev triwulanan kepatuhan pelaporan BOS dan administrasi sekolah - Forum koordinasi dinas –sekolah untuk perbaikan sistem pelaporan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.31 6			- Penyusunan kebijakan sekolah inklusif dan anti-diskriminasi - Sosialisasi dan pelatihan seluruh warga sekolah tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.31 7			- Pelatihan guru tentang strategi pembelajaran diferensiatif dan adaptif - Pendampingan oleh pengawas dan konsultan inklusi - Kolaborasi dengan SLB atau lembaga ahli inklusi	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.31 8			- Pendataan kebutuhan sarana inklusif tiap sekolah- Penggunaan DAK fisik atau CSR untuk pembangunan fasilitas ramah ABK- Pengadaan alat bantu belajar sesuai kebutuhan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.31 9			- Implementasi program anti perundungan dan toleransi - Pembentukan tim satgas perlindungan anak di sekolah - Pelibatan guru BK dan orang tua dalam pemantauan perilaku siswa	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.320			- Sosialisasi dan edukasi publik tentang pendidikan inklusif - Pembentukan forum orang tua peduli inklusi - Kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas dan lembaga sosial	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.321			- Pengembangan instrumen penilaian iklim inklusif sekolah - Monitoring rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan - Publikasi hasil asesmen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.322			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen sekolah inklusif- Penilaian kinerja kepala sekolah berbasis indikator lingkungan ramah anak dan inklusi- Pembinaan dan supervisi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Terjadinya kekerasan fisik atau verbal di lingkungan sekolahsekolah ramah anak.	ROO.22.01.01.323			- Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan - Pembentukan Satgas Perlindungan Anak sekolah - Pelatihan guru dan siswa tentang pencegahan perundungan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Perundungan (bullying) dan kekerasan siber di kalangan peserta didik	ROO.22.01.01.324			- Edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial - Kampanye anti-bullying di sekolah - Pembinaan karakter dan konseling rutin	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kondisi sarana prasarana sekolah belum aman bagi peserta didik	ROO.22.01.01.325			- Audit keselamatan sekolah secara berkala - Pemeliharaan dan perbaikan sarana prioritas - Penganggaran rutin untuk keamanan dan keselamatan sekolah	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana rendah	ROO.22.01.01.326			- Penyusunan SOP tanggap darurat dan jalur evakuasi - Simulasi bencana secara berkala - Koordinasi dengan BPBD dan aparat keamanan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Gangguan keamanan dari pihak luar (orang tak dikenal, konflik masyarakat)	ROO.22.01.01.327			- Penjagaan sekolah oleh petugas keamanan - Pembatasan akses tamu dengan kartu identitas - Koordinasi dengan pihak kepolisian setempat	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kesehatan mental siswa terganggu akibat tekanan belajar atau masalah pribadi	ROO.22.01.01.328			- Penguatan layanan bimbingan konseling - Pelatihan guru dalam deteksi dini masalah psikologis - Program sekolah sehat dan ramah anak	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kebijakan perlindungan anak	ROO.22.01.01.329			- Sosialisasi kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan - Pembuatan dan penerapan SOP perlindungan anak - Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.330			- Sosialisasi jadwal dan format pelaporan sejak awal tahun - Pendampingan administrasi keuangan oleh operator atau tim kecamatan - Monitoring pelaporan melalui aplikasi daring	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketidaksesuaian laporan dengan ketentuan akuntansi dan peraturan BOS	ROO.22.01.01.331			- Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BOS - Pembentukan tim verifikasi laporan keuangan tingkat kecamatan - Supervisi rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Lemahnya pengawasan internal di sekolah	ROO.22.01.01.332			- Penegasan peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan - Audit internal secara berkala oleh tim dinas - Pembinaan langsung bagi sekolah dengan temuan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan kapasitas bendahara dan operator sekolah	ROO.22.01.01.333			- Pelatihan rutin dan sertifikasi bendahara sekolah - Pembuatan panduan praktis pelaporan BOS - Digitalisasi dokumen keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi sederhana	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketidakteraturan administrasi umum sekolah	ROO.22.01.01.334			- Pembinaan manajemen administrasi sekolah - Penempatan tenaga administrasi sesuai kebutuhan - Evaluasi berkala terhadap kelengkapan dokumen administrasi sekolah	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya integritas dalam pengelolaan keuangan sekolah	ROO.22.01.01.335			- Implementasi transparansi laporan keuangan di papan informasi sekolah - Penguatan peran komite sekolah dalam pengawasan - Penegakan sanksi bagi pelanggaran administrasi dan keuangan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi pelaporan di tingkat dinas	ROO.22.01.01.336			- Pengembangan sistem pelaporan keuangan terintegrasi - Monev triwulanan kepatuhan pelaporan BOS dan administrasi sekolah - Forum koordinasi dinas –sekolah untuk perbaikan sistem pelaporan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman peserta didik	ROO.22.01.01.337			- Penyusunan kebijakan sekolah inklusif dan anti diskriminasi - Sosialisasi dan pelatihan seluruh warga sekolah tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Guru belum siap menghadapi keberagaman kemampuan dan kebutuhan peserta didik	ROO.22.01.01.338			- Pelatihan guru tentang strategi pembelajaran diferensiatif dan adaptif - Pendampingan oleh pengawas dan konsultan inklusi - Kolaborasi dengan SLB atau lembaga ahli inklusi	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus	ROO.22.01.01.339			- Pendataan kebutuhan sarana inklusif tiap sekolah - Penggunaan DAK fisik atau CSR untuk pembangunan fasilitas ramah ABK - Pengadaan alat bantu belajar sesuai kebutuhan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Sikap intoleran atau perundungan terhadap siswa tertentu masih terjadi	ROO.22.01.01.340			- Implementasi program anti perundungan dan toleransi - Pembentukan tim satgas perlindungan anak di sekolah - Pelibatan guru BK dan orang tua dalam pemantauan perilaku siswa	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah inklusif masih rendah	ROO.22.01.01.341			- Sosialisasi dan edukasi publik tentang pendidikan inklusif - Pembentukan forum orang tua peduli inklusi - Kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas dan lembaga sosial	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Belum ada sistem monitoring dan evaluasi khusus terkait iklim inklusifitas	ROO.22.01.01.342			- Pengembangan instrumen penilaian iklim inklusif sekolah - Monitoring rutin oleh pengawas dan Dinas Pendidikan - Publikasi hasil asesmen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kepemimpinan kepala sekolah belum berorientasi pada budaya inklusif	ROO.22.01.01.343			- Pelatihan kepala sekolah dalam manajemen sekolah inklusif- Penilaian kinerja kepala sekolah berbasis indikator lingkungan ramah anak dan inklusi- Pembinaan dan supervisi oleh Dinas Pendidikan	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	2. Risiko Operasional OPD Program Pengembangan Kurikulum	0				0	
	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.344			- Sosialisasi dan pelatihan penerapan kurikulum nasional kepada kepala sekolah dan guru - Monitoring implementasi kurikulum oleh pengawas sekolah - Penyediaan panduan dan contoh perangkat ajar	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.345			- Penetapan dan revisi regulasi muatan lokal oleh pemerintah daerah - Pelatihan penyusunan bahan ajar muatan lokal bagi guru - Integrasi kegiatan budaya dan lokalitas dalam kegiatan sekolah	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.346			- Bimbingan teknis implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal - Supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah - Pendampingan oleh guru penggerak atau fasilitator daerah	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.347			- Pembentukan tim pengembang kurikulum daerah terpadu - Harmonisasi kurikulum melalui forum MGMP/MGMPD - Evaluasi rutin kesesuaian muatan lokal dengan kurikulum nasional	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.348			- Sosialisasi dan pelatihan penerapan kurikulum nasional kepada kepala sekolah dan guru - Monitoring implementasi kurikulum oleh pengawas sekolah - Penyediaan panduan dan bentuk perangkat ajar	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.349			- Penetapan dan revisi regulasi muatan lokal oleh pemerintah daerah - Pelatihan penyusunan bahan ajar muatan lokal bagi guru - Integrasi kegiatan budaya dan lokalitas dalam kegiatan sekolah	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.350			- Bimbingan teknis implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal - Supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah - Pendampingan oleh guru penggerak atau fasilitator daerah	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.351			- Pembentukan tim pengembang kurikulum daerah terpadu - Harmonisasi kurikulum melalui forum MGMP/MGMPD - Evaluasi rutin kesesuaian muatan lokal dengan kurikulum nasional	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.352			- Sosialisasi dan pelatihan penerapan kurikulum nasional kepada kepala sekolah dan guru - Monitoring implementasi kurikulum oleh pengawas sekolah - Penyediaan panduan dan bentuk perangkat ajar	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.353			- Penetapan dan revisi regulasi muatan lokal oleh pemerintah daerah - Pelatihan penyusunan bahan ajar muatan lokal bagi guru - Integrasi kegiatan budaya dan lokalitas dalam kegiatan sekolah	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.354			- Bimbingan teknis implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal - Supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah - Pendampingan oleh guru penggerak atau fasilitator daerah	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.355			- Pembentukan tim pengembang kurikulum daerah terpadu - Harmonisasi kurikulum melalui forum MGMP/MGMPD - Evaluasi rutin kesesuaian muatan lokal dengan kurikulum nasional	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Tidak semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum nasional sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.356			- Sosialisasi dan pelatihan penerapan kurikulum nasional kepada kepala sekolah dan guru - Monitoring implementasi kurikulum oleh pengawas sekolah - Penyediaan panduan dan	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Pelaksanaan muatan lokal tidak optimal di sekolah	ROO.22.01.01.357			- Penetapan dan revisi regulasi muatan lokal oleh pemerintah daerah - Pelatihan penyusunan bahan ajar muatan lokal bagi guru - Integrasi kegiatan budaya dan lokalitas dalam	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan muatan lokal	ROO.22.01.01.358			- Bimbingan teknis implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal - Supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah - Pendampingan oleh guru penggerak atau fasilitator	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak adanya sinkronisasi antara kurikulum nasional dan muatan lokal	ROO.22.01.01.359			- Pembentukan tim pengembang kurikulum daerah terpadu - Harmonisasi kurikulum melalui forum MGMP/MGMPD - Evaluasi rutin kesesuaian muatan lokal dengan	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	2. Risiko Operasional OPD Kegiatan	0				0	
	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.360			- Pemetaan potensi lokal daerah sebagai dasar penyusunan muatan lokal - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perancangan kurikulum - Evaluasi periodik relevansi isi muatan lokal	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.361			- Pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru dan pengembang kurikulum - Penguatan peran pengawas dan tim kurikulum sekolah - Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau pakar	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.362			- Penyusunan dan distribusi modul pembelajaran muatan lokal - Pemanfaatan sumber belajar dari potensi lingkungan sekitar - Penganggaran kegiatan pengembangan bahan ajar	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	
	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.363			- Pemetaan potensi lokal daerah sebagai dasar penyusunan muatan lokal - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perancangan kurikulum - Evaluasi periodik relevansi isi muatan lokal	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.364			- Pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru dan pengembang kurikulum - Penguatan peran pengawas dan tim kurikulum sekolah - Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau pakar	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.365			- Penyusunan dan distribusi modul pembelajaran muatan lokal - Pemanfaatan sumber belajar dari potensi lingkungan sekitar - Penganggaran kegiatan pengembangan bahan ajar daerah	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	
	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.366			- Pemetaan potensi lokal daerah sebagai dasar penyusunan muatan lokal - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perancangan kurikulum - Evaluasi periodik relevansi isi muatan lokal	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	
	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.367			- Pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru dan pengembang kurikulum - Penguatan peran pengawas dan tim kurikulum sekolah - Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau pakar lokal	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	
	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.368			- Penyusunan dan distribusi modul pembelajaran muatan lokal - Pemanfaatan sumber belajar dari potensi lingkungan sekitar - Penganggaran kegiatan pengembangan bahan ajar daerah	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	
	Kurikulum muatan lokal belum relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah	ROO.22.01.01.369			- Pemetaan potensi lokal daerah sebagai dasar penyusunan muatan lokal - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perancangan kurikulum - Evaluasi periodik relevansi isi muatan lokal	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Keterbatasan sumber daya manusia dalam penyusunan dan implementasi muatan lokal	ROO.22.01.01.370			- Pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru dan pengembang kurikulum - Penguatan peran pengawas dan tim kurikulum sekolah - Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau pakar lokal	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Kurangnya bahan ajar dan panduan pelaksanaan muatan lokal	ROO.22.01.01.371			- Penyusunan dan distribusi modul pembelajaran muatan lokal - Pemanfaatan sumber belajar dari potensi lingkungan sekitar - Penganggaran kegiatan pengembangan bahan ajar daerah	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	3. Risiko Operasional OPD Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0				0	
	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.372			- Melakukan redistribusi guru berbasis data kebutuhan - Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.373			- Melakukan redistribusi guru berbasis data kebutuhan - Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Ketimpangan distribusi guru antar sekolah	ROO.22.01.01.374			- Melakukan redistribusi guru berbasis data kebutuhan - Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.375			- Pemetaan distribusi guru bersertifikat - Implementasi kebijakan redistribusi guru berbasis kompetensi - Insentif khusus bagi guru bersertifikat di daerah 3T	Kabid. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.376			- Pemetaan distribusi guru bersertifikat - Implementasi kebijakan redistribusi guru berbasis kompetensi - Insentif khusus bagi guru bersertifikat di daerah 3T	Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar	
	Tidak meratanya distribusi guru bersertifikat antar wilayah	ROO.22.01.01.377			- Pemetaan distribusi guru bersertifikat - Implementasi kebijakan redistribusi guru berbasis kompetensi - Insentif khusus bagi guru bersertifikat di daerah 3T	Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
	2. Risiko Operasional OPD Kegiatan	0				0	
	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.378			- Percepatan seleksi dan pengangkatan kepala sekolah sesuai regulasi - Pemanfaatan data SIMPKB untuk pemetaan calon kepala sekolah potensial - Program pengembangan calon kepala sekolah /diklat	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD PNF/Kesetaraan	
	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.379			- Percepatan seleksi dan pengangkatan kepala sekolah sesuai regulasi - Pemanfaatan data SIMPKB untuk pemetaan calon kepala sekolah potensial - Program pengembangan calon kepala sekolah /diklat	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Kekurangan jumlah kepala sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan	ROO.22.01.01.380			- Percepatan seleksi dan pengangkatan kepala sekolah sesuai regulasi - Pemanfaatan data SIMPKB untuk pemetaan calon kepala sekolah potensial - Program pengembangan calon kepala sekolah /diklat	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.381			- Advokasi kebutuhan formasi pengawas baru kepada BKPSDM dan Kemendikbudristek - Penugasan sementara guru senior sebagai calon pengawas Pemanfaatan supervisi daring melalui aplikasi	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD PNF/Kesetaraan	
	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.382			- Advokasi kebutuhan formasi pengawas baru kepada BKPSDM dan Kemendikbudristek - Penugasan sementara guru senior sebagai calon pengawas Pemanfaatan supervisi daring melalui aplikasi	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kekurangan jumlah pengawas sekolah dibanding jumlah satuan pendidikan yang harus dibina	ROO.22.01.01.383			- Advokasi kebutuhan formasi pengawas baru kepada BKPSDM dan Kemendikbudristek - Penugasan sementara guru senior sebagai calon pengawas - Pemanfaatan supervisi daring melalui aplikasi	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Ketidakseimbangan sebaran guru antar satuan pendidikan	ROO.22.01.01.384			- Penataan distribusi guru berbasis data Dapodik - Koordinasi dengan BKPSDM untuk mutasi antar wilayah - Insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah 3T	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Ketidakseimbangan sebaran guru antar satuan pendidikan	ROO.22.01.01.385			- Penataan distribusi guru berbasis data Dapodik - Koordinasi dengan BKPSDM untuk mutasi antar wilayah - Insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah 3T	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.386			- Pemetaan guru dan tenaga kependidikan yang belum S1/D4 - Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) - Pemberian beasiswa pendidikan lanjutan bagi	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.387			- Pemetaan guru dan tenaga kependidikan yang belum S1/D4 - Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) - Pemberian beasiswa pendidikan lanjutan bagi	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	ROO.22.01.01.388			- Pemetaan guru dan tenaga kependidikan yang belum S1/D4 - Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) - Pemberian beasiswa pendidikan lanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SUP nya, Contoh SUP Pemeliharaan: Gedung diersihkan 2 kali sehari

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP